



RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KOTA SAMARINDA Tahun 2005 - 2025



BAPPEDA KOTA SAMARINDA



**WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- b. bahwa Kota Samarinda memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);**
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);**
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);**
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);**
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);**
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);**
- 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan**

Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Tahun 2014-2035 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SAMARINDA

dan

WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Samarinda adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Samarinda adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda serta mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Samarinda untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Pasal 2

RPJPD mempunyai maksud dan tujuan untuk:

- a. memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir tahun 2025;**
- b. menjabarkan indikasi dari gambaran umum yang diinginkan dan bagaimana mencapainya;**
- c. memberikan pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pembangunan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;**
- d. memberikan pedoman bagi calon Wali Kota dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan 5 (lima) tahunan; dan**
- e. merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Samarinda dan RKPD.**

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RPJPD Kota Samarinda merupakan penjabaran kebijakan pembangunan jangka panjang yang penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional.**
- (2) RPJPD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, sasaran jangka panjang, arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok.**

Pasal 4

RPJPD Kota Samarinda merupakan penjabaran tujuan pembangunan dibentuknya Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Kota Samarinda terdiri atas:**
 - a. BAB I Pendahuluan**
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**
 - c. BAB III Analisis Isu-Isu Strategis**
 - d. BAB IV Visi dan Misi Daerah**
 - e. BAB V Sasaran dan Arah Kebijakan**
 - f. BAB VI Kaidah Pelaksanaan**
 - g. BAB VII Penutup.**
- (2) Uraian secara rinci dokumen RPJPD Kota Samarinda berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

**BAB IV
VISI DAN MISI**

Pasal 6

- (1) Visi jangka panjang Daerah yaitu “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan”.**
- (2) Misi jangka panjang Daerah yaitu untuk:**
 - a. mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum;**
 - b. mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan Daerah; dan**
 - c. mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri.**
- (3) Visi dan misi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJPD Kota Samarinda.**

**BAB V
KAIDAH DAN PELAKSANAAN**

Pasal 7

- (1) RPJPD Kota Samarinda dilaksanakan melalui RPJMD Kota Samarinda sesuai arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.**
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Samarinda dapat digunakan sebagai dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD periode terkait dalam hal terjadi kekosongan rencana pembangunan jangka menengah.**

**BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Wali Kota.**

**BAB VII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJPD Kota Samarinda dilakukan apabila:**
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah;**
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah ;**
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau**

- d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
 - h. *force majeure* dan/atau Keadaan di luar jangkauan kemampuan stabil/normal.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJPD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, Wali Kota yang sedang menjabat periode terakhir RPJPD Kota Samarinda (Tahun 2024) diwajibkan menyusun rancangan RPJPD periode berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2015
WALI KOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

**Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2015 NOMOR 4.

KATA PENGANTAR

Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda pada dasarnya adalah dokumen komprehensif dua puluh tahunan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda untuk setiap jangka waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 penting disusun sebagai acuan dan arahan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, dalam arti melibatkan masukan dan dukungan dari seluruh stakeholders terkait, para akademisi dan tokoh masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik.

Di dalam RPJPD Kota Samarinda selain memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, juga sekaligus indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai seberapa jauh pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, RPJPD Kota Samarinda merupakan arahan atau pemandu bagi penyelenggaraan pembangunan di Kota Samarinda yang demokratis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi masa depan.

RPJPD Kota Samarinda dirumuskan selaras dengan amanat RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional. Secara garis besar, tujuan penyusunan RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 ini adalah sebagai berikut: (1) Merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda 2005-2025, (2) Merumuskan arah pembangunan jangka panjang dan indikator untuk menakar keberhasilan pembangunan di Kota Samarinda, (3) Merumuskan kaidah pelaksanaan program pembangunan di Kota Samarinda, (4) Mengakomodasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kota Samarinda dalam proses perencanaan program pembangunan jangka panjang, (5) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat, (6) Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Kota Samarinda secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (7) Menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan di Kota Samarinda yang dilaksanakan per-lima tahunan.

RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 ini telah berhasil disusun walau terlambat mengingat periode berlakunya tinggal 2 periode (2015–2025), Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk melakukan yang terbaik sehingga berbagai hal terkait perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tetap menjadi prioritas dalam pencapaian misi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan hal ini sudah tentu berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda yang telah memberikan masukan untuk perbaikan RPJPD ini.
2. Seluruh Tim Penyusun RPJPD yang telah bekerja keras dan memberikan masukan dan kritik terhadap draft RPJPD.
3. Para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
4. Seluruh stakeholders yang telah memberikan kritik, masukan dan menyampaikan aspirasinya untuk melengkapi RPJPD ini.
5. Para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
6. Seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan menyampaikan aspirasinya dalam proses penyusunan RPJPD Kota Samarinda ini.

Kami berharap RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi lembaga perangkat daerah, stakeholders terkait, pihak swasta, dan seluruh komponen masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan lima tahunan dan tahunan yang lebih membumi dan berkesinambungan, terutama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Samarinda, yaitu: **Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota TEPIAN Yang Terdepan di Kalimantan.**

WALIKOTA SAMARINDA

H. SYAHARIE JA'ANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 4 TAHUN 2015	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
1.5 Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Samarinda	II-2
2.1.2 Kondisi Topografi	II-7
2.1.3 Kondisi Geologi	II-8
2.1.4 Kondisi Fisiografi	II-9
2.1.5 Kondisi iklim	II-10
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah	II-10
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana	II-19
2.1.8 Demografi	II-24
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-28
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-38
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-47
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-47
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-61
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-64
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-64
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-65
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-69
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-71

BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
	3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah III-1
	3.2	Isu Strategis III-12
	3.2.1	Penelaahan Isu-isu Strategis Internasional III-13
	3.2.2	Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional III-17
	3.2.3	Penelaahan Isu-isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur III-21
	3.2.4	Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Wilayah Sekitar III-29
	3.2.5	Penelaahan Target Indikator Makro Pembangunan antara Kota Samarinda dengan Kota-kota Besar di Pulau Kalimantan (Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin dan Kota Pontianak) III-32
	3.2.6	Penelaahan Isu-isu Strategis Kota Samarinda III-34
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	
	4.1	Visi IV-2
	4.2	Misi IV-8
BAB V	SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1	Sasaran Pembangunan Jangka Daerah V-4
	5.2	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok V-7
	a.	Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMD) Tahap I V-9
	b.	Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMD) Tahap II V-13
	c.	Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMD) Tahap III V-20
	d.	Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMD) Tahap IV V-29
	5.3	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah V-42
BAB VI	KAJIDAH PELAKSANAAN	
	6.1	Prinsip Kaidah Pelaksanaan VI-1
	6.2	Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi VI-2
	6.3	Perubahan Dokumen Perencanaan VI-5
BAB VII	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda	II-5
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Klasifikasi Kedalaman Tanah Kota Samarinda, Tahun 2013	II-7
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Kota Samarinda, Tahun 2013	II-9
Tabel 2.4	Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi Kota Samarinda, Tahun 2013	II-9
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013	II-11
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan Kota Samarinda tahun 2007-2012	II-14
Tabel 2.7	Potensi Unggulan Pertanian di Kota Samarinda	II-16
Tabel 2.8	Potensi Unggulan Peternakan di Kota Samarinda	II-16
Tabel 2.9	Potensi Unggulan Perikanan di Kota Samarinda	II-17
Tabel 2.10	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011	II-19
Tabel 2.11	Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda	II-20
Tabel 2.12	Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda	II-23
Tabel 2.13	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2013	II-26
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kota Samarinda, Tahun 2009-2013	II-27
Tabel 2.15	Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Samarinda, Tahun 2009 s.d 2014	II-30
Tabel 2.16	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Timur, 2009-2013	II-31
Tabel 2.17	Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Samarinda, 2014	II-34
Tabel 2.18	PDRB Per Kapita Kota Samarinda, Tahun 2010-2014	II-35
Tabel 2.19	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2008-2013	II-36
Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008-2013	II-39
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2014 Kota Samarinda	II-41
Tabel 2.22	Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)	II-42

Tabel 2.23	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 –2013 (Tahun)	II-43
Tabel 2.24	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Kota Samarinda, Tahun 2013	II-45
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Kota Samarinda, Tahun 2009-2013	II-46
Tabel 2.26	Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2013/2014	II-49
Tabel 2.27	Statistik Fasilitas Kesehatan Kota Samarinda, Tahun 2010-2014	II-50
Tabel 2.28	Statistik Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Kota Samarinda, Tahun 2013	II-51
Tabel 2.29	Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda, 2009-2014	II-51
Tabel 2.30	Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan	II-52
Tabel 2.31	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Samarinda, 2009-2014	II-53
Tabel 2.32	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih Kota Samarinda, 2009-2014	II-53
Tabel 2.33	Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh	II-54
Tabel 2.34	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Samarinda, 2009-2014	II-56
Tabel 2.35	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2013	II-58
Tabel 2.36	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Samarinda, Tahun 2010 s.d. 2014	II-59
Tabel 2.37	Perkembangan Produksi Batubara Kota Samarinda Tahun 2009-2013 (Ton)	II-63
Tabel 2.38	Angka Konsumsi Rumah tangga per Kapita Kota Samarinda, 2009-2014	II-65
Tabel 2.39	Ketersediaan RTH terhadap RTRW (Hektar) Kota Samarinda, 2010-2014	II-66
Tabel 2.40	Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Samarinda, 2010-2014	II-67
Tabel 2.41	Data Lingkungan Hidup di Kota Samarinda, 2010-2014	II-67
Tabel 2.42	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Samarinda, 2009-2014	II-68
Tabel 2.43	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Samarinda, 2009-2014	II-69
Tabel 2.44	Delapan Besar Perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang Masuk dan Diselesaikan Kota Samarinda, 2013	II-70
Tabel 2.45	Rasio Ketergantungan Kota Samarinda, 2010-2014	II-72
Tabel 3.1	Permasalahan Belum terciptanya Kualitas Hidup dan Kesenjangan Sosial	III-6

Tabel 3.2	Permasalahan Perekonomian yang belum kuat dan mapan	III-8
Tabel 3.3	Permasalahan Pembangunan belum berbasis lingkungan	III-11
Tabel 3.4	Permasalahan Penggunaan Lahan dan Fungsi Sungai Belum Sesuai Tata Ruang	III-12
Tabel 3.5	Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025	III-18
Tabel 3.6	Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur	III-25
Tabel 3.7	Identifikasi RPJPD Wilayah Sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara	III-28
Tabel 3.8	Rencana Pengembangan Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang Berbatasan Langsung dengan Kota Samarinda	III-29
Tabel 3.9	Target Indikator Utama Pembangunan Kota-Kota Besar di Kalimantan (menurut RPJPD)	III-33
Tabel 3.10	Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Kota Samarinda menurut Sustainable Development Aspects	III-44
Tabel 4.1	Pencapaian Indikator Utama Pembangunan Kota-Kota Besar Di Pulau Kalimantan	IV-8
Tabel 4.2	Konsistensi Terhadap RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Kota Samarinda	IV-16
Tabel 5.1	Sustainable Development Aspects dalam RPJPD Kota Samarinda	V-2
Tabel 5.2	Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJPD	V-6
Tabel 5.3	Visi, Misi, Sasaran, Sasaran Pokok, Indikator dan Target RPJPD Kota Samarinda 2005-2025	V-36
Tabel 5.4	Fokus dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Samarinda 2005-2025	V-38
Tabel 5.5	Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2023	V-42
Tabel 5.6	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	V-47
Tabel 5.7	Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda	V-50
Tabel 5.8	Potensi Pengembangan Kota Samarinda	V-57
Tabel 5.9	Indikasi Program RTRW Kota Samarinda Tahun 2015-2025	V-63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Samarinda	I-5
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya	I-10
Gambar 1.3	Hubungan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-11
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Samarinda	II-4
Gambar 2.2	Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kab/Kota Tahun 2013	II-12
Gambar 2.3	Persentase luas daratan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kab/Kota	II-12
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013	II-13
Gambar 2.5	Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2000-2011	II-20
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 2006-2014	II-25
Gambar 2.7	Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2014	II-26
Gambar 2.8	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Juta Rupiah) Kota Samarinda, 2009-2014	II-29
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, 2009-2014	II-32
Gambar 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Samarinda, 2014	II-33
Gambar 2.11	Laju Inflasi Kota Samarinda, 2008-2014	II-34
Gambar 2.12	Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013	II-38
Gambar 2.13	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda, 2009-2013	II-39
Gambar 2.14	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Samarinda, 2009-2014	II-43
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup Dari Tahun 2010-2014 Kota Samarinda	II-45
Gambar 2.16	Angka Partisipasi Sekolah Kota Samarinda, Tahun 2013	II-48
Gambar 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Samarinda, 2009-2013	II-57
Gambar 2.18	Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, (Agustus 2013)	II-59
Gambar 2.19	Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kota Samarinda, 2009-2013 (ton/ha)	II-60
Gambar 2.20	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran terhadap PDRB	II-61
Gambar 2.21	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014	II-62
Gambar 2.22	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Samarinda, 2009-2014	II-63

Gambar 2.23	Angka Kriminalitas dan Angka Kriminalitas yang Diselesaikan Kota Samarinda, 2010-2014	II-71
Gambar 3.1	Tahapan Dan Skala Prioritas RPJPD Kalimantan Timur 2005-2025	III-24
Gambar 3.2	Pemetaan Isu Strategis Kota Samarinda	III-34
Gambar 3.3	Hubungan Smart City dengan Sustainable Development	III-41
Gambar 4.1	Rumusan Visi dan Pokok-pokok Visi Pembangunan Kota Samarinda	IV-5
Gambar 4.2	Keterhubungan Visi Terhadap Misi Kota Samarinda	IV-15
Gambar 5.1	Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda	V-9
Gambar 5.2	Peta Pola Ruang Kota Samarinda	V-62



BAB I

PENDAHULUAN

Kota Samarinda yang dikenal sebagai Kota Tepian, dulunya adalah salah satu wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara di Martadipura. Sampai pertengahan abad ke-17, Wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan beberapa penduduk. Lahan persawahan dan perladangan itu umumnya dipusatkan di sepanjang tepi Sungai Karang Mumus dan Sungai Karang Asam.

Sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksud Sultan Kutai, sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Selain itu, Sultan yang dikenal bijaksana ini memang bermaksud memberikan tempat bagi masyarakat Bugis yang mencari suaka ke Kutai akibat peperangan di daerah asal mereka. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah. Nama ini tentunya bukan asal sebut. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang, berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara orang Bugis, Kutai, Banjar dan suku lainnya. Dengan rumah rakit yang berada di atas air, harus sama tinggi antara rumah satu dengan yang lainnya, melambangkan tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak, semua "sama" derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar muara sungai yang berulak dan di kiri kanan sungai daratan atau "rendah". Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarenda atau lama-kelamaan ejaan Samarinda. Istilah atau nama itu memang sesuai dengan keadaan lahan atau lokasi yang terdiri atas dataran rendah dan daerah persawahan yang subur.

Dengan berdasarkan sejarah diatas, kemudian sesuai perkembangan kebijakan dalam NKRI Pemerintah Negara Indonesia mendeklarasikan terbentuknya Kota Samarinda. Kota Samarinda dibentuk pada tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan UU Darurat No. 3 Tahun 1953, Lembaran Negara No. 97 Tahun 1953 tentang Pembentukan



daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/kotamadya di Kalimantan Timur. Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 18/SK/TH-Pem/1969 dan SK No. 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1969, wilayah administratif Kodya Dati II Samarinda ditambah dengan 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja (luas sekitar 2.727 km²).

Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Samarinda memiliki dinamika perkembangan daerah yang pesat. Kota Samarinda adalah kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3.2% jumlah penduduk Kota Samarinda akan terus meningkat ke arah Kota Metropolitan (jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa). Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya luasan Kota Samarinda sebagai kawasan resapan karena kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk. Selain prediksi Kota Samarinda yang menjadi Kota Metropolitan, Kota Samarinda juga mempunyai peran penting yaitu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan bersama dengan Kota/Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (Sanga-sanga dan Muara Jawa) dan Balikpapan sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET SASAMBA) dan bersama dengan Kota Bontang, Tenggarong (Kabupaten Kutai Kartanegara), Balikpapan dan Penajam sebagai Kawasan Andalan Bontamsembajam. Oleh karena itu, Kota Samarinda memerlukan perencanaan pembangunan dan tata ruang yang bersinergi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dan kebutuhan tata ruang di masa mendatang yang tertuang dalam Dokumen RPJP Kota Samarinda tahun 2005-2025 (perencanaan pembangunan dua puluh tahun mendatang).

Dalam beberapa dekade, Kota Samarinda mengalami pertumbuhan pada beberapa bidang dan sektor namun ada juga yang mengalami penurunan. Dengan hal ini, pemerintah daerah Kota Samarinda tidak boleh lengah untuk terus meningkatkan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda dapat terus ditingkatkan. Pembangunan daerah ini memerlukan suatu perencanaan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan aspek lingkungan sehingga pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat memberikan kesejahteraan lebih kepada masyarakatnya.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah inilah yang menjadi salah satu instrumen pembangunan yang mengedepankan prinsip keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan pembangunan dengan bertumpu pada kearifan lokal. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis karena memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan masyarakat di Kota Samarinda. RPJPD Kota Samarinda disusun untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2025 sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan dan harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang dan pelaksanaan tahapan-tahapannya dalam jangka menengah.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yakni (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada rangkaian pembangunan nasional dan daerah berawal pada rangkaian perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Nasional dan Daerah.

Dalam dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD) harus mempedomani dokumen perencanaan daerah jangka panjang nasional Tahun 2005-2025. Sehingga akan terjadi sinkronisasi dan kesinergisan pembangunan nasional dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah (termasuk Kabupaten/Kota) wajib menyusun RPJPD untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. RPJPD merupakan



penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan rencana tata ruang.

Dasar hukum lainnya adalah ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, diantaranya: dilakukan pemerintah daerah bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perumusan Dokumen RPJPD dalam hal ini adalah RPJP Kota Samarinda tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang dibuat pada tahun 2015 dengan menggunakan data dan dokumen perencanaan yang terkait sebelum tahun 2015. Dengan bersumber pada Permendagri No.54 tahun 2010 lampiran 2 point (b), rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen RPJP Kota Samarinda periode 2005-2025 yaitu sebagai berikut :

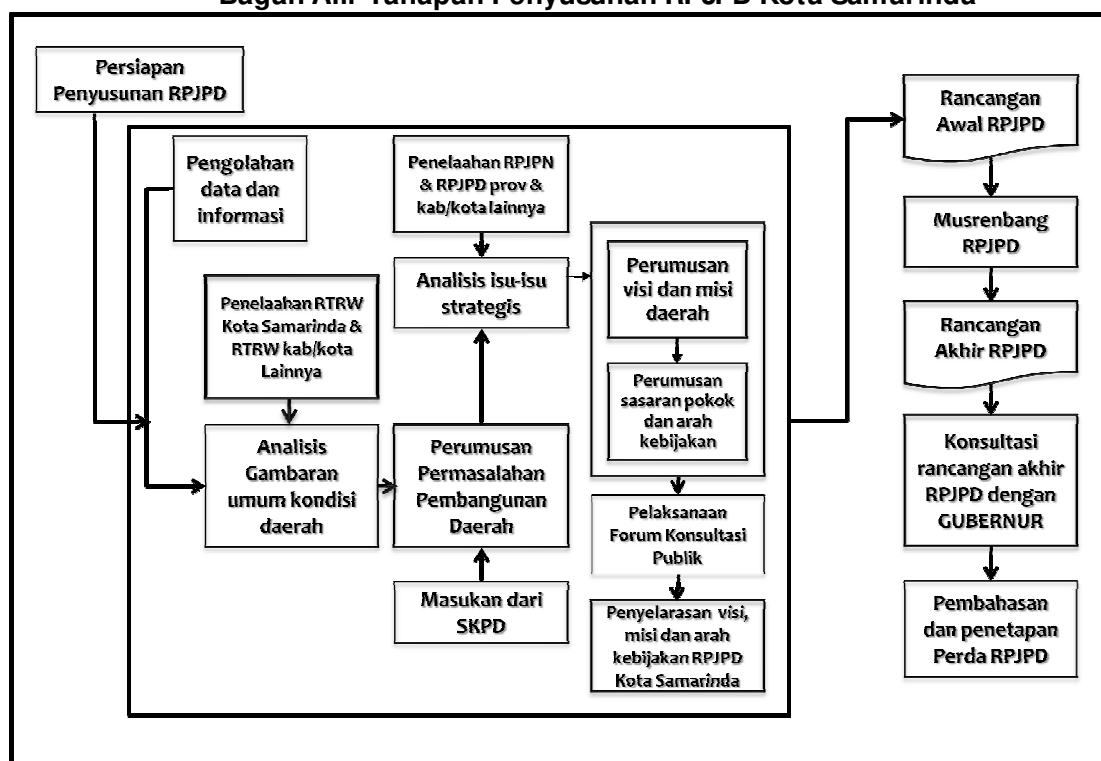
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Penelaahan RTRW Kota Samarinda dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya;
3. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Samarinda;
4. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
5. Penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten/Kota lainnya;
6. Analisis Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda;
7. Perumusan Visi dan Misi Daerah Kota Samarinda;
8. Perumusan Arah Kebijakan;



- 9. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik; dan
- 10. Penyelarasan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota.

Maka substansi RPJP Kota Samarinda harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan Kabupaten/Kota berbatasan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi Kota Samarinda termasuk rencana tata ruang yang terlibat. Dengan mempertimbangkan setiap aspek penting perencanaan, diharapkan RPJP Kota Samarinda dapat memuat visi, misi dan arah pembangunan kota selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan lebih terarah dan terencana. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dilaksanakan melalui beberapa misi dan dijabarkan melalui beberapa misi dan dijabarkan melalui berbagai sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Perumusan dan penyusunan RPJP menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. RPJP ini selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan, yaitu periode 2005-2010, 2010-2015, 2016-2021 dan 2021-2025. RPJP yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengikat seluruh komponen masyarakat Kota Samarinda baik itu pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat umum lainnya.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Samarinda



Sumber: Permendari Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Lembaran Negara Republik Indonesia 4815)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034.

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun digunakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Samarinda. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Walikota yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJPD ini penyusunannya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai karakteristik daerah. Tujuan penyusunan RPJPD Kota Samarinda adalah:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah, DPRD, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program yang telah disepakati
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi keterlibatan masyarakat
4. Menjamin terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan nasional serta *Sustainable Development Goals (SDGs)*.



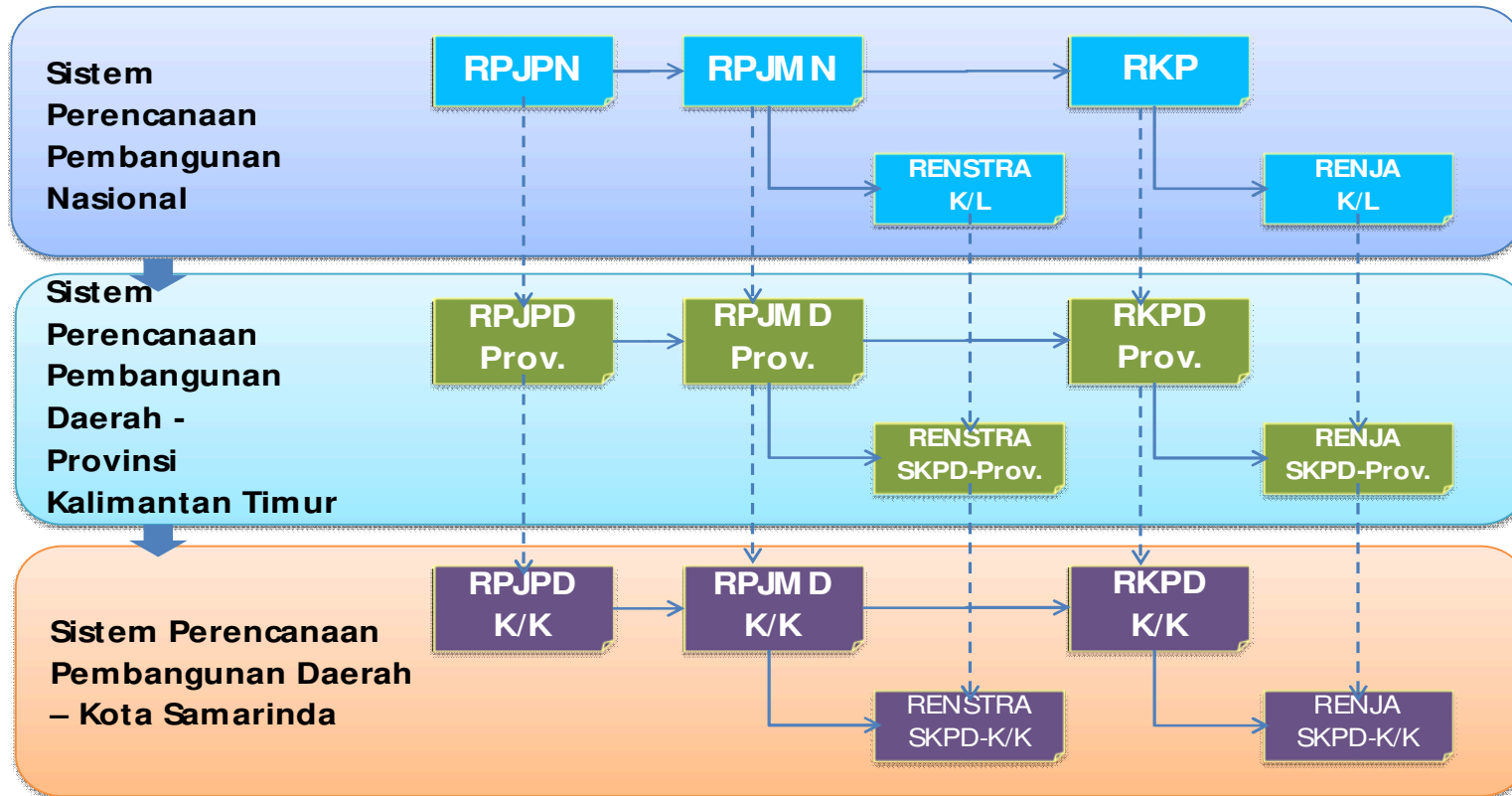
1.4 Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen lainnya Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penyusunan RPJPD Kota Samarinda wajib memperhatikan keberadaan Dokumen Perencanaan lainnya seperti RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Samarinda yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, RPJPD Kota Samarinda disusun mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur serta dengan memperhatikan kebijakan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan RPJPD Kota Samarinda dilakukan melalui penyelarasan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Samarinda dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain Dokumen Perencanaan RPJPD, Penyusunan RPJPD Kota Samarinda juga wajib memperhatikan Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang tertuang dalam RTRW Nasional 2005-2025, RTRW Provinsi Kalimantan Timur, RTRW Kota Samarinda, serta RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Samarinda. Dalam hal ini, proses penyusunan dilaksanakan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan memperhatikan arahan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota.

RPJPD Kota Samarinda digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota untuk periode perencanaan 5 tahunan, dan RPJMD Kota Samarinda digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Samarinda. Keterkaitan dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar bagan dibawah ini.



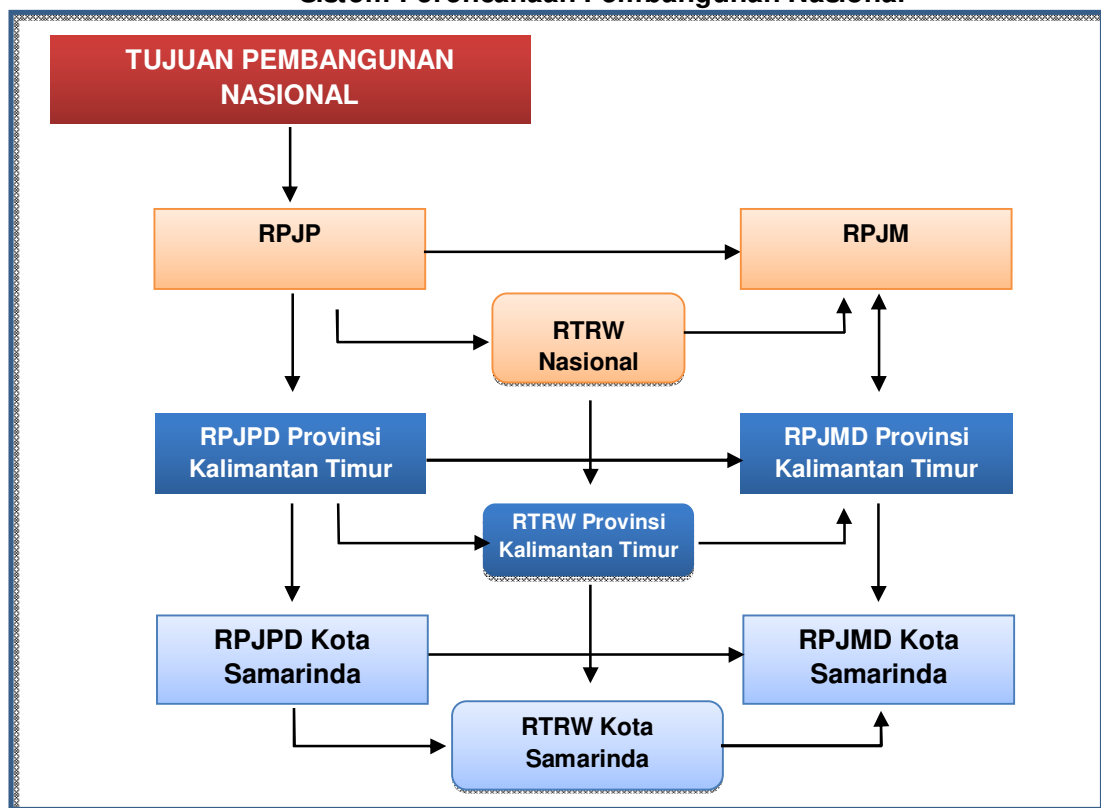
Gambar 1.2
Keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya





Penyusunan RPJPD antara lain didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang dan RPJPD saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka panjang turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kota Samarinda. Sasaran dan arah pembangunan jangka panjang juga harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Berikut ini diagram alir yang memperlihatkan kedudukan RTRW dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 1.3
Hubungan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Dari gambar di atas, tampak jelas bahwa peran RPJPD sangat penting dalam kaitannya dengan RTRW dan kedudukannya bagi perencanaan pembangunan jangka panjang. Kedua dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan utama penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan penataan ruang. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah akan menciptakan keterpaduan dan keselarasan pencapaian



tujuan pembangunan bersama-sama, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD ini memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 meliputi 7 (tujuh) bab, terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan;** berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, landasan hukum, dan hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;** menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III Analisis Isu-isu Strategis;** mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kota Samarinda.
- BAB IV Visi dan Misi Daerah;** berisi pernyataan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang.
- BAB V Sasaran dan Arah Kebijakan;** berisi sasaran pembangunan daerah jangka panjang, arah pembangunan, dan sasaran pokok masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan.
- BAB VI Kaidah Pelaksanaan;** berisi prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi hasil RPJPD.
- BAB VII Penutup;** merupakan penutup dari keseluruhan materi RPJPD Kota Samarinda



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur, asal mula Kota Samarinda dimulai pada sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksud Sultan Kutai, sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang, berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara orang Bugis, Kutai, Banjar dan suku lainnya. Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarenda atau lama-kelamaan ejaan Samarinda.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak potensi sumber daya daerah dalam pelaksanaan pencapaian target pembangunan di Kota Samarinda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Dalam mencapai target pembangunan daerah perlu adanya pengenalan yang cukup baik terhadap kondisi daerah. Sehingga akan mampu memaksimalkan segala potensi daerah yang ada. Gambaran umum kondisi daerah di Kota Samarinda memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kota Samarinda. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.



2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, kota Samarinda hanya terdiri atas 4 kecamatan yang kemudian pada tahun 1997 dimekarkan menjadi 6 kecamatan terdiri dari 42 kelurahan. Jumlah kelurahan terus bertambah dengan diterbitkannya “Perda Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah kota Samarinda”; dan mengacu pada “Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan 11 kelurahan baru hasil dari pemecahan/pemekaran dalam wilayah kota Samarinda”, maka jumlah kelurahan setelah pemekaran menjadi 53 kelurahan. Akibat jumlah penduduk yang terus meningkat dan untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat, maka ditetapkanlah Perda Nomor 02 tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir, yang membagi Kota Samarinda menjadi 10 Kecamatan dengan jumlah kelurahan yaitu 53. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemekaran Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda, Kota Samarinda kini memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan seiring dengan terbentuknya Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun Samarinda, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara $117^{\circ}03'00''$ – $117^{\circ}18'14''$ Bujur Timur dan $00^{\circ}19'02''$ – $00^{\circ}42'34''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah adalah 718 km^2 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

Sungai-sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau.

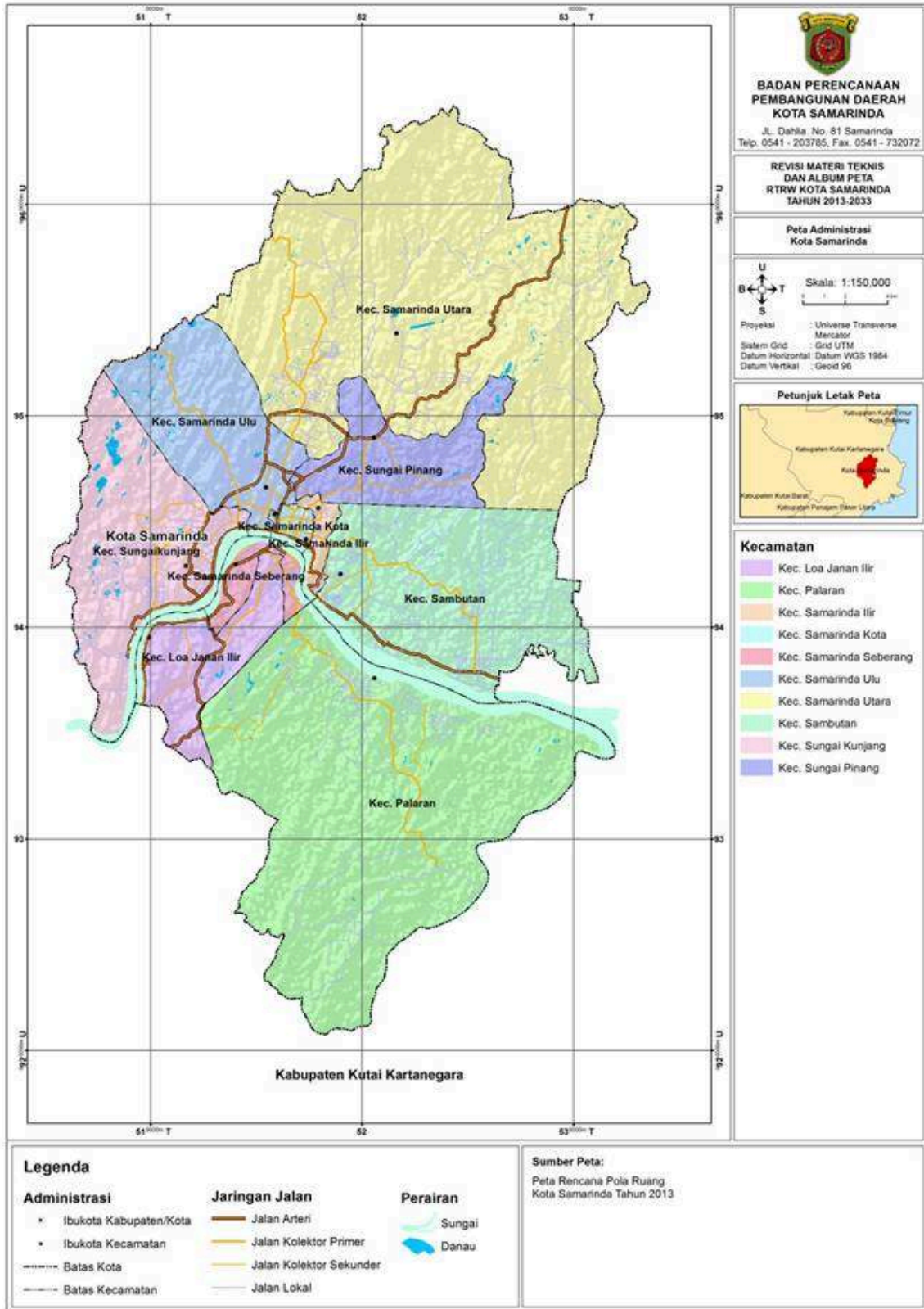


Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini sebagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur, Luas Wilayah Kota Samarinda adalah 718 Km² yang terbagi secara administratif semula 6 kecamatan kini menjadi 10 kecamatan berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan terdiri atas 59 kelurahan. Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec. Muara Badak (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Timur : Kec. Anggana dan Sanga-sanga (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Selatan : Kec. Loa Janan (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Barat : Kec. Muara Badak dan Tenggarong Seberang (Kutai Kartanegara).



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Samarinda



Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2013-2033



Tabel 2.1
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km²)
(1)	(2)	(3)
1. Palaran	1. Handil Bakti	72,00
	2. Simpang Pasir	65,00
	3. Rawa Makmur	11,89
	4. Bukuan	28,40
	5. Bantuas	44,00
2. Samarinda Ilir	1. Selili	1,49
	2. Sungai Dama	2,50
	3. Sidodamai	2,87
	4. Sidomulyo	1,40
	5. Pelita	8,92
3. Samarinda Kota	1. Bugis	0,58
	2. Pasar Pagi	0,48
	3. Pelabuhan	0,72
	4. Sungai Pinang Luar	8,85
	5. Karang Mumus	0,49
4. Sambutan	1. Pulau Atas	29,59
	2. Sindang Sari	1,70
	3. Makroman	20,96
	4. Sambutan	31,00
	5. Sungai Kapih	17,70
5. Samarinda Seberang	1. Mesjid	2,53
	2. Mangkupalas	
	3. Tenun Samarinda	
	4. Baqa	2,31
	5. Sungai Keledang	7,65
	6. Gunung Panjang	



KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
(1)	(2)	(3)
6. Loa Janan Ilir	1. Sengkotek	4,95
	2. Simpang Tiga	4,21
	3. Tani Aman	3,92
	4. Harapan Baru	6,33
	5. Rapak Dalam	6,72
7. Sungai Kunjang	1. Loa Buah	16,90
	2. Loa Bakung	16,59
	3. Teluk Lerong Ulu	1,20
	4. Lok Bahu	3,42
	5. Karang Asam Ulu	2,25
	6. Karang Asam Ilir	1,29
	7. Karang Anyar	1,39
8. Samarinda Ulu	1. Teluk Lerong Ilir	0,69
	2. Jawa	7,68
	3. Dadi Mulya	2,89
	4. Sidodadi	1,37
	5. Gunung Kelua	1,19
	6. Air Hitam	2,65
	7. Air Putih	2,16
	8. Bukit Pinang	3,49
9. Samarinda Utara	1. Lempake	32,83
	2. Sempaja Selatan	40,34
	3. Sempaja Barat	
	4. Sempaja Timur	
	5. Sungai Siring	75,83
	6. Budaya Pampang	
	7. Tanah Merah	22,16
	8. Sempaja Utara	58,36



KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
(1)	(2)	(3)
10. Sungai Pinang	1. Temindung Permai	1,30
	2. Bandara	8,59
	3. Sungai Pinang Dalam	8,97
	4. Mugirejo	10,94
	5. Gunung Lingai	4,36
Kota Samarinda		718,02

2.1.2. Kondisi Topografi

Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Samarinda didominasi oleh kemiringan lahan yang cukup datar dimana 27,39 persen berada pada kemiringan kurang dari 2 persen dan seluas 25,47% berada pada kemiringan 2-15 persen. Sedangkan dari sisi klasifikasi kedalaman tanah, sebagian besar luas wilayah Kota Samarinda menunjukkan kelas kedalaman tanah mencapai lebih dari 90 cm yakni seluas 39.833 Ha atau 55,48 persen.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Klasifikasi Kedalaman Tanah
Kota Samarinda, Tahun 2013

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Kelas Lereng (%)		
<2	19.663,19	27,39
2-15	18.290,88	25,47
15-25	10.630,59	14,81
25-40	11.248,92	15,67
>40	9.348,90	13,02
Perairan	2.617,52	3,65
Kelas Kedalaman (cm)		
<30	-	-



Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
30-60	11.544,13	16,08
60-90	17.805,32	24,80
>90	39.833,03	55,48
Perairan	2.617,52	3,65

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2014

2.1.3. Kondisi Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Samarinda, menurut Soil Taxonomy USDA tergolong ke dalam jenis tanah: Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptisols dan Mollisol atau bila menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang arealnya terluas di Kota Samarinda mencapai 57,57 persen dan masih tersedia untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur-unsur hara di permukaan belum habis melalui proses biocycle.



Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah
Kota Samarinda, Tahun 2013

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Jenis Tanah		
Aluvial	3.755	5,23
Gambut	17.720	24,68
Assosiasi Podsolik/Listeset	8.990	12,52
Podsolik	41.335	57,57
Lain-lain	3.755	5,23

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2014

2.1.4. Kondisi Fisiografi

Dari sisi fisiografi wilayah Kota Samarinda didominasi oleh daerah patahan (*fault area*) yang mencapai 41,12 persen dari total luas Kota Samarinda atau sebesar 295,26 Km². Kemudian diikuti oleh daerah dataran (*plain area*) yang sebesar 105,24 Km² atau sebesar 14,66 persen dari luas Kota Samarinda. Sedangkan rawa dan sungai hanya menempati tidak lebih dari 56 Km² atau hanya 7,8 persen dari luas Kota Samarinda.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi
Kota Samarinda, Tahun 2013

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Fisiografi		
Lembah Aluvial	9.479	13,20
Daerah Dataran	10.524	14,66
Dataran Berombak	9.636	13,42
Dataran Bergelombang	1.527	2,13
Daerah Patahan	29.526	41,12



Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Daerah Berbukit	634	0,88
Rawa	218	0,30
Sungai	5.379	7,49
Lain-lain	4.877	6,79

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2014

2.1.5. Kondisi iklim

Menurut data dari BMKG Samarinda, Kota Samarinda memiliki suhu minimum berkisar antara 23,9⁰C dan suhu maksimum berkisar 32,7⁰C pada tahun 2013. Selain itu, kelembaban udara terendah rata-rata berada pada angka 82 persen dan kelembaban udara tertinggi sekitar 84 persen. Kota Samarinda memiliki iklim tropis serta terjadi hujan sepanjang tahun dengan rata-rata curah hujan 237,8 mm/th; rata-rata penyinaran matahari sebesar 39 persen; dan rata-rata jumlah hari hujan per bulan sebanyak 22 hari hujan.

2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Samarinda sebagai salah satu kota besar di Indonesia sangat menyadari potensi wilayahnya yang berdasarkan pada jumlah penduduk yang terus meningkat dan luasan potensial wilayah pengembangannya. Sebagai Kota yang diperkirakan akan menjadi Kota Metropolitan pertama di Provinsi Kalimantan Timur, kota ini hanya memiliki luas kedelapan terkecil di Provinsi Kalimantan Timur yaitu hanya 0.61% atau seluas 71,800 Hektar (Gambar 2.2) dari total wilayah Provinsi yaitu 11.752.408 Hektar dan penduduk terbanyak yaitu 24,41% dibandingkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 805.688 jiwa (2013) (Gambar 2.2) dari total jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yaitu 3.300.517 jiwa. Mengingat luas wilayah yang terbatas, fungsi kota sebagai Ibukota Provinsi, dan jumlah penduduk yang padat mengakibatkan Kota Samarinda perlu banyak melakukan penyesuaian terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruangnya.



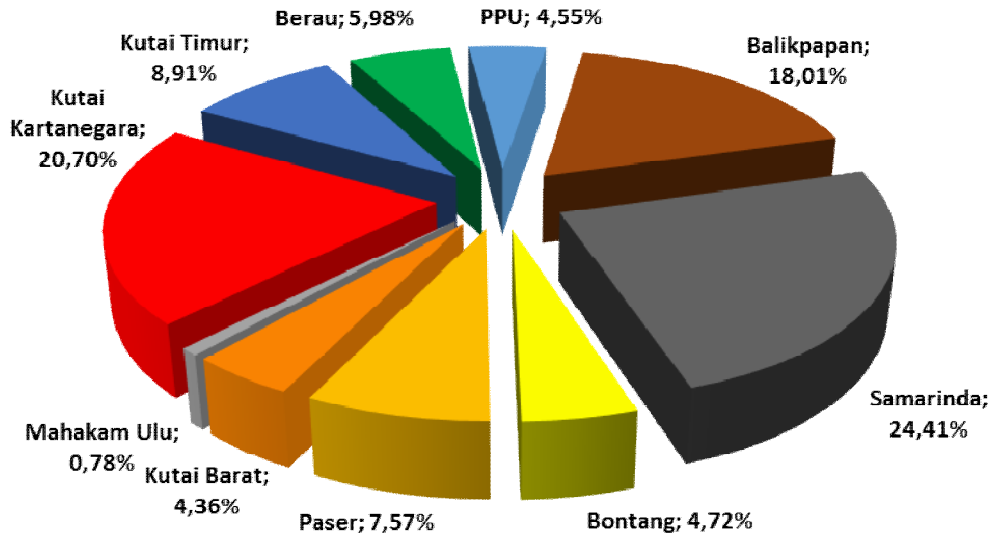
Tabel 2.5
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Paser	249.991	11.192,93	22,33
2	Kutai Barat	144.018	15.630,60	9,21
3	Mahakam Ulu	25.678	15.315,00	1,68
4	Kutai Kartanegara	683.131	26.348,95	25,93
5	Kutai Timur	294.216	31.896,49	9,22
6	Berau	197.388	22.200,33	8,89
7	PPU	150.205	3.211,55	46,77
8	Balikpapan	594.322	561,28	1.058,87
9	Samarinda	805.688	717,83	1.122,39
10	Bontang	155.880	192,56	809,51
Kalimantan Timur		3.300.517	127.267,52	25,93

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2014

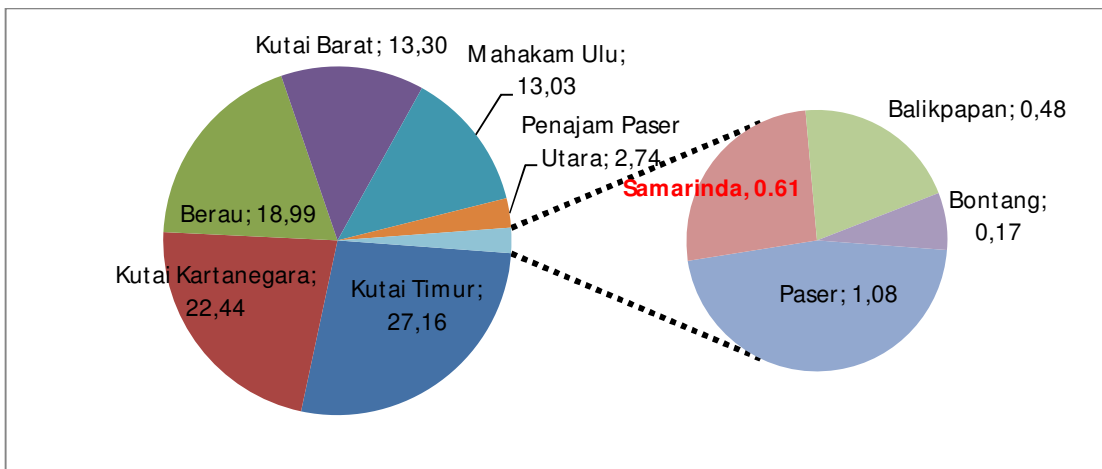


Gambar 2.2
Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kab/Kota Tahun 2013



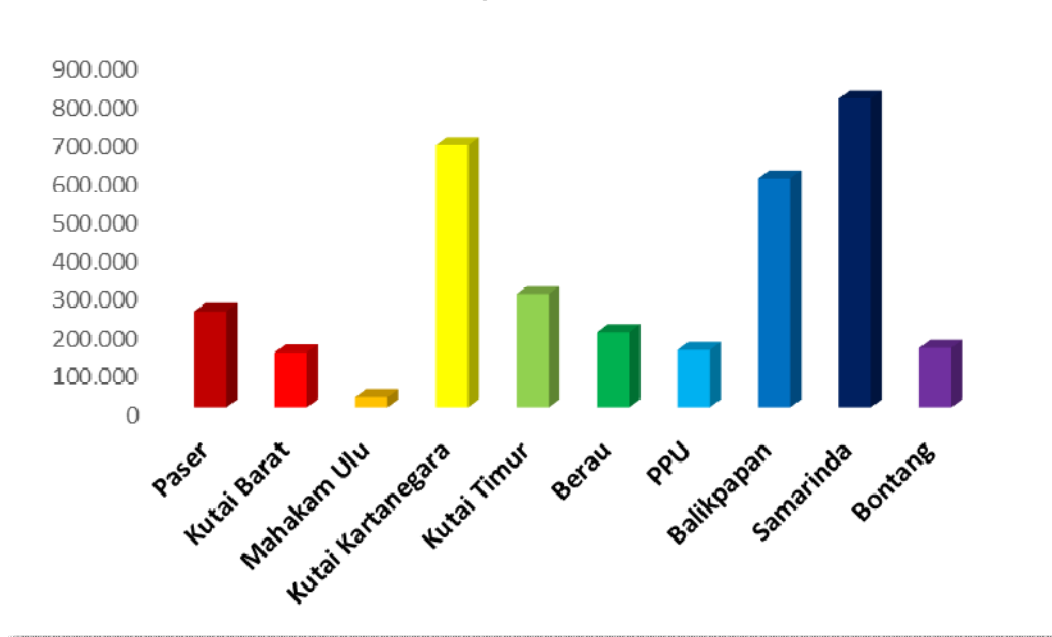
Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka 2014

Gambar 2.3
Persentase luas daratan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kab/Kota



Sumber : <http://www.bappedakaltim.com/profil/profil-daerah-kaltim.html>

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013



Sumber : Kalimantan Timur dalam Angka, Tahun 2014

Adapun potensi pengembangan wilayah Kota Samarinda ke depannya dapat mengacu pada kebijakan Penataan Ruang terhadap Kota Samarinda yang dibagi menjadi 3 (tiga) sumber kebijakan yaitu 1) Pemerintah Pusat (RTRW Nasional); 2) Provinsi Kalimantan Timur (RTRW Provinsi); dan 3) RTRW Kota Samarinda.

a. Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

Kota Samarinda adalah salah satu Kota Besar di Provinsi Kalimantan Timur yang tingkat perkembangannya sangat cepat. Sebagai calon Kota Metropolitan pertama di Provinsi Kalimantan Timur, tantangan potensi pengembangan Kota Samarinda sangat luar biasa baik terhadap kebutuhan lahan yang terbatas yaitu 718 Km² dan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat sebagai potensi Sumber Daya Manusia dalam rangka menuju Kota Metropolitan dengan basis sektor unggulan yaitu perdagangan dan jasa.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan



penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Oleh karena itu, konsep *Waterfront City Development* yaitu pengembangan daerah tepian Sungai Mahakam dan anak sungainya untuk menjadi area pariwisata menjadi salah satu kawasan prioritas (strategis) pengembangan Kota Samarinda ke 20 tahun mendatang yang berbasis pada perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Kota Samarinda tahun 2007-2012

Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Lahan Pertanian	37.985	34.659	35.242	34.782	33.435	
	1.1. Lahan Sawah	8.753	8.089	8.021	7.562	6.729	5506*
	a. Irigasi Teknis	-	-	-	-	-	
	b. Irigasi Setengah Teknis	511	611	438	438	433	
	c. Irigasi Sederhana	1.120	640	184	184	184	
	d. Irigasi Desa/Non PU	175	64	108	108	108	
	e. Tadah Hujan	337	2.511	2.049	1.781	1.269	
	f. Pasang Surut	35	-	-	-	25	
	g. Lebak	-	-	-	-	-	
	h. Lainnya (Polder, Rembesan, dll)	-	-	1.465	1.489	-	
	i. Tidak Ditanami Padi	2.467	2.771	-	20	-	
	j. Sementara Tidak Diusahakan	4.108	1.492	3.777	3.542	4.710	
	1.2. Lahan Baku Bukan Sawah	29.232	26.570	27.221	27.220	26.706	



Jenis Penggunaan Lahan		Luas (Ha)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	a. Tegal/Kebun	5.524	4.411	4.238	4.238	3.946	4.714
	b. Ladang/Huma	3.120	2.220	2.539	2.538	2.438	1.825
	c. Perkebunan	4.641	6.603	6.592	6.592	6.442	5.065
	d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	2.366	1.980	6.744	6.694	6.557	
	e. Tambak	18	18	18	18	18	
	f. Kolam/Tebat/Empang	79	79	93	93	96	
	g. Penggembalaan/Padang Rumput	79	79	415	415	415	
	h. Sementara Tidak Diusahakan	11.973	9.558	3.845	3.845	3.969	5.718
	i. Lainnya (Pekarangan yang ditanami tanaman pertanian, dll)	1.061	1.269	2.737	2.787	2.825	9.415
II	Lahan Bukan Pertanian	33.815	37.141	36.558	37.018	38.365	
	2.1. Rumah, Bangunan, dan Halaman sekitarnya	26.050	27.234	24.502	24.967	25.944	39.557
	2.2. Hutan Negara	-	975	975	-	-	
	2.3. Raw a-raw a (Tidak ditanami)	357	432	365	362	297	
	2.4. Lainnya (Jalan Sungai, Danau, Lahan Tandus, dll)	7.408	8.500	10.716	11.689	12.124	
	JUM LAH	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000

Sumber:

1. Laporan Inventarisasi dan Identifikasi RTH Kota Samarinda (2013), hal IV-7 dan hal IV-8;
2. Profil Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda (BPBD, 2013), hal II-31;
3. Hasil Analisa, 2015

Komoditas unggulan pada sektor pertanian yang dikembangkan di Kota Samarinda adalah sawah irigasi, sawah tadah hujan, hortikultura (palawija), dan untuk perkebunan adalah jenis kakao dan kelapa sawit. Luasan kawasan persawahan irigasi memiliki luas keseluruhan adalah 1,074.87 Hektar sementara luasan kawasan persawahan tadah hujan adalah 1,016.79 Hektar. Persebaran potensi pengembangan wilayah di bidang pertanian di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:



Tabel 2.7
Potensi Unggulan Pertanian di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Jenis Pertanian				
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Hortikultura	Kakao	Kelapa Sawit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Samarinda Kota					
2.	Samarinda Ulu					
3.	Samarinda Ilir					
4.	Samarinda Seberang					
5.	Samarinda Utara	x			x	
6.	Palaran		x	x		x
7.	Sungai Pinang					
8.	Sungai Kunjang		x			
9.	Sambutan	x				
10.	Loa Janan Ilir		x			

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Komoditas unggulan pada sektor peternakan yang dikembangkan di Kota Samarinda adalah ternak sapi, ternak babi dan ternak unggas beserta dengan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) seluas 4,301 Hektar dan Rumah Pemotongan Hewan Babi seluas 100 Hektar yang keduanya terletak di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara seperti yang terlampir pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.8
Potensi Unggulan Peternakan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan						
		Ternak Sapi	Ternak Unggas	RPU	Ternak Babi & RPH	Pasar Hewan	Teaching Farm	Rumah Kemasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Samarinda Kota							
2.	Samarinda Ulu							



No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan						
		Ternak Sapi	Ternak Unggas	RPU	Ternak Babi & RPH	Pasar Hewan	Teaching Farm	Rumah Kemasan
3.	Samarinda Ilir							
4.	Samarinda Seberang							
5.	Samarinda Utara	x	x	x	x	x	x	x
6.	Palaran	x	x					
7.	Sungai Pinang							
8.	Sungai Kunjang							
9.	Sambutan	x	x					
10.	Loa Janan Ilir			x				

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Pengembangan sektor unggulan perikanan di Kota Samarinda diarahkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, Samarinda Utara, Palaran, Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Sambutan dan Loa Janan Ilir seperti pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Potensi Unggulan Perikanan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan				
		Tangkap	Benih Ikan	Budidaya Ikan	Pengolahan Ikan	Konservasi Sbr Daya Ikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Samarinda Kota					
2.	Samarinda Ulu				x	
3.	Samarinda Ilir					
4.	Samarinda Seberang	x				
5.	Samarinda Utara	x	x	x		x
6.	Palaran	x		x	x	x



No.	Kecamatan	Komoditas Unggulan				
		Tangkap	Benih Ikan	Budidaya Ikan	Pengolahan Ikan	Konservasi Sbr Daya Ikan
7.	Sungai Pinang		x			
8.	Sungai Kunjang				x	
9.	Sambutan	x	x	x		
10.	Loa Janan Ilir			x		

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

b. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung perekonomian dan penyerapan tenaga kerja lokal di Kota Samarinda. Dalam wilayah Kota Samarinda terdapat beberapa jenis galian yang potensial. Bahan galian yang potensial yang terdapat di wilayah Kota Samarinda diantaranya adalah bahan galian golongan A dan bahan galian golongan C. Untuk bahan galian Golongan A ini khususnya Minyak Gas (Migas) terdapat di 3 buah daerah konsensi migas yang masih aktif beroperasi yaitu:

1. Blok Sanga-Sanga PSC Extension Blok I milik VICO Indonesia, meliputi sekitar daerah bagian tengah blok tersebut.
2. Blok Semberah TAC, milik PT. Semberani Persada Oil, terdiri dari lapangan Karang Mumus, Binangat, Palaran dan Sambutan.
3. Blok Sanga-sanga Field TAC, milik PT. Exspan Nusantara, meliputi sebagian daerah Blok Anggana, Muara Tanjung Una dan Louise.

Sementara untuk Tambang batu bara di wilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir di semua Kecamatan yang ada di Kota Samarinda, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sambutan, Loa Janan Ilir dan Sungai Pinang Dalam.



2.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (BNPB, 2011) Kota Samarinda menempati peringkat 1 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 94 dan termasuk kelas kerawanan tinggi, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota
Se- Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan	Rangking Provinsi	Rangking Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Samarinda	94	Tinggi	1	39
Balikpapan	89	Tinggi	2	56
Kutai Kartanegara	65	Tinggi	3	175
Pasir	57	Tinggi	4	232
Tarakan	57	Tinggi	5	235
Kutai Barat	51	Tinggi	6	285
Kutai Timur	47	Tinggi	7	308
Nunukan	44	Tinggi	8	345
Bontang	34	Sedang	9	402
Penajam Paser Utara	33	Sedang	10	409
Malinau	29	Sedang	11	424
Berau	24	Sedang	12	433
Bulungan	24	Sedang	13	434
Tana Tidung	5	Rendah	14	475

Sumber: Profil Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana (BNPB), 2013

Dari **Gambar 2.5** dapat dilihat bahwa terdapat banyak kecenderungan kejadian bencana di Kota Samarinda dalam rentang waktu 2000 – 2011 yaitu:

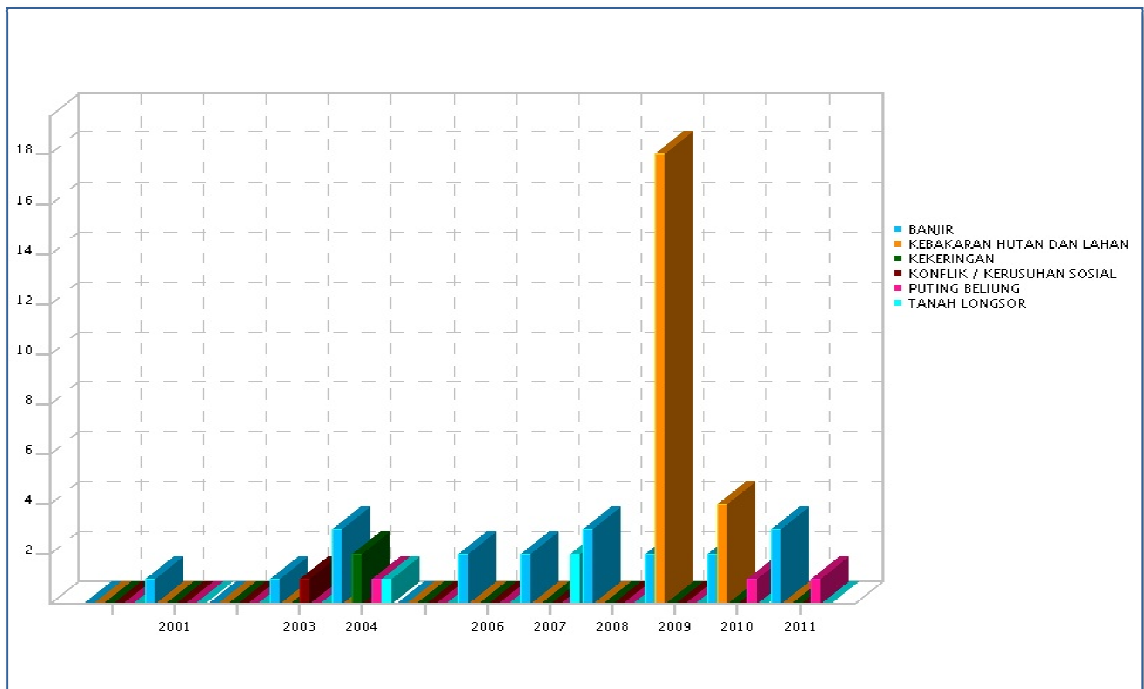
1. Bencana banjir terlihat cenderung meningkat.
2. Bencana kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat.
3. Bencana cuaca ekstrem (puting beliung) cenderung tetap.



- 4. Bencana kekeringan cenderung tetap.
- 5. Bencana tanah longsor dan konflik sosial cenderung tetap.

Secara keseluruhan kejadian bencana banjir merupakan bencana dengan frekuensi dan dampak tertinggi di Kota Samarinda dan cenderung untuk mengalami peningkatan hingga tahun 2011.

Gambar 2.5
Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Samarinda Tahun 2000-2011



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2014-2018 Kota Samarinda

Tingkat risiko bencana Kota Samarinda didapat dari hasil penggabungan tingkat ancaman, tingkat kerugian serta tingkat kapasitas untuk setiap jenis bencana di Kota Samarinda. Kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Samarinda seperti yang terlihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.11
Tingkat Risiko Bencana di Kota Samarinda

NO	NAM A BENCANA	TINGKAT RISIKO
(1)	(2)	(3)
1	Banjir	Tinggi
2	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi
3	Kekeringan	Tinggi





NO	NAMA BENCANA	TINGKAT RISIKO
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi

Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2014-2018 Kota Samarinda

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, Kawasan rawan bencana alam di Kota Samarinda hanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rawan banjir dan rawan longsor. Kedua jenis rawan bencana alam ini, berdasarkan kajian risiko bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Samarinda, memperoleh tingkat resiko 'tinggi'. Pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan yang telah memicu urbanisasi memberikan dampak pada ancaman bencana banjir di Kota Samarinda. Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan sehingga dataran banjir yang sebenarnya rawan terhadap genangan dan banjir terpaksa digunakan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Selain faktor perumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kota, banjir di Kota Samarinda diakibatkan juga oleh faktor alam yaitu intensitas hujan tinggi, topografi wilayah relatif datar, pasang Sungai Mahakam, dll. Adapun kawasan rawan banjir di Kota Samarinda adalah Kelurahan Sempaja, Kelurahan Lempake, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Loa Bahu, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bentuas, Kelurahan Karang Asam, dan Kelurahan Gunung Kelua. Untuk itu diperlukan ruang evakuasi bencanabanjir yaitu 1. Perumahan Bukit Alaya Kecamatan Sungai Pinang; 2. GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu; 3. Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir; 4. Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara; 5. Balai Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Kota; 6. Islamic Centre Kecamatan Sungai Kunjang; 7. Gedung SMA Negeri 11 Kecamatan Sambutan; 8. Lapangan KNPI kecamatan Samarinda Seberang. Sementara Kawasan rawan longsor di Kota Samarinda meliputi Kelurahan Selili dan Kelurahan Sidodadi. Ruang evakuasi bencana longsor yaitu di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir dan GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu.



Permasalahan banjir di Kota Samarinda sudah memiliki dampak negatif yang menyebar di berbagai bidang mulai dari perhubungan hingga perekonomian makro daerah. Hal ini menjadikan fenomena banjir di Kota Samarinda merupakan isu strategis yang harus diantisipasi dan ditangani ke depannya sebagai bentuk dukungan utama dalam pencapaian target pembangunan.

Infrastruktur dan sanitasi wilayah perkotaan menjadi “kambing hitam” utama dalam daftar penyebab terjadinya bencana banjir. Penataan Kota Samarinda yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah menyebabkan fungsi-fungsi penyerapan air berkurang, sanitasi lingkungan, permasalahan sampah, hingga pendangkalan sungai. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir disamping beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi, geografis Kota Samarinda yang berada di hilir, maupun letak wilayah yang berada di tepian Sungai Mahakam.

Bencana banjir di Kota Samarinda merupakan bencana terstruktur yang harus segera diantisipasi dengan pembenahan secara masif dan konsisten. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda telah membuat sebuah skenario master plan penanganan bencana banjir dari tahun 2016 hingga tahun 2035 yang diperkirakan menelan dana hingga mencapai 5,26 trilyun dalam jangka waktu 20 tahun. Kegiatan dalam master plan tersebut adalah pembuatan atau perbaikan saluran sanitasi lingkungan, pembuatan kolam retensi, pengadaan pompa, pengadaan alat penangkap lumpur, serta penanganan-penanganan khusus bencana banjir.

Di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak pernah mengalami bencana banjir seperti yang terlihat pada Tabel 2.12. Titik bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing sebanyak 7 titik banjir. Pada tahun 2005, setiap titik banjir tersebut hanya mengalami 6-10 kali bencana banjir dalam setahun, tetapi pada masa sekarang hampir setiap kondisi hujan mengalami bencana banjir. Melihat keadaan seperti itu bukan hal yang aneh jika urgensi penanganan banjir di Kota Samarinda menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah periode saat ini.



Tabel 2.12

Perencanaan Antisipasi dan Penanganan Banjir di Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Panjang Saluran (Km)	Kolam Retensi	Jumlah Pompa	Jumlah Penangkap Lumpur
1	Palaran	9	57,25	4	8	124
2	Samarinda Ilir	7	34,35	7	8	95
3	Samarinda Kota	4	18,00	-	2	51
4	Sambutan	-	-	-	-	-
5	Samarinda Seberang	6	29,70	3	5	84
6	Loa Janan Ilir	4	25,50	2	4	51
7	Sungai Kunjang	5	34,25	4	4	63
8	Samarinda Ulu	4	34,25	3	6	66
9	Samarinda Utara	7	33,75	4	9	87
10	Sungai Pinang	4	19,50	4	8	58
Total		50	286,55	31	54	679

Sumber: Skenario Masterplan Banjir Kota Samarinda Tahun 2016-2035

Dalam menangani banjir di Kota Samarinda sebagai bagian dari *masterplan* perencanaan penanganan bencana banjir, setidaknya terdapat empat kegiatan yang akan ditempuh ditambah dengan penanganan khusus terhadap beberapa wilayah. Program dan kegiatan pertama dalam menangani permasalahan banjir di Kota Samarinda adalah dengan meningkatkan panjang saluran air sekaligus mengefisienkan sanitas lingkungan. Peningkatan saluran air ini merupakan pembuatan saluran baru atau memperbaiki saluran lama yang telah rusak dengan total saluran sepanjang 286,55 Km di seluruh Kota Samarinda. Sebagian besar peningkatan saluran air berada di Kecamatan Palaran sepanjang 57,25 Km dan paling pendek pembuatan saluran berada di Kecamatan Samarinda Kota sepanjang 18,00 Km.

Kegiatan penanganan bencana banjir kedua adalah pembuatan kolam retensi di beberapa kelurahan. Kolam retensi merupakan kolam yang berfungsi menggantikan peran lahan resapan air yang dijadikan lahan perumahan, perkantoran, maupun lahan tertutup lainnya. Fungsi kolam mini adalah menampung air hujan langsung dan aliran dari sistem untuk diresapkan ke dalam tanah. Dalam



kurun waktu 20 tahun, di Kota Samarinda akan dibangun 31 kolam retensi sebagai antisipasi/pencegahan terjadinya bencana banjir di Kota Samarinda yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan.

Pengadaan pompa dan penangkap lumpur merupakan dua kegiatan selanjutnya dalam master plan penanganan bencana banjir dimana dalam kurun waktu 20 tahun akan diadakan 54 unit pompa untuk memompa air sebagai salah satu alat penanganan banjir dan 679 unit penangkap lumpur untuk menangkap lumpur sebagai ikutan dampak terjadinya bencana banjir.

Selain keempat kegiatan tersebut di atas, terdapat pula penanganan khusus seperti pembuatan parapet (dinding beton) di Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Karang Asam, Kelurahan Sungai Keledang, Sungai Karang Mumus, Bendungan Lempake, dan Sungai Mahakam. Total panjang parapet yang akan dibangun dalam kurun waktu 20 tahun ini sepanjang 46,5 Km. Sedangkan penanganan khusus selanjutnya dalam master plan adalah dilakukannya normalisasi bendungan lempake sebanyak 200.000 m³.

2.1.8. Demografi

Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kota Samarinda, memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan, kedua sektor tersebut memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda yang mencapai 28,92 persen tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta 22,84 persen tenaga kerja di sektor jasa-jasa. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 830.676 jiwa dengan kepadatan mencapai 1.157 jiwa/km².

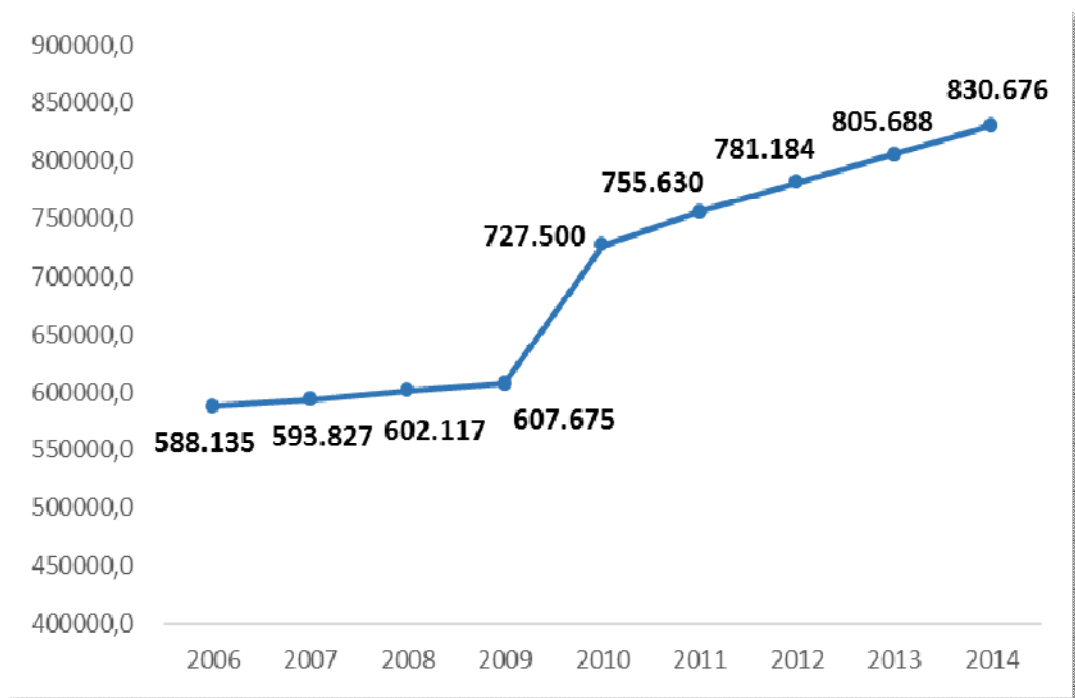
Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari rekapitulasi jumlah penduduk pada tahun 2006-2014, tercatat pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar



19,72 persen dari tahun 2009 yang ketika itu masih sebesar 607.675 jiwa menjadi 727.500 jiwa seperti yang terlihat pada Gambar 2.6.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun ini menandakan Kota Samarinda memiliki banyak daya tarik bagi para penduduk di luar daerah, khususnya daya tarik bagi investasi maupun peluang sektor perdagangan. Kondisi ini pula semakin mengukuhkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa.

Gambar 2.6
Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 2006-2014

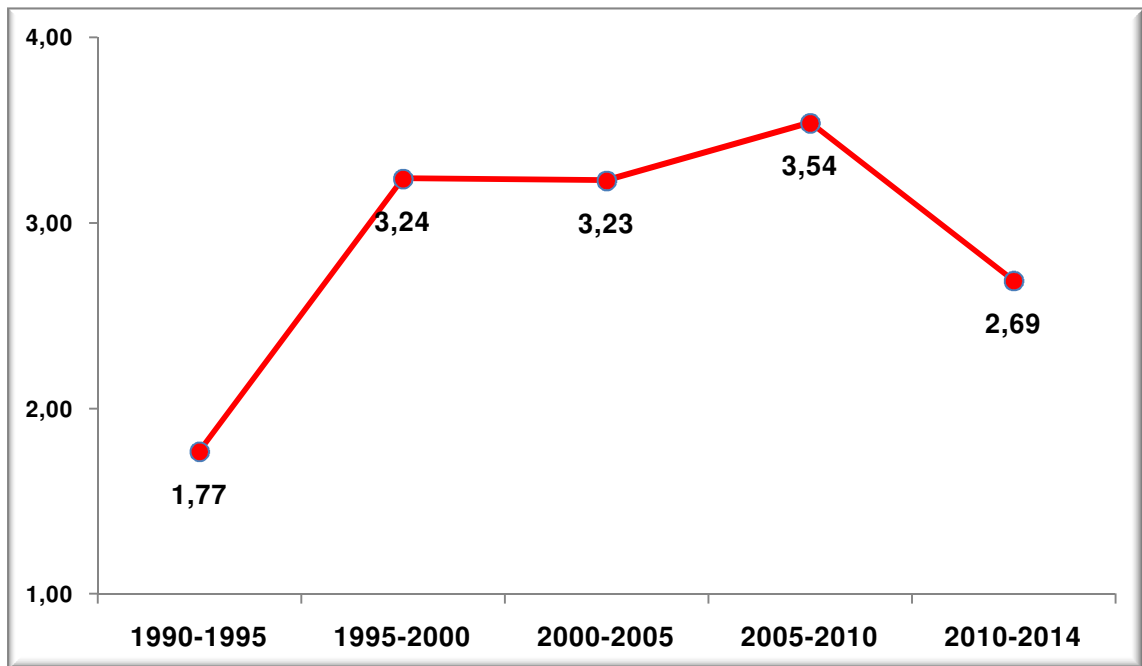


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Sedangkan secara khusus, angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2010 terjadi sebagai koreksi berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Bahkan tercatat di tahun 2013 ada 1 wilayah kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang disebabkan karena adanya perpindahan penduduk antar wilayah dalam kota dan luar kota.



Gambar 2.7
Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Tabel 2.13
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Samarinda Tahun 2013

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Palaran	221,31	54.353	4,35	246
Samarinda Ilir	17,18	73.383	9,32	4.271
Samarinda kota	11,12	36.604	10,33	3.292
Sambutan	100,95	48.342	-4,71	479
Samarinda seberang	12,49	63.716	2,27	5.101
Loa janan ilir	26,13	62.740	3,16	2.401
Sungai kunjang	43,04	126.302	2,49	2.935
Samarinda ulu	22,12	134.659	7,27	6.088
Sungai pinang	229,52	105.695	-4,22	461
Samarinda utara	34,16	99.894	3,74	2.924
Kota Samarinda	718,02	805.688	3,14	1.122

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2014



Komposisi penduduk Kota Samarinda masih didominasi oleh laki-laki dimana terlihat pada rasio jenis kelamin di Kota Samarinda yang mencapai 107,27. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki. Berikut rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kota Samarinda di tabel 2.14.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Per Kecamatan di Kota Samarinda, Tahun 2009-2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Palaran	28271	26082	54353	108,39
2	Samarinda Ilir	37942	35441	73383	107,06
3	Samarinda Kota	18930	17674	36604	107,1
4	Sambutan	25017	23325	48342	107,47
5	Samarinda Seberang	33005	30711	63716	106,06
6	Loa Janan Ilir	32293	30447	62740	106,59
7	Sungai Kunjang	65164	61138	126302	106,91
8	Samarinda Ulu	69578	65081	134659	106,82
9	Sungai Pinang	54591	51104	105695	109,38
10	Samarinda Utara	52184	47710	99894	107,27
2013		416975	388713	805688	107,27
2012		404235	376949	781184	107,24
2011		392464	363166	755630	108,07
2010		377283	350217	727500	107,73
2009		316245	291430	607675	108,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2014



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan memberikan gambaran mengenai potret kehidupan masyarakat Kota Samarinda maupun analisis dan kajian terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi akan mengkaji berbagai indikator yang berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian Kota Samarinda terkait dengan pemberdayaan kehidupan masyarakat. Indikator yang umum dipakai untuk mengkaji perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat perkembangan perekonomian secara makro, laju inflasi untuk melihat pemerataan dan stabilitas harga barang-barang pokok masyarakat (perekonomian mikro), serta tingkat kemiskinan untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

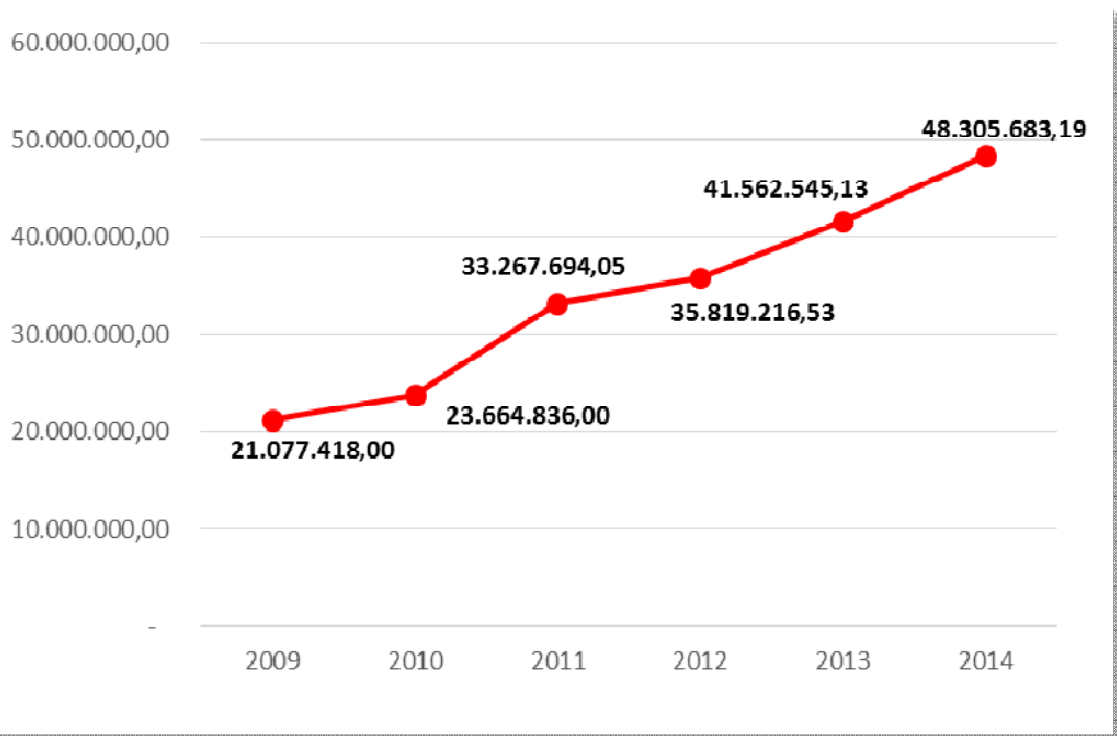
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi Kota Samarinda baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Setiap nilai tambah produksi yang dihasilkan oleh “roda perekonomian” Kota Samarinda akan tercatat dalam PDRB sehingga indikator ini memiliki cakupan makro.

PDRB Kota Samarinda memiliki pergerakan positif di setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian Kota Samarinda mengalami kenaikan dimana pada tahun 2014, nilai PDRB mencapai 48.305.683,19 juta rupiah.



Gambar 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Juta Rupiah)
Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2014

Jika dilihat dari kontribusi atau distribusinya, peranan terbesar dalam pembentukan nilai PDRB Kota Samarinda adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang pada tahun 2014 mencapai 41,20 persen. Angka tersebut sangat tinggi dan dominan sehingga dapat dikatakan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan dalam perkembangan perekonomian di Kota Samarinda. Bahkan kontribusi sektor tersebut juga mengalami kenaikan dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Lain halnya dengan sektor dominan lainnya yakni sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, meskipun masih cukup mendominasi peranannya dalam membentuk perekonomian Kota Samarinda yakni sebesar 12,97 persen.



Tabel 2.15

**Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas
Menurut Sektor Lapangan Usaha Kota Samarinda, Tahun 2009 s.d 2014**

No.	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013		2014*	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian	449.828,67	2,13	506.358,13	2,14	502.584,72	1,51	518.473,84	1,45	644.560,99	1,55	674.533,60	1,40
2	Pertambangan & Penggalian	1.578.011,03	7,49	2.019.960,44	8,54	6.960.730,63	20,92	5.287.722,21	14,76	5.016.924,12	12,07	5.091.950,36	10,54
3	Industri Pengolahan	4.209.562,62	19,97	4.636.511,64	19,59	4.859.418,77	14,61	5.111.545,97	14,27	5.796.137,91	13,95	6.262.850,76	12,97
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	257.408,64	1,22	274.286,96	1,16	306.709,63	0,92	355.527,90	0,99	386.500,97	0,93	414.454,67	0,86
5	Konstruksi	1.118.885,84	5,31	1.242.098,57	5,25	1.347.661,45	4,05	1.535.525,46	4,29	1.839.089,74	4,42	2.282.459,42	4,73
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	6.164.727,26	29,25	6.944.751,12	29,35	10.241.708,90	30,79	12.782.867,99	35,69	15.928.660,50	38,32	19.900.422,86	41,20
7	Pengangkutan & Komunikasi	2.134.109,12	10,13	2.288.549,24	9,67	2.479.356,92	7,45	2.573.441,03	7,18	2.984.912,63	7,18	3.277.137,27	6,78
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perush.	2.656.181,70	12,60	2.932.165,12	12,39	3.438.977,01	10,34	4.135.627,24	11,55	4.841.167,34	11,65	5.575.584,30	11,54
9	Jasa-jasa	2.508.703,15	11,90	2.820.154,43	11,92	3.130.546,01	9,41	3.518.484,88	9,82	4.124.590,93	9,92	4.826.289,95	9,99
PDRB		21.077.418,03	100,00	23.664.835,66	100,00	33.267.694,05	100,00	35.819.216,53	100,00	41.562.545,13	100,00	48.305.683,19	100,00



Tabel 2.16
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Juta Rupiah)
Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Timur, 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	PDRB				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paser	9.972.212	13.207.170	16.516.742	17.653.569	18.952.743
2	Kutai Barat + Mahakam Ulu	5.899.931	6.831.573	8.083.976	8.946.886	9.830.904
3	Kutai Kartanegara	90.100.482	100.465.050	125.676.272	133.944.716	133.002.681
4	Kutai Timur	28.627.177	34.247.873	45.748.620	50.184.448	54.584.880
5	Berau	6.983.756	8.079.229	9.607.427	11.187.561	12.817.247
6	Penajam Paser Utara	2.577.863	2.923.171	3.845.144	4.106.817	4.735.554
7	Balikpapan	36.521.932	41.108.129	45.176.739	47.282.323	52.668.717
8	Samarinda	21.077.418	23.664.836	33.267.694	35.819.217	41.562.545
9	Bontang	52.664.325	53.366.144	62.051.947	68.481.634	69.416.637

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2014

Jika dilihat perbandingan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, PDRB Kota Samarinda menduduki peringkat ke lima setelah Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, dan Balikpapan. Hal ini dikarenakan keempat kabupaten/kota tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah terutamanya minyak, gas, maupun batubara yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

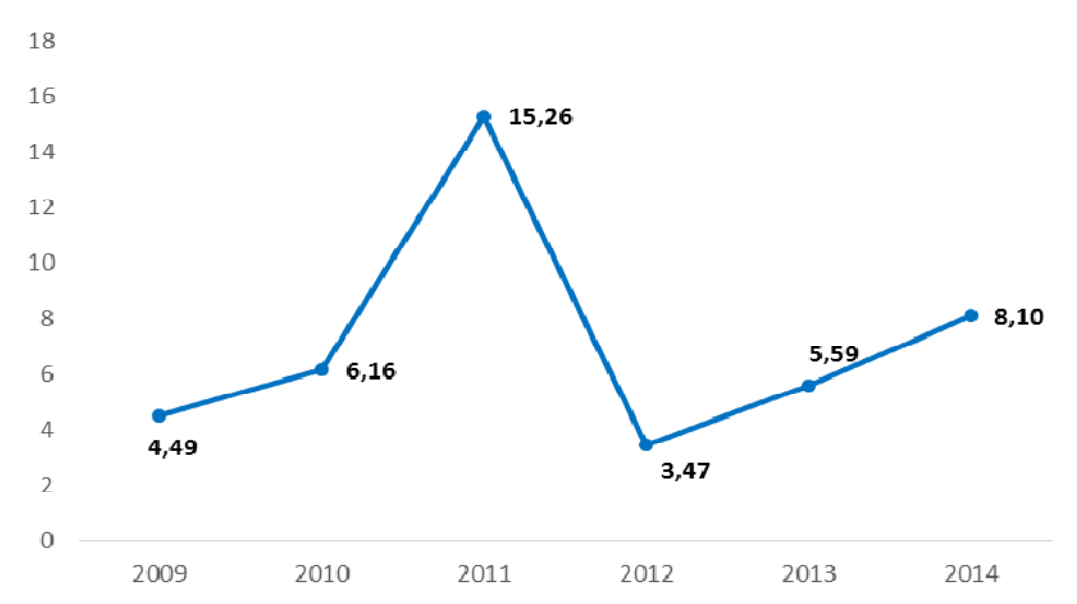
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan indikator utama dalam melihat perkembangan perekonomian secara series sebagai pembanding antara nilai absolut perekonomian (PDRB atas dasar harga berlaku) dan distribusi nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah potret pembangunan perekonomian suatu daerah dengan membandingkan perencanaan pembangunan perekonomian antar waktu. Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai proses kenaikan *output* (tergantung dari jenis *output* yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang.



Sebagai ibukota provinsi yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi maupun Kota Samarinda sendiri, pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda menjadi sebuah tolak ukur bagi perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjadi barometer pembangunan provinsi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda berjalan cukup fluktuatif dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki *range* pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Peningkatan signifikan pertumbuhan perekonomian terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 15,26 persen dimana tahun sebelumnya hanya sebesar 6,16 persen. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2012, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 3,47 persen. Pada tahun-tahun setelahnya, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi kembali hingga pada tahun terakhir Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,10 persen yang jauh melebihi angka pertumbuhan ekonomi level provinsi maupun nasional.

Gambar 2.9

Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

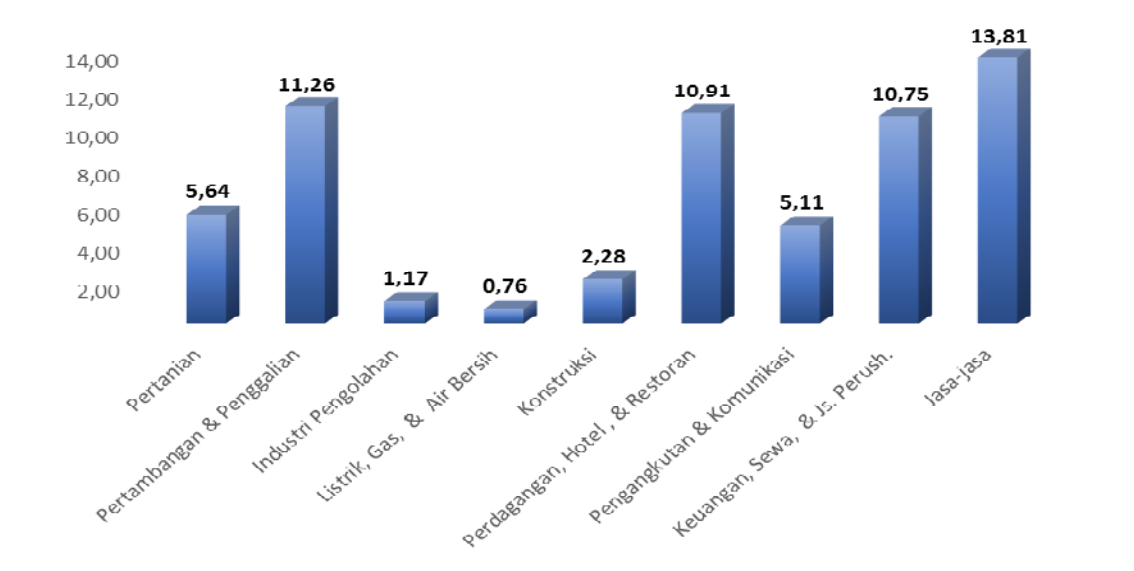
Jika dijabarkan berdasarkan sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sektoral terbesar berada pada sektor jasa-jasa (13,81 persen). Sedangkan pada sektor dominan PDRB yakni sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi yakni mencapai 10,91 persen. Selain itu, sektor lain yang cukup tinggi



pertumbuhannya dan menjadi sorotan karena perannya dalam menciptakan degradasi lingkungan adalah Sektor Pertambangan dan Pengalihan dimana meskipun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi pertumbuhan ekonomi sektoralnya masih mampu menembus angka 11,26 persen pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi paling kecil dialami pada sektor listrik, gas dan air bersih (0,76 persen), industri pengolahan (1,17 persen), dan konstruksi (2,28persen) yang memiliki pertumbuhan ekonomi jauh di bawah 5 persen.

Gambar 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kota Samarinda, 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

3. Laju Inflasi

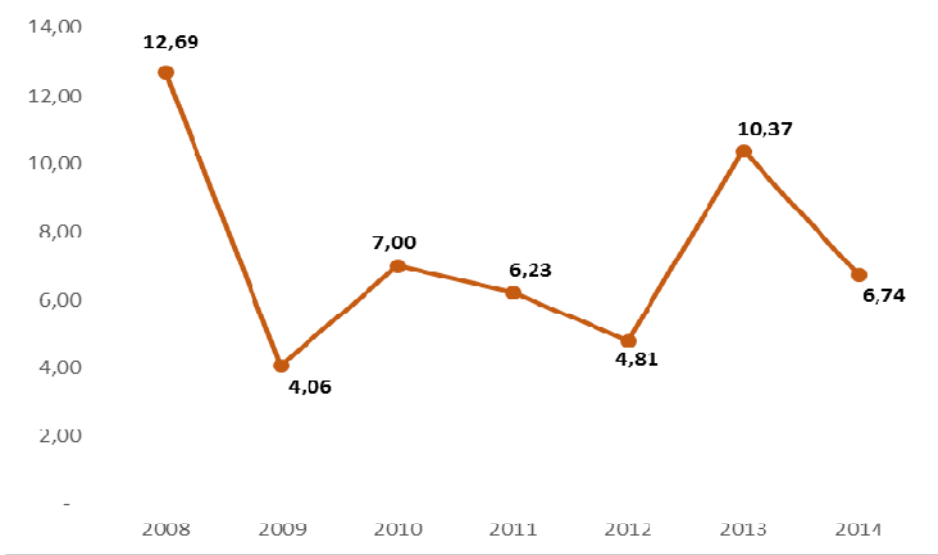
Dalam menganalisis pembangunan perekonomian di Kota Samarinda, tidak terlepas dari asumsi mikro terkait stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat terutama bahan pokok. Faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan karena fluktuasi harga terutama di perkotaan sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di hasilkan sekaligus berdampak pada daya beli masyarakat.

Laju inflasi sangat penting dalam mengkaji gambaran perekonomian Kota Samarinda terutama dalam melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dan mikro dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki laju inflasi yang sangat fluktuatif yang mengindikasikan terjadinya



gejolak harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014, laju inflasi Kota Samarinda mencapai 6,74 persen dimana pada tahun sebelumnya lebih tinggi yakni mencapai 10,37 persen.

Gambar 2.11
Laju Inflasi Kota Samarinda, 2008-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Penyebab laju inflasi tahun 2014 di Kota Samarinda tertinggi adalah Kelompok Transportasi dan Komunikasi; selanjutnya Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; serta Kelompok Perumahan. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.17
Perkembangan Inflasi Tahun Kalender
Kota Samarinda, 2014

Kelompok	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Bahan Makanan	6,50	6,60	2,01	4,47
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	10,01	9,17	2,90	7,26
Perumahan	9,96	8,03	4,06	7,17
Sandang	2,88	3,77	1,84	3,20
Kesehatan	9,41	10,54	10,18	4,56
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	9,85	7,50	4,09	3,87
Transport dan Komunikasi	9,91	7,79	0,48	11,06
Umum	8,81	7,78	3,02	6,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2014



4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikasi awal dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro dimana penghitungan dilakukan dengan membagi seluruh nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk di suatu wilayah, dalam hal ini jumlah penduduk Kota Samarinda. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa PDRB per kapita Kota Samarinda selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan mencapai Rp.58.152.255,- per tahun pada tahun 2014. Angka ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda secara makro setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.18
PDRB Per Kapita Kota Samarinda, Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Rp. Juta)	23.664.835,66	33.267.694,05	35.819.216,53	41.562.545,13	48.305.683,19
Jumlah Penduduk (jiwa)	727.500	755.630	781.184	805.688	830.676
PDRB per kapita (Rp/jiwa)	32.528.983,73	44.026.433,64	45.852.470,78	51.586.402,09	58.152.255,74

* Angka sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

5. Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia telah membantu menekan angka kemiskinan hingga turun ke angka 11,3 persen pada tahun 2014 padahal sebelumnya pada tahun 1999 mencapai 24 persen secara nasional. Tapi kemudian kecepatan penurunan kemiskinan berkurang karena tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0,7 persen dalam dua tahun terakhir adalah yang terkecil sepanjang satu dekade terakhir.

Meskipun Indonesia telah menjadi bagian dari 20 besar ekonomi dunia, seperempat penduduknya masih sangat rentan untuk kembali miskin. Sekitar 68 juta penduduk Indonesia hidup dengan tidak jauh dari batas Rp 11.000 per hari. Hal tersebut menyebabkan kerentanan kemiskinan yang tinggi karena dengan sedikit sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, maka mereka bisa langsung jatuh di bawah garis kemiskinan.



Dari data 2010, separuh dari mereka yang miskin bukan termasuk orang miskin setahun sebelumnya. Seperempat populasi Indonesia jatuh miskin setidaknya sekali dalam tiga tahun. Situasi menjadi lebih sulit lagi ketika keluarga yang miskin menghabiskan uang sangat sedikit untuk kesehatan dan pendidikan (rata-rata cuma 5 persen). Akhirnya anak-anak yang dihasilkan pun tidak terdidik dan tidak sehat; mereka terancam mewarisi lagi kemiskinan yang sama ke generasi berikutnya.

Ketimpangan konsumsi rumah tangga Indonesia pun telah meningkat sejak tahun 2000. Koefisien Gini, ukuran dari ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada tahun 2000 menjadi kira-kira 0,41 pada tahun 2013. Kesenjangan antar wilayah pun tidak berkurang. Wilayah timur Indonesia tertinggal di belakang wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama Jawa. Tak heran bila angka ketimpangan konsumsi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur, walau Indonesia mencatat kemajuan yang baik dari sisi pengentasan kemiskinan. Adapun yang dikatakan Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan dirasakan juga oleh Kota Samarinda dengan digulirkannya berbagai program secara nasional. Mari kita cermati penurunan angka kemiskinan dari tahun 2010 mencapai 5,21 persen (38.000 Rumah tangga sasaran (RTS)) menjadi 4,31 persen (32.900 RTS) pada tahun 2011 dan mengalami penurunan sekitar 0,9 persen, kemudian di tahun 2012 mencapai 4,18 persen (32.800 RTS). Namun dengan semakin tingginya garis kemiskinan yang mencapai 460.975, berdampak signifikan pada kenaikan angka kemiskinan sekitar 0,45 persen menjadi 4,63 persen. Meskipun sesungguhnya kenaikan angka ini didorong oleh banyaknya migran yang tidak memiliki ketrampilan serta pengendalian administrasi kependudukan yang belum maksimal.

Tabel 2.19
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin,
serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kota Samarinda, 2008-2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	249.006	306.730	337.162	381.614	419.353	460.975
Jumlah penduduk miskin	27.650	28.970	38.000	32.900	32.800	36.600



Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(jiwa)						
Persentase penduduk miskin	4,67	4,84	5,21	4,31	4,18	4,63
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	95,33	95,16	94,79	95,69	95,82	95,37

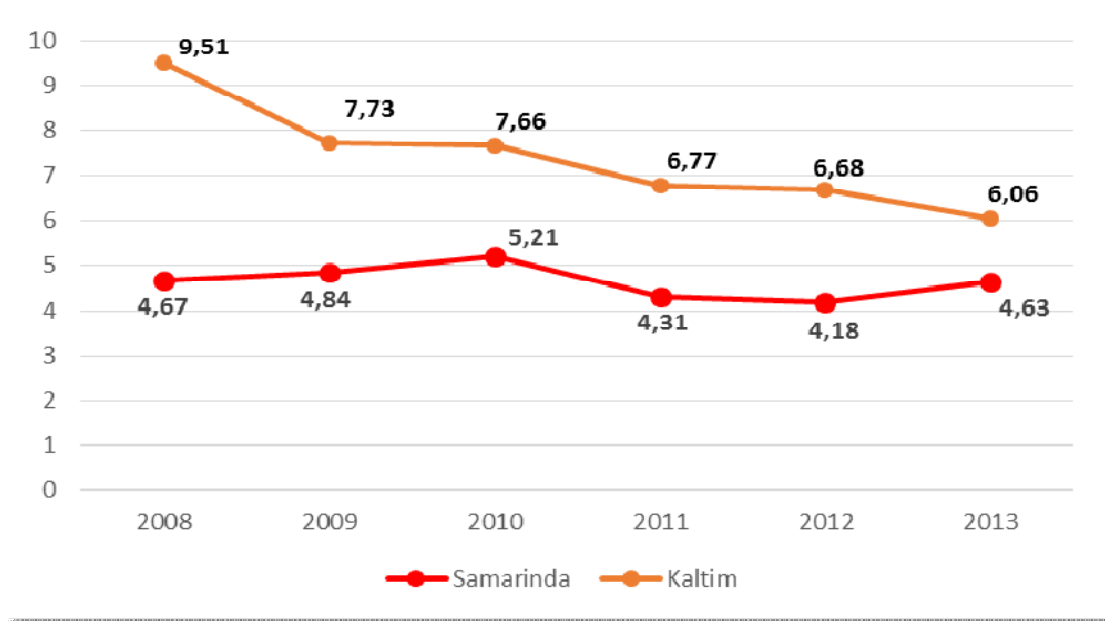
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Diharapkan kedepannya, kemiskinan di Kota Samarinda dapat diminimalisasi dengan catatan kualitas kesejahteraan masyarakatpun juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak berada pada posisi rentan miskin.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, dalam kurun waktu enam tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Samarinda masih berada di bawah angka Kalimantan Timur. Meskipun begitu, pada tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan demi penurunan di setiap tahunnya hingga mulai mendekati angka kemiskinan Kota Samarinda. Sedangkan tingkat kemiskinan Kota Samarinda sendiri jika dibandingkan dengan angka provinsi cenderung memiliki pola tetap/stagnan.



Gambar 2.12
Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim, 2015

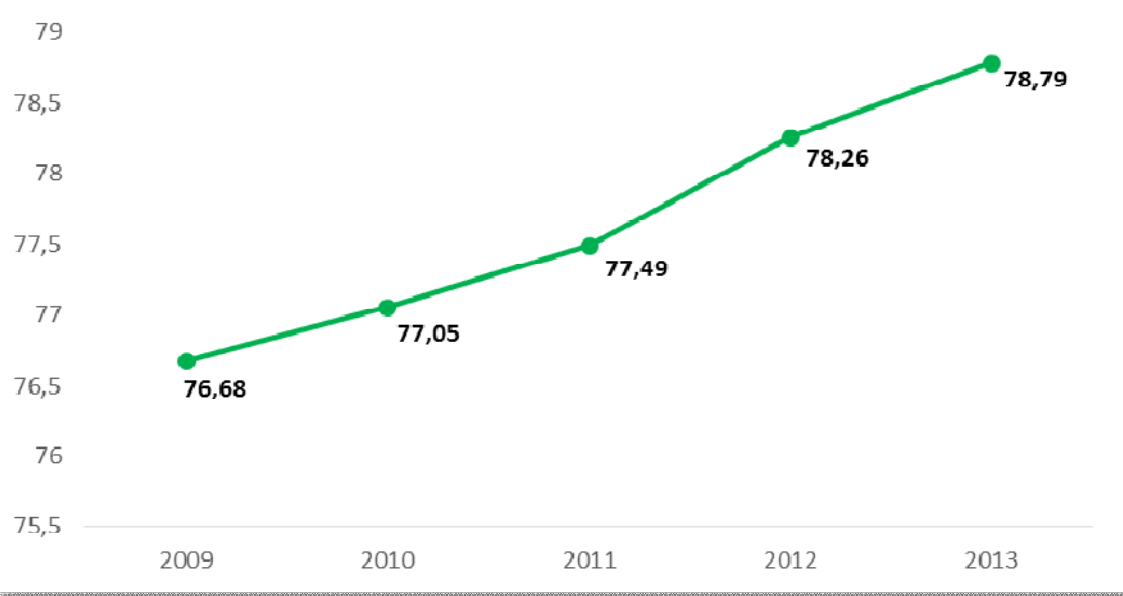
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial pada dokumen perencanaan pembangunan daerah akan memberikan gambaran terkait kesejahteraan kehidupan masyarakat di suatu wilayah (dalam hal ini Kota Samarinda). Indikator *ultimate impact* kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indeks komposit dari Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berkecakupan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya.



Gambar 2.13
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda, 2009-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008-2013

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Paser	73,46	73,99	74,66	75,40	75,85	76,56
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	72,16	72,60	72,90	73,69	74,05	74,61
3. Kutai Kartanegara	72,03	72,50	72,89	73,51	74,24	74,80
4. Kutai Timur	70,84	71,23	72,05	72,88	73,75	74,23
5. Berau	72,75	73,22	73,84	74,63	75,05	75,83
6. PPU	72,69	73,11	73,59	74,03	74,35	74,82
7. Balikpapan	77,31	77,86	78,33	78,85	79,38	79,87
8. Samarinda	76,12	76,68	77,05	77,63	78,26	78,79
9. Bontang	76,08	76,52	76,88	77,52	77,85	78,40
Provinsi Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	74,52	75,11	75,56	76,22	76,71	77,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015



Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda mengalami peningkatan progresif dari tahun ke tahun hingga mencapai indeks sebesar 78,79 pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, IPM Kota Samarinda menduduki peringkat kedua setelah IPM Kota Balikpapan yang mencapai indeks 79,87 pada tahun yang sama.

1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Melek aksara atau Melek huruf juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Banyak analis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah dan murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.



Tabel 2.21

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2014 Kota Samarinda

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	428.480	510.714	530.449	551.185	577.756	599.569*
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	437.626	521.084	541.164	559.238	585.841	603.897
3	Angka Melek Huruf	97,91	98,01	98,02	98,56	98,62	99,28
4	Angka Buta Huruf	2,09	1,99	1,98	1,44	1,38	0,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi telah menunjukkan perkembangan pembangunan manusia yang sangat luar biasa. Dengan memperhatikan Tabel 2.17 diatas teridentifikasi bahwa Kota Samarinda dari tahun ketahun mengalami peningkatan angka melek huruf dan berada diatas rata-rata Angka Melek Huruf Provinsi dan Nasional yaitu mencapai 98,62 persen, sementara data tahun 2013 menunjukkan untuk tingkat Nasional mencapai 94,10 persendan capaian Provinsi Kaltim 97,95 persen.



Tabel 2.22
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	95,41	96,00	96,70	96,71	97,13
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	95,97	95,97	96,60	96,61	97,12
3. Kutai Kartanegara	96,87	96,87	97,31	98,33	98,34
4. Kutai Timur	95,89	97,28	98,25	99,29	99,32
5. Berau	96,30	97,18	97,20	97,26	97,85
6. PPU	94,93	95,55	95,57	95,77	95,81
7. Balikpapan	98,37	98,76	98,78	98,86	98,99
8. Samarinda	97,91	98,01	98,02	98,56	98,62
9. Bontang	99,08	99,20	99,21	99,22	99,25
Provinsi Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	96,89	97,05	97,21	97,55	97,95

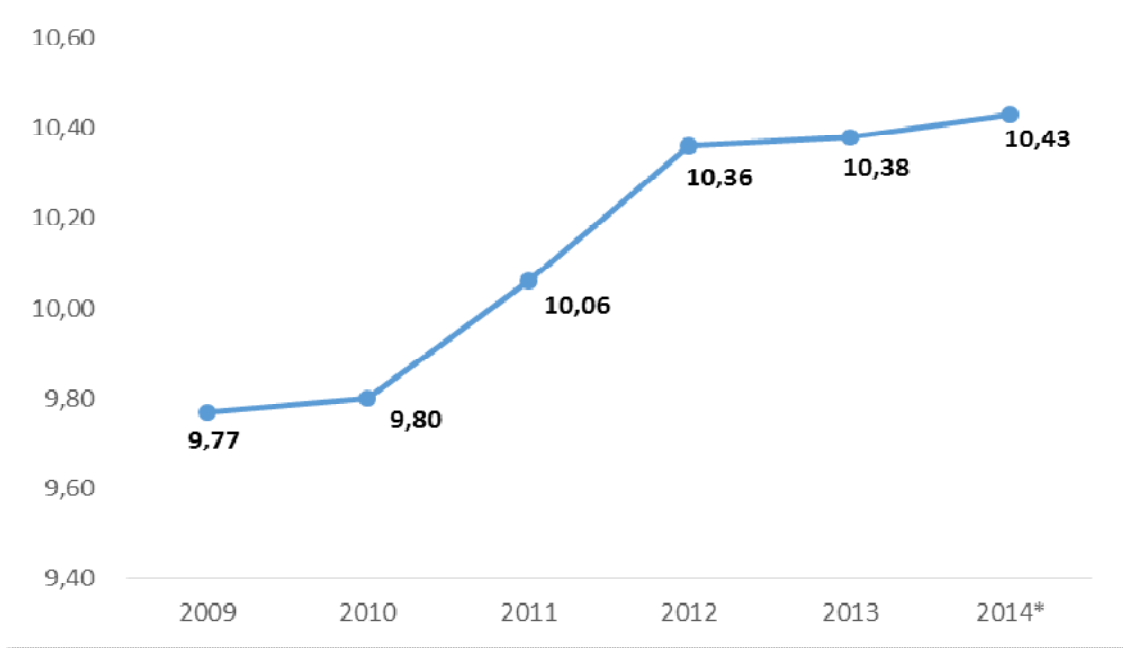
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

b. Angka rata-rata Lama Sekolah

Sesungguhnya Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lamasekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.



Gambar 2.14
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pencapaian sangat signifikan dialami pada angka rata-rata lama sekolah Kota Samarinda dimana hingga pada tahun 2013 mencapai 10,38 dan angka sementara untuk tahun 2014 mencapai 10,43 persen yang mengindikasikan bahwa Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun Pemerintah Kota Samarinda telah terlampaui dan menuju sasaran Wajar 12 tahun. Diharapkan kedepan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bermakna memperkecil angka pengangguran dan tentunya menumbuhkan peningkatan pendapatan pada masyarakat.

Tabel 2.23
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 –2013 (Tahun)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	7,75	7,85	8,08	8,10	8,35
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	7,86	7,80	8,20	8,21	8,43
3. Kutai Kartanegara	8,38	8,33	8,70	8,76	8,89
4. Kutai Timur	7,65	7,86	8,08	8,47	8,63



Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Berau	8,03	8,13	8,58	8,62	8,82
6. PPU	7,58	7,66	7,68	7,71	7,82
7. Balikpapan	10,08	10,08	10,26	10,46	10,49
8. Samarinda	9,77	9,80	9,93	10,36	10,38
9. Bontang	10,07	10,04	10,11	10,40	10,45
Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	8,85	8,87	9,19	9,22	9,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

2. Kesehatan

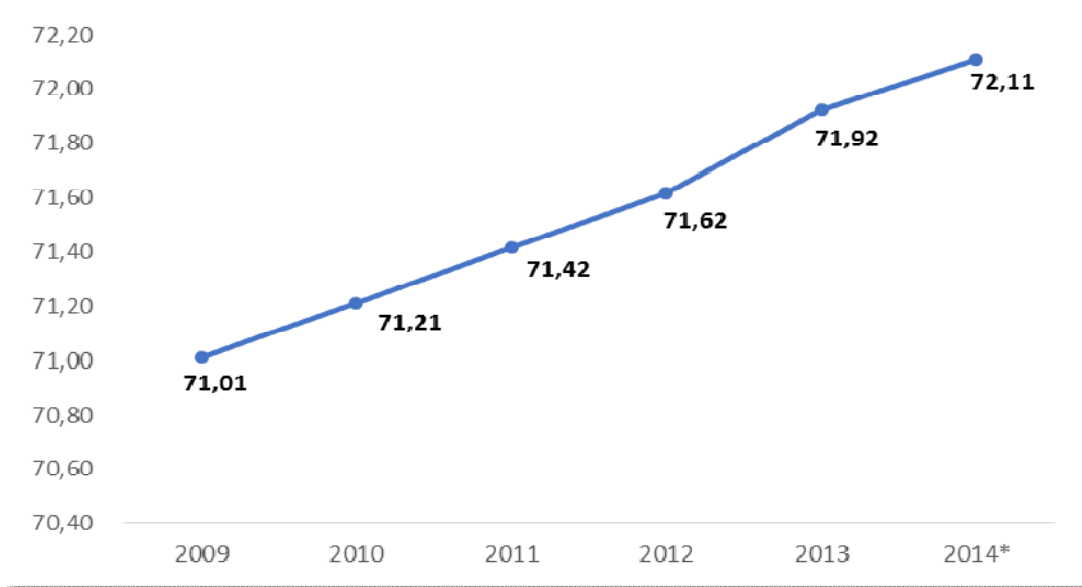
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Menurut *Statistics Indonesia*, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun Kota Samarinda semakin baik yaitu pada tahun 2012 mencapai usia 71,62 tahun meningkat pada tahun 2013 menjadi 71,92 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Samarinda dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar kesehatan sudah menyentuh pada sasaran yang lebih baik. Dampak dari meningkatnya derajat kesehatan serta pendidikan yang baik pada masyarakat ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda. Prediksi angka harapan hidup pada tahun 2014 mencapai usia 72,11



tahun, oleh karenanya dengan pencapaian ini tentunya diharapkan kesejahteraan masyarakat akan semakin baik diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Gambar 2.15
Angka Harapan Hidup Dari Tahun 2010-2014 Kota Samarinda



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

3. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itulah, masyarakat perlu mendapatkan pekerjaan sebagai sarana mendapatkan penghasilan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan yakni dengan bekerja sebagai karyawan/buruh/pegawai di suatu perusahaan, usaha mandiri, maupun kantor, atau dapat pula membuka lapangan usaha sebagai wirausaha/pengusaha.

Tabel 2.24
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Kota Samarinda, Tahun 2013

Golongan umur	Angkatan Kerja		Jumlah	Rasio
	Bekerja	Mencari Pekerjaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-19	42.899	6.744	49.643	86,42
20-24	40.895	7.248	48.143	84,94
25-29	44.143	5.499	49.642	88,92
30-34	58.257	3.611	61.868	94,16



Golongan umur	Angkatan Kerja		Jumlah	Rasio
	Bekerja	Mencari Pekerjaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35-39	34.691	1.049	35.740	97,06
40-44	41.606	2.243	43.849	94,88
45-49	27.127	2.321	29.448	92,12
50-54	22.169	663	22.832	97,10
55-59	9.804	750	10.554	92,89
60-64	3.923	375	4.298	91,28
Jumlah	325.514	30.503	356.017	91,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Pada tahun 2013, sebanyak 325.514 penduduk Kota Samarinda mempunyai pekerjaan dimana sebagian besar berada pada umur 30 hingga 44 tahun yang mencapai 58.257 jiwa dan umur 25 hingga 29 yang mencapai 44.143 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling minoritas bekerja adalah kelompok paling tua yakni usia 60 hingga 64 tahun (3.923 jiwa).

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, pada tahun 2013 sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 94.130 jiwa. Hal ini berbanding positif dengan tingginya kontribusi sektor tersebut dalam membentuk struktur perekonomian Kota Samarinda. Selain itu, sebagian besar penduduk juga bekerja pada sektor jasa-jasa yang mencapai 74.356 jiwa.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor
Kota Samarinda, Tahun 2009-2013

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	19.274	20.754	17.408	15.787	18.724
Pertambangan & Penggalian	9.576	17.591	24.313	25.816	31.289
Industri Pengolahan	25.528	30.179	30.805	39.074	31.811
Listrik, Gas, & Air Bersih	1.197	982	1.973	3.122	668
Konstruksi	22.792	24.468	30.074	29.246	32.591
Perdagangan, Hotel, & Restoran	82.250	109.939	102.441	100.439	94.130



Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengangkutan & Komunikasi	20.349	23.946	20.176	18.055	22.076
Keuangan, Sewa, & Js. Perush.	9.185	11.605	12.093	19.231	19.867
Jasa-jasa	54.133	67.541	78.955	73.746	74.356
Jumlah	244.283	307.006	318.238	324.516	325.514

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum ini akan menjelaskan terkait perkembangan kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan daerah agar tercapai target-target pembangunan. Pada aspek ini terdapat dua fokus layanan yakni wajib yang merupakan kinerja wajib bagi pemerintah kota dan layanan pilihan yang merupakan urusan pemerintah untuk melengkapi layanan wajib sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan Pemerintah Kota Samarinda yang harus diselenggarakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah karena terkait pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan dan perbaikan pada pelayanan wajib ini akan memberi efek positif pada output program dan kegiatan sehingga penerapan yang optimal diperlukan dalam pelayanan ini.

1. Pendidikan

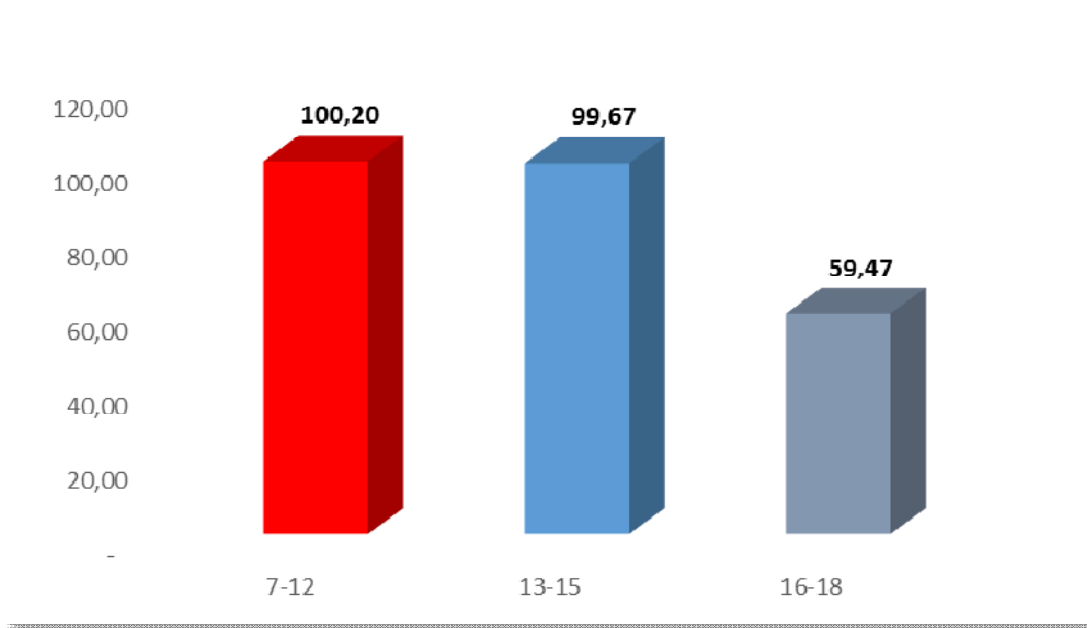
1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS yang terus mengalami trend kenaikan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang memang seharusnya bersekolah semakin meningkat.



Angka partisipasi sekolah di Kota Samarinda pada kelompok umur pendidikan 7-12 tahun dan 13-15 tahun sudah menunjukkan tingginya partisipasi sekolah masyarakat pada kelompok tersebut. Hal ini mengindikasikan hampir 100 persen penduduk berpartisipasi sekolah hingga tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Namun, untuk partisipasi di jenjang Sekolah Menengah Atas pada kelompok umur 15-18 tahun, hanya sebanyak 59,47 persen penduduk yang mengenyam pendidikan.

Gambar 2.16
Angka Partisipasi Sekolah Kota Samarinda, Tahun 2013



Sumber: SIPD Kota Samarinda, 2013

1.2 Rasio Guru terhadap Murid

Rasio Guru terhadap Murid menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid dimana angka ini akan memperlihatkan kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio guru terhadap murid maka beban mengajar guru semakin berat sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan guru hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.



Jika dilihat dari rasio guru terhadap murid secara umum, Kota Samarinda memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup dimana pada tahun ajaran 2013/2014 rasio guru terhadap murid untuk Sekolah Dasar/ sederajat mencapai 20,85 (seorang guru mengajar 20-21 murid), Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar 14,26 (seorang guru mengajar 14-15 murid), dan untuk Sekolah Menengah Atas/ sederajat mencapai 11,24 (seorang guru mengajar 11-12 murid).

Tabel 2.26
Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, Jumlah Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru Kota Samarinda, Tahun Ajaran 2013/2014

Indikator	Jenjang Sekolah		
	SD	SLTP/MTs	SLTA/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Sekolah	248	113	103
Jumlah Ruang Kelas	1.941	1.123	1.126
Jumlah Guru	4.393	2.709	3.118
Jumlah Murid	91.614	38.620	35.040
Rasio Guru Murid	20,85	14,26	11,24

Sumber: BPS Kota Samarinda, 2014

2. Kesehatan

2.1 Fasilitas Kesehatan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1987 tentang pembagian kewenangan pemerintah dalam urusan kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pelayanan kesehatan dasar di daerah. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan sarana utama pelayanan dasar kesehatan di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri, sarana dan prasarana kesehatan sudah terdistribusi merata dan akses menuju fasilitas kesehatan sudah jauh lebih baik. Diharapkan dengan terpenuhinya fasilitas kesehatan ini, derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih baik. Selain persebaran fasilitas kesehatan sudah merata, jumlah dan kualitas baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan pun juga ditingkatkan demi pencapaian tujuan pembangunan dalam bidang kesehatan.



Tabel 2.27
Statistik Fasilitas Kesehatan
Kota Samarinda, Tahun 2010-2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rumah Sakit Umum	7	7	7	9	9
2.	Rumah Sakit Bersalin	5	4	5	6	6
3.	Dokter Praktek	143	182	535	546	-
4.	Jumlah Puskesmas	21	23	24	24	26
5.	Jumlah Poliklinik	16	84	84	84	84
6.	Jumlah Pustu	43	43	43	43	41
7.	Jumlah Penduduk	727.500	755.630	781.184	805.688	830.676
8.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk (per 1.000 penduduk)	0,029	0,032	0,031	0,029	0,028
9.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk (per 1.000 penduduk)	0,022	0,111	0,108	0,104	0,098
10.	Rasio Pustu persatuan penduduk(per 1.000 penduduk)	0,059	0,057	0,055	0,053	0,048
11.	Rata-rata Pelayanan Pengobatan Melalui Puskesmas	350.449	521.233	771.462	860.728	-

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014



Tabel 2.28
Statistik Tenaga Kesehatan Rumah Sakit
Kota Samarinda, Tahun 2013

Rumah Sakit	Tenaga Dokter			Tenaga Medis			Tenaga Non Medis
	Umum	Spesialis	Gigi	Bidan	Perawat	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
RS Umum Pemerintah	58	65	11	119	925	154	537
RS Umum Swasta	40	77	12	112	574	121	497
RS Bersalin	18	11	1	41	20	13	41
RS Jiwa	14	13	1	0	13	30	109

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014

3. Pekerjaan Umum

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Tabel 2.29
Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jalan Kota Samarinda, 2009-2014

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kondisi Baik	327,09	420,64	430,00	450,50	351,89	159,63
2.	Kondisi Sedang	199,34	114,39	102,90	81,25	444,79	247,34
3.	Kondisi Rusak	9,90	144,55	180,60	184,15	74,55	152,07
4.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	704,62	847,78	880,61	883,99	871,34	651,342

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2015

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari tahun 2009 hingga 2012, panjang jalan keseluruhan Nasional, Provinsi dan Kota mengalami peningkatan panjang jalan hingga mencapai 883,99 km pada tahun 2012. Namun pada tahun-tahun berikutnya, panjang jalan menurun hingga mencapai 721,34 km pada tahun 2014.

Hal yang perlu dicermati lebih lanjut berkenaan dengan data di atas adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah jalan dengan kondisi rusak dan penurunan jumlah jalan dengan kondisi jalan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya atau tidak ada



pemeliharaan jalan yang baik, sehingga kondisi jalan yang sebelumnya baik dapat menjadi rusak dan sedang.

Panjang jalan secara keseluruhan berdasarkan kewenangan jalan yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Dilihat dari tabel dibawah ini, jalan Nasional mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu 54,740 km sedangkan di tahun 2013 sebesar 43,00 km.

Tabel 2.30
Panjang Jalan di Kota Samarinda berdasarkan Kewenangan Jalan

No.	Jenis Jalan	Panjang (km)			
		2011	2012	2013	2014
1	Jalan Nasional	52,38	53,36	43,00	54,740
2	Jalan Provinsi	114,73	114,73	114,73	3,100
3	Jalan Kota	713,50	715,90	713,50	593,502
Jumlah		880,63	883,99	871,23	651,342

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan, 2015

3.2 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan yang positif terhadap jumlah persentase penduduk yang memiliki akses air minum bersih dan jamban dengan tanki septik. Untuk jamban dengan tanki septik, Kota Samarinda telah meningkat dari 85,35 persen di tahun 2009 menjadi 95,36 persen atau meningkat sebesar 10,01 persen dalam 5 (lima) tahun. Hal ini akan terus diprediksikan meningkat pada tahun 2014 menjadi 96,62 persen atau meningkat 1,26 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 1,88 persen/tahun.

Hal serupa terjadi pula pada persentase air bersih yang terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir dimana data dari tahun 2009 yaitu 94,32 persen meningkat menjadi 99,07 persen pada tahun 2013 atau meningkat sebanyak 4,75 persen. Penggunaan air minum bersih ini akan diprediksikan terus meningkat ke angka 99,42 persen di tahun 2014 atau meningkat sebesar 0,35 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 0,5 persen/tahun.



Tabel 2.31
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kota Samarinda, 2009-2014

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Air minum bersih	94,32	96,92	96,63	98,48	99,07	99,91*
2.	Jamban dengan tanki septik	85,35	91,92	89,06	95,70	95,36	96,62*

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014

4. Perumahan

4.1 Persentase penduduk berakses air bersih

Tabel 2.32
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih
Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	573.159	705.093	730.165	769.310	798.195	825.840
2.	Jumlah penduduk	607.675	727.500	755.630	781.184	805.688	830.676
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	94,32	96,92	96,63	98,48	99,07	99,42*

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Samarinda berhasil dalam memberikan pelayanan di bidang akses air bersih. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di tiap tahunnya. Tercatat dengan jumlah penduduk 607.675 jiwa di tahun 2009, persentase pelayanan air bersih yaitu 94,32 persen meningkat ke angka 99,07 persen di tahun 2013 (atau sekitar 4,75 persen) dengan jumlah penduduk yang meningkat sebanyak 223.001 jiwa (jumlah penduduk 805.688 jiwa di tahun 2013). Prediksi dengan peningkatan jumlah penduduk menjadi 830.676 jiwa di tahun 2014, tingkat persentase terhadap akses air minum dan jumlah penduduk diharapkan dapat meningkat ke angka 99,42 persen atau sekitar 0,35 persen dari tahun 2013, sehingga rata-rata peningkatan persentase selama 6 (enam) tahun adalah 0,5 persen/tahun.



5. Permukiman Kumuh

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya kebutuhan perumahan yang berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarananya. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan permasalahan pemukiman jika dalam pemenuhan perumahan layak tidak segera direalisasikan bagi seluruh warga. Permasalahan pemukiman pada intinya disebabkan karena kemampuan lahan yang timbal balik dengan daya kemampuan warga, sehingga menimbulkan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta tidak adanya sinkronisasi antara pendapatan rakyat per kapita dengan kemampuan beli/sewa dan perbaikan rumah.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan berusaha memaksimalkan lahan tanpa memperhatikan keamanan, kesehatan, kenyamanan yang pada akhirnya menjadikan kawasan tersebut menjadi daerah permukiman kumuh. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda pada umumnya disebabkan karena peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa yang berada di sekitar bandaran sungai. Kondisi tata bangunan di kawasan ini tidak teratur dan fungsi sungai menjadi orientasi kawasan menjadi hilang. Selain itu, massa bangunan berhimpitan, berderet, dan belum memperlihatkan penerapan GSB sehingga tidak memenuhi standar kenyamanan dan persyaratan dasar kesehatan rumah. Akhirnya berbagai permasalahan timbul mulai dari masalah kesehatan, bencana kebakaran, hingga kontroversi lahan yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bermukim di Kota Samarinda.

Lokasi dan luasan Kawasan kumuh yang ada di Kota Samarinda telah diuraikan dalam Keputusan Walikota seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

No.	Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bantaran Sungai Karang Mumus (A1) Jl. Abdul Muthalib Jembatan S. Parman	90,62	Kumuh
2.	Sungai Karang Mumus (A2) Jl. S. Parman	202,25	Cukup Kumuh



No.	Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	– Jl. PM Noor		
3.	Bantaran Sungai Karang Asam Kecil (B) Kel. Teluk Lerong	30,24	Cukup Kumuh
4.	Bantaran Sungai Karang Asem Besar (C)	50,20	Cukup Kumuh
5.	Sistem Folder H Kecamatan Samarinda Ulu	2,5 13,05 25,88	Cukup Kumuh
6.	Bantaran Sungai Mahakam (D) Kecamatan Samarinda Seberang	10,36	Cukup Kumuh
7.	Lambung Mangkurat – Bandara Temindung (F) Kelurahan Pelita	30,7	Cukup Kumuh
8.	Bantaran Sungai Mahakam Palaran (G) Kawasan Pengembangan Baru	51,36	Cukup Kumuh
9.	Bantaran Sungai Mahakam Selili (E)	32,02	Cukup Kumuh
Total		539,18	

Sumber: Salinan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/II/2015

6. Lingkungan Hidup

6.1 Persentase Penanganan Sampah

Selama 4 (empat) tahun awal data (2009-2013) jumlah produksi sampah Kota Samarinda mengalami peningkatan paling besar di tahun 2012 yaitu sebanyak 995.449 m³ dengan jumlah persentase volume sampah yang ditangani mengalami penurunan sebanyak 22,33 persen dari 87 (2009) ke 64,67 persen (2012). Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penggunaan lahan seperti perdagangan dan jasa, industri, dan sebagainya pada tahun tersebut.

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas penggunaan lahan di Kota Samarinda, di prediksi volume sampah pada tahun 2014 meningkat sebanyak 932.025 m³, sehingga persentase sampah yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Samarinda diharapkan setidaknya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 88,07 persen menjadi 93,73 persen atau naik sebesar 5,66 persen. Dengan demikian, rata-rata peningkatan persentase volume sampah yang dapat ditangani selama 6 (enam) tahun adalah 1,12 persen/tahun.



Tabel 2.34
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)	478.004	584.215	411.506	643.754	703.647	873.633*
2.	Jumlah volume produksi sampah (m ³)	549.430	662.678	745.653	995.449	798.918	932.025*
3.	Persentase (%)	87,00	88,16	55,19	64,67	88,07	93,73

Sumber: Salinan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 413.2/028/HK-KS/I/2015

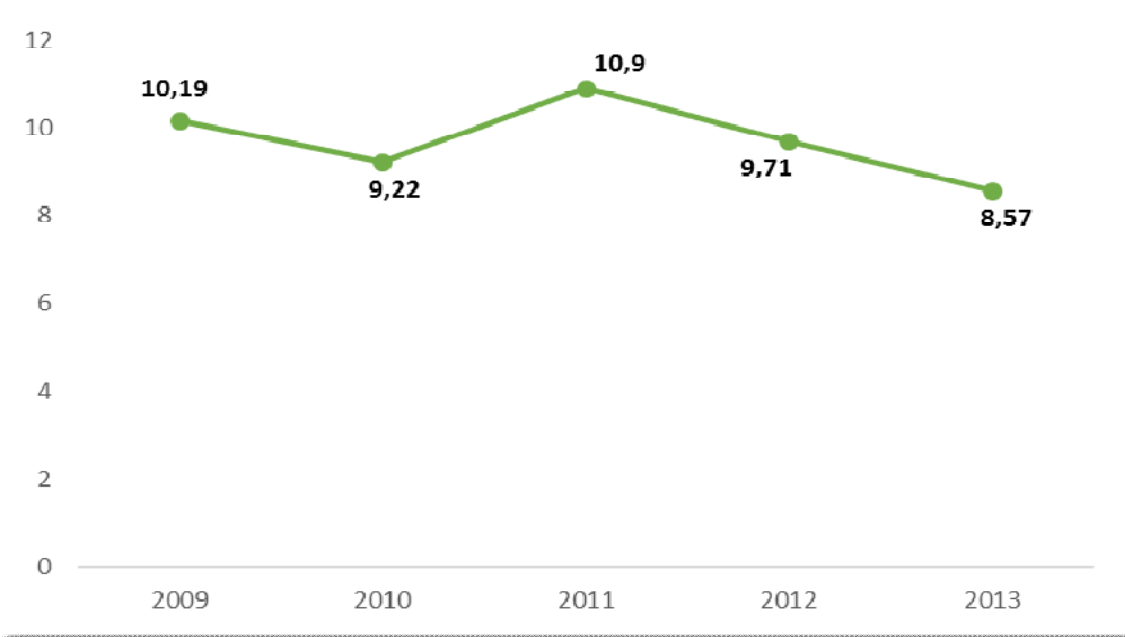
7. Ketenagakerjaan

7.1 Pengangguran

Pengangguran di Kota Samarinda tergolong cukup tinggi dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2009 hingga 2013, tingkat pengangguran terbuka paling rendah berada pada tahun 2013 yang mencapai 8,57 persen. Sedangkan tingkat pengangguran paling tinggi berada pada tahun 2011 yang mencapai 10,90 persen. Fenomena ini harus menjadi perhatian pokok Pemerintah Kota Samarinda terutama dalam merumuskan kebijakan terkait ketenagakerjaan. Kajian ketenagakerjaan terutama terkait pendidikan hingga usia penduduk yang menganggur juga dapat menjadi masukan tersendiri dalam merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.



Gambar 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Samarinda, 2009-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2014

7.2 Statistik Ketenagakerjaan

Kajian dan analisis ketenagakerjaan menjadi penting adanya mengingat sumber daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan subyek pembangunan daerah terutama berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Di Kota Samarinda sendiri, penduduk yang bekerja jika dibandingkan dengan angkatan kerja sebesar 91,43 persen dimana sebagian besar merupakan tenaga kerja laki-laki yang mencapai 224.602 jiwa dari 325.513 penduduk yang bekerja.

Tingkat pengangguran Kota Samarinda jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur berada sedikit di atasnya. Tingkat pengangguran Kota Samarinda sebesar 8,57 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,94 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, maka pengangguran Kota Samarinda menduduki peringkat ketiga setelah Kota Bontang (11,19%) dan Kabupaten Paser (9,25%).



Tabel 2.35

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2013

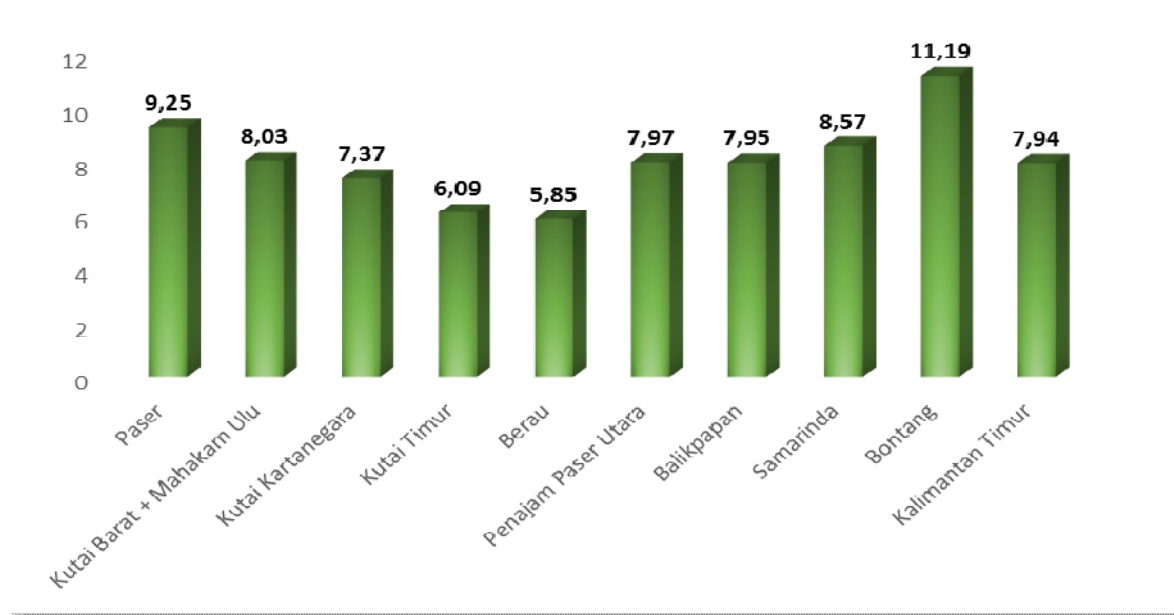
No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	224.602	100.911	325.513
	Pengangguran	21.026	9.478	30.504
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	245.628	110.389	356.017
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah	42.627	43.390	86.017
	Mengurus RT	4.772	121.129	125.901
	Lainnya	11.008	6.898	17.906
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	58.407	171.417	229.824
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	304.035	281.806	585.841
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	80,79	39,17	60,77
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	8,56	8,59	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2014



Gambar 2.18

Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur, (Agustus 2013)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014

8. Penanaman Modal

Dalam meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki strategi dalam menarik investor-investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Perkembangan iklim investasi di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana kondusivitas berinvestasi menjadi modal dasar investor untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda.

Tabel 2.36
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Samarinda, Tahun 2010 s.d. 2014

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	12	1.230.000	1	140.000
2011	19	1.981.994	8	1.249.372
2012	7	1.454.400	4	1.782.800
2013	70	1.874.000	5	2.565.500
2014	67	1.524.000	4	2.336.000

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014



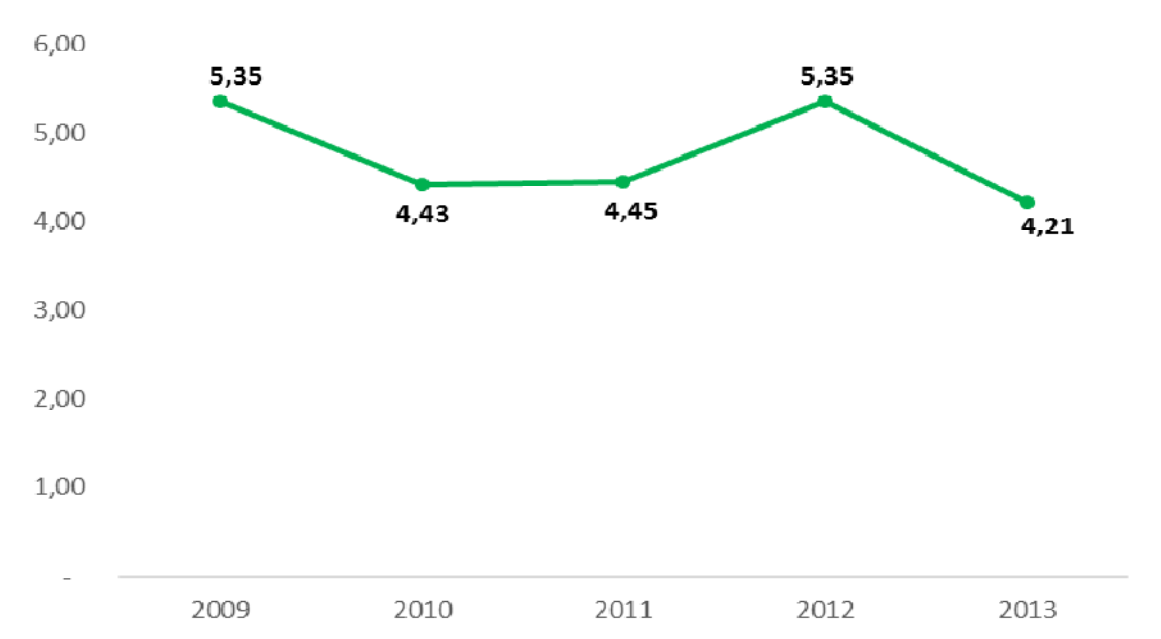
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi hingga saat ini belum dapat dicapai. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan baik pada lahan kering (ladang) maupun lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi hingga saat ini, agro-ekosistem sawah mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang. Sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi.

Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi, tidak memiliki peranan yang khusus dalam realisasi swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Kota Samarinda dapat berperan sebagai *supporting* dalam mencapai tujuan swasembada melalui beberapa terobosan program kegiatan di bidang pertanian. Dalam pelaksanaannya, tergambar bahwa produktivitas padi sawah dan lading di Kota Samarinda cukup stagnan namun cenderung mengalami penurunan dimana produktivitas pada tahun 2013 mencapai 4,21 ton/ha.

Gambar 2.19
Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kota Samarinda, 2009-2013 (ton/ha)



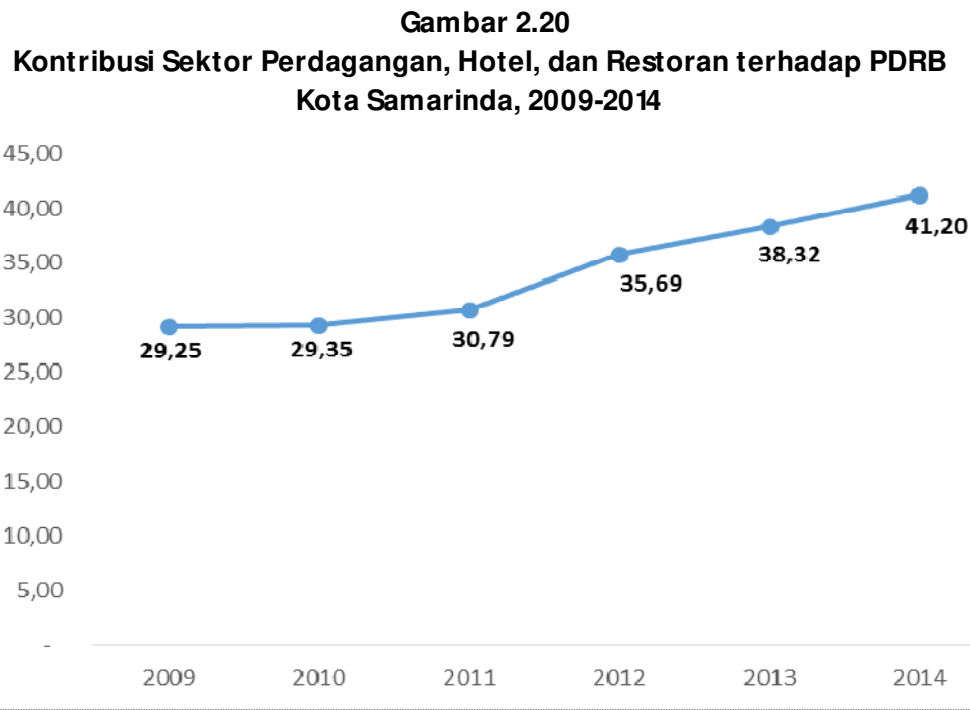
Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014



2. Perdagangan, Akomodasi, dan Perindustrian

a. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan dalam perekonomian di Kota Samarinda dimana kontribusi struktur perekonomian dalam pembentukan PDRB paling tinggi hingga mencapai 41,20 persen. Selain kontribusinya, pertumbuhan perekonomian sektor tersebut juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan hal tersebut berdampak positif pada perekonomian makro maupun mikro karena juga berarti semakin meningkat kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor tersebut (mengurangi pengangguran).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

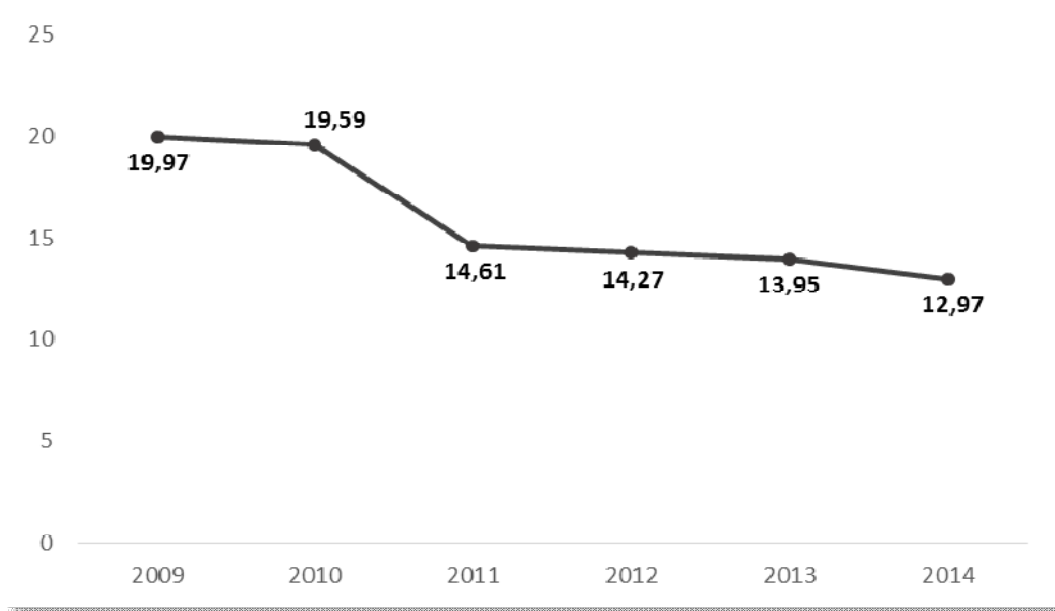
b. Industri Pengolahan

Lain halnya dengan industri pengolahan, sektor yang beberapa tahun lalu cukup mendominasi perekonomian Kota Samarinda semakin lama semakin mengalami penurunan dalam kontribusi perekonomian. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pula pada produksi sektor pertambangan dan penggalian yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan mengalami perlambatan. Pada tahun 2009, dominasi sektor industri pengolahan pada struktur ekonomi Kota Samarinda



mencapai 19,97 persen, dan kini pada tahun 2014 kontribusi sektor tersebut hanya sebesar 12,97 persen.

Gambar 2.21
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalan memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung pembentukan perekonomian daerah Kota Samarinda. Hal tersebut karena Kota Samarinda yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa jenis pertambangan dan galian bumi yang cukup potensial baik bahan galian Golongan A maupun bahan galian Golongan C.

Pada sektor pertambangan, khususnya tambang batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Samarinda karena tingginya produksi dibandingkan komoditas lain. Tambang Batubara di wilayah Kota Samarinda dapat ditemukan hampir di semua Kecamatan yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sambutan, Loa Janan Ilir, dan Sungai Pinang Dalam.

Perkembangan produksi batubara di Kota Samarinda selama kurun waktu tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian



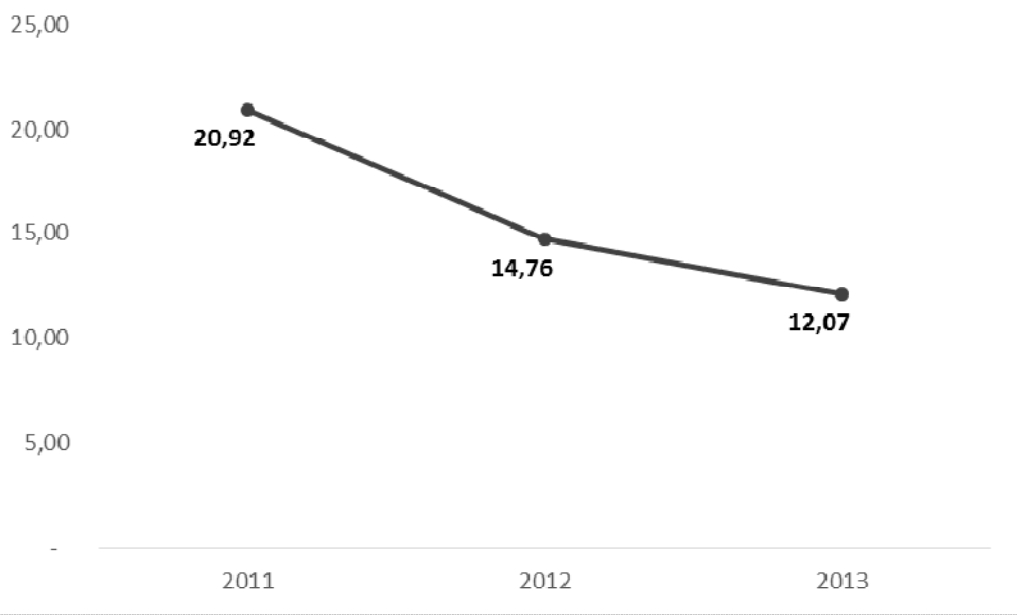
bagi pengambilan kebijakan pembangunan Kota Samarinda ke depan. Peningkatan produksi batubara di Kota Samarinda terjadi pada periode 2009 hingga 2011 yang pada saat itu mencapai 11.593.843,64 ton dengan pertumbuhan produksi sebesar 150,83 persen dari tahun sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan yang progresif dari tahun 2012 menurun sebesar 2,29 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 13,07 persen.

Tabel 2.37
Perkembangan Produksi Batubara
Kota Samarinda Tahun 2009-2013 (Ton)

Tahun	Produksi (Ton)	Kenaikan (%)
(1)	(2)	(3)
2009	3.070.233,19	-
2010	4.630.449,81	50,82
2011	11.593.843,64	150,83
2012	11.327.858,35	-2,29
2013	9.847.170,47	-13,07

Sumber : Dinas Pertambangan Kota Samarinda

Gambar 2.22
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
Kota Samarinda, 2009-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015



Bersamaan dengan penurunan produksi batubara di Kota Samarinda, terjadi pula penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan struktur perekonomian pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012, terjadi penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menjadi sebesar 14,76 persen pada tahun 2012 (sebelumnya 20,92% pada 2011) dan menurun kembali hingga mencapai 12,07 persen pada tahun 2013.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi dan kekhasan serta keunggulan suatu daerah. Selain itu, daya saing juga merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan merata dan berkelanjutan.

Dalam melihat daya saing Kota Samarinda, maka perlu dipahami beberapa kondisi, yaitu: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan masuk ke suatu daerah serta menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Kota Samarinda terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan).

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.



Sebagai ibukota provinsi, kemampuan perekonomian Kota Samarinda sudah termasuk baik. Hal ini terlihat dari peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtanggayang mencapai Rp.1.237.035,- pada tahun 2013 dan diperkirakan meningkat hingga mencapai Rp.1.336.327,- pada tahun 2014. Selain itu, pengeluaran non pangan rumahtangga di Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pangan sehingga dapat dikatakan secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda lebih meningkat karena sudah lebih fokus pada kebutuhan sekunder dan tersier dibandingkan urusan “perut”.

Tabel 2.38
Angka Konsumsi Rumahtangga per Kapita Kota Samarinda, 2009-2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Total Pengeluaran RT	720.351	970.468	1.056.256	1.169.800	1.237.035	1.336.327*
2.	Total Pengeluaran RT Pangan	325.922	429.586	451.906	489.850	523.081	554.325*
3.	Persentase Pengeluaran RT Pangan	45,24	44,27	42,78	41,87	42,29	41,48*
4.	Total Pengeluaran RT non Pangan	394.429	540.882	604.350	679.950	713.954	782.002*
5.	Persentase Pengeluaran RT non Pangan	54,76	55,73	57,22	58,13	57,71	58,52*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Penataan Ruang

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rasio ketersediaan Ruang Terbuka Hijau existing (Publik dan Privat) terhadap rencana minimal peruntukan Ruang Terbuka Hijau (sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 yaitu minimal 30 persen dari luas Kota Samarinda) hanyalah 0.25 atau hanya sebesar 7,55 persen. Dengan diberlakukannya



Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, maka Kota Samarinda dapat melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan jumlah persentase dari 7,55 persen menjadi 30 persen dalam jangka waktu 20 tahun atau minimal tercapai 15 persen dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan pada saat berakhirnya RPJP ini (yaitu tersisa 7,45% atau seluas 5.349,1 Hektar dari semula 5.418,58 Hektar).

Tabel 2.39
Ketersediaan RTH terhadap RTRW (Hektar) Kota Samarinda, 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ketersediaan RTH (Hektar)	-	-	-	5.418,58	-
2.	Rencana minimal (30% Peruntukan RTH di RTRW (Hektar)	-	-	-	21.540	-
3.	Rasio (1./2.)	-	-	-	0,25	-

Sumber: Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda, Badan Lingkungan Hidup, 2013; Hasil Analisa, 2015.

b. Luas Wilayah Kebanjiran

Jumlah titik genangan air di Kota Samarinda pada tahun 2004 dan 2014 adalah tetap 50 titik, yang membedakan adalah total luasan genangan yang berkurang seluas 86,30 Hektar dengan kedalaman wilayah banjir meningkat sedalam 0,087 Meter atau setinggi 8,7 cm dalam 10 (sepuluh tahun). Luasan genangan berkurang dapat disebabkan dengan telah dibangunnya folder dan peningkatan pemeliharaan drainase. Tetapi penanganan banjir kedepannya perlu ditingkatkan pada penanganan titik-titik banjir yang mengalami peningkatan ketinggian genangan. Tantangan Pemerintah Kota Samarinda ke depan adalah untuk mengurangi jumlah titik genangan air beserta dengan luas wilayah banjir sehingga Kota Samarinda dapat menjadi Kota yang bebas genangan air terutama saat musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.



Tabel 2.40
Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Samarinda, 2010-2014

NO	Uraian	2004	2014	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	1.833,3	1.747	86,30
2.	Jumlah titik	50	50	-
3.	Rata-rata Kedalaman Wilayah Kebanjiran (meter)	0,269	0,356	0,087

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan; Laporan Akhir Penyusunan Outline Rencana Induk Drainase Kota Samarinda, 2004

2. Lingkungan Hidup

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui usaha pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut. Dilihat dari tabel dibawah ini, status air sungai yaitu sungai Mahakam, Karang Mukus dan Karang asam masih berstatus Tercemar Berat. Berikut ini adalah beberapa data lingkungan hidup di kota Samarinda.

Tabel 2.41
Data Lingkungan Hidup di Kota Samarinda, 2010-2014

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Status Air Sungai Mahakam Segmen Samarinda	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat
2.	Status Air Sungai Karang Mukus	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat
3.	Status Air Sungai Karang Asam	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat
4.	Jumlah Penanganan kasus pengaduan lingkungan		16	31	33	50
5.	Penilaian untuk penghargaan Adipura	61,41	61,45	65,11	70,90	

Sumber: BLH Kota Samarinda



3. Jaringan Sumber Daya Air

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Kota Samarinda telah memberikan pelayanan yang baik di bidang penyediaan air bersih untuk warga kotanya. Terlihat pada tahun 2013 dengan tingkat pelayanan yaitu 99,07 persen telah meningkat sebanyak 4,75 persen dari tahun 2009 dan diprediksi pada tahun 2014 akan meningkat kembali menjadi 9,91 persen. Pencapaian positif ini akan terus ditingkatkan dengan target pada tahun 2019 sebesar 100 persen warga Kota Samarinda akan terlayani oleh air bersih.

Tabel 2.42
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Kota Samarinda, 2009-2014

No	Sumber Air Bersih	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	145.131	178.608	178.669	190.913	204.477	218.859*
2	Jumlah Rumah Tangga	153.871	184.284	184.900	193.860	206.396	219.050*
3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (1/2)	94,32	96,92	96,63	98,48	99,07	99,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

4. Sistem Jaringan Energi

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kota Samarinda menyentuh angka paling tinggi berada pada tahun 2012 dengan 99,85 persen. Tetapi, angka ini mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah RT di Kota Samarinda yang belum terlayani oleh listrik menjadi 99,36 persen di tahun 2013 atau sebanyak 0,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan melihat kondisi ini, maka diperlukan target kenaikan menjadi 99,46 persen di tahun 2014 atau menaikkan sebesar 0,10 persen sebagai bagian dari usaha perbaikan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana listrik wilayah.



Tabel 2.43

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Samarinda, 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	153.517	183.750	183.994	193.569	205.075	217.862*
2.	Jumlah Rumah Tangga	153.871	184.284	184.900	193.860	206.396	219.050*
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (2)/(3)	99,77	99,71	99,51	99,85	99,36	99,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kota Samarinda.

1. Kriminalitas

Sebagai ibukota provinsi sekaligus daerah perkotaan, kriminalitas merupakan hal yang sering dijumpai dalam keseharian masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kondusivitas investasi atau penanaman modal maka perlu adanya minimalisasi tindak kriminalitas oleh aparat penegak hukum di Kota Samarinda.



Tabel 2.44
Delapan Besar Perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang Masuk dan Diselesaikan Kota Samarinda, 2013

Jenis Kejahatan	Masuk	Diselesaikan
(1)	(2)	(3)
Pencurian Sepeda Motor	622	207
Pencurian dengan Pemberatan	447	216
Penggelapan	241	168
Narkoba	227	227
Penganiayaan Berat	219	202
Penipuan/Perbuatan Curang	207	137
Pencurian Biasa	192	121
Penganiayaan Ringan	79	70

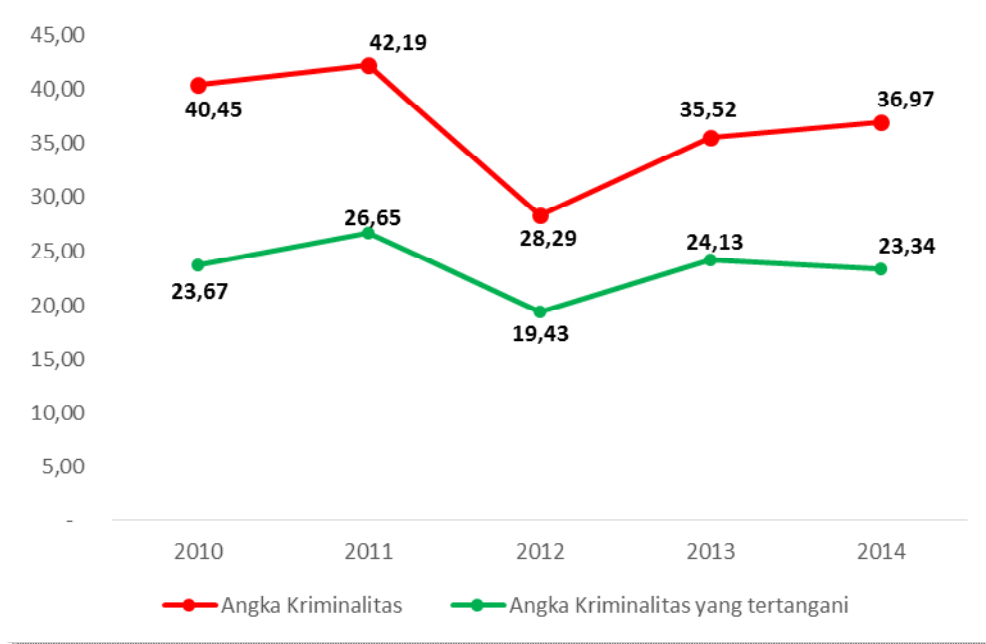
Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2014

Terlihat pada tabel di atas bahwa pencurian sepeda motor merupakan kriminalitas yang paling sering terjadi di Kota Samarinda sebanyak 622 kasus dan hanya 207 kasus yang terselesaikan. Kasus lain yang cukup tinggi angka kejadiannya adalah pencurian dengan pemberatan yang mencapai 447 kasus masuk dan hanya 216 kasus yang terselesaikan. Disisi lain, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, angka kriminalitas di Kota Samarinda sangat fluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2014 mencapai 36,97 yang berarti dari 10.000 jiwa penduduk terdapat hampir 40 kasus kriminalitas di tengah-tengahnya. Terlebih lagi angka kriminalitas yang tertangani masih cukup jauh jika dibandingkan dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kota Samarinda.

Perlu adanya berbagai upaya dalam pencegahan terjadinya tindak kriminalitas di Kota Samarinda dan peningkatan kinerja aparat yang berwenang dalam menyelesaikan berbagai kasus kriminalitas yang terjadi. Hal ini menjadi perlu mengingat tren angka kriminalitas yang meningkat pada tahun 2012 hingga 2014 terlebih lagi angka kriminalitas yang tertangani cenderung menurun pada tahun terakhir.



Gambar 2.23
Angka Kriminalitas dan Angka Kriminalitas yang Diselesaikan
Kota Samarinda, 2010-2014



Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi aspek daya saing Kota Samarinda terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati



masa pensiun. Penduduk usia 15 - 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif . Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk pada sisi demografi.

Rasio ketergantungan dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ini merupakan rasio indikator demografi yang sangat penting karena semakin tinggi persentasenya maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Kota Samarinda memiliki rasio ketergantungan cukup baik yakni sebesar 42,32 pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa perbandingan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif mencapai 42,32 (diantara 100 orang penduduk usia produktif, terdapat 42-43 penduduk usia tidak produktif). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ketergantungan penduduk Kota Samarinda yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.45
Rasio Ketergantungan Kota Samarinda, 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	206.416	214.466	221.946	219.847	226.779
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	15.794	16.378	16.907	19.584	20.224
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	222.210	230.844	238.853	239.431	247.003
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	505.290	524.786	542.331	566.257	583.673
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4) kali 100	43,98	43,99	44,04	42,28	42,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015



BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan isu-isu strategis dengan melakukan analisis dan kajian lingkungan eksternal baik di tingkat internasional, nasional, hingga regional untuk melengkapi analisis permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Suatu analisis isu-isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda baik secara sektoral maupun kewilayahan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Setiap daerah memiliki permasalahan-permasalahan yang unik sebagai bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga optimalisasi pembangunan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merumuskan antisipasi maupun solusi pada setiap permasalahan yang ada. Terkait hal tersebut, penuntasan permasalahan merupakan esensi dari tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan tahapan demi tahapan pembangunan melalui



perumusan perencanaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah mengingat permasalahan pembangunan bersifat kompleks dan multidimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun kewilayahan.

Permasalahan pembangunan di Kota Samarinda dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah Kota Samarinda yang tepat dan relevan. Kebijakan pemerintah kota akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Samarinda. Oleh karena itu, penting adanya pengendalian dan evaluasi capaian kegiatan serta program kerja sebagai bagian dari pemahaman tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dimasa lalu. Pengendalian dan evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan dan monitoring pelaksanaan pembangunan untuk memecahkan setiap permasalahan yang mengiringi realisasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah Kota Samarinda akan diidentifikasi melalui berbagai fenomena yang dikaji dari data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Oleh karenanya, perlu data dan informasi yang valid dan terkini dalam mengkaji setiap gerakan data sehingga tampak fenomena yang terjadi terutama permasalahan pembangunan Kota Samarinda. Dari hasil identifikasi, analisis, maupun kajian data dan informasi pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama dengan menguraikan akar permasalahan dan pokok permasalahan dengan penjabaran sebagai berikut.

1. Belum terciptanya Kualitas Hidup dan Kesetaraan Sosial

Salah satu inti dari berdirinya suatu negara adalah penjaminan masyarakat yang berada di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan agar memiliki kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera dari sisi sosial maupun ekonominya. Oleh karena itu, pembangunan menyeluruh dan merata menjadi poin penting dalam perwujudan



kehidupan masyarakat tanpa adanya kesenjangan sosial ekonomi sehingga terjalin rasa kebersamaan dalam pemerataan menikmati hasil pembangunan.

Hasil pembangunan yang adil dan merata harus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan dampak nyata pembangunan kepada seluruh rakyat atau masyarakat dalam suatu daerah tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Dampak pembangunan diharapkan dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat tercipta sesuai visi jangka panjang pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian kesejahteraan masyarakat bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah daerah, oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan maka diperlukan monitoring dan evaluasi dengan melihat target kinerja pembangunan daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan lain-lain.

Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat menunjukkan perkembangan yang positif dalam realisasi pembangunan daerah Kota Samarinda. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda sebagai tolok ukur derajat kesehatan, pendidikan, serta kemampuan ekonomi masyarakat konsisten menunjukkan peningkatan dalam 11 tahun terakhir, dari 74,50 tahun 2004 menjadi 78,79 pada tahun 2013. Angka IPM ini baik secara level regional Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata IPM provinsi (77,33 tahun 2013) dan IPM nasional (73,81 tahun 2013). Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, IPM Kota Samarinda menduduki peringkat kedua setelah IPM Kota Balikpapan (79,87 tahun 2013). Tingginya IPM Kota Samarinda tidak serta merta menjadikan pembangunan sumber daya manusia berhenti, namun beberapa kualitas di aspek lain harus ditingkatkan demi mengisi kekosongan-kekosongan kualitas di beberapa bidang atau sektor pembangunan.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dimiliki oleh suatu wilayah ataupun regional, sehingga meminimalisasi maupunantisipasi peningkatan kemiskinan di suatu wilayah sangat diperlukan. Begitu juga di Kota Samarinda, angka



kemiskinan di Kota Samarinda menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan disini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran baik makanan maupun non-makanan di bawah garis kemiskinan selama sebulan.

Kemiskinan di Kota Samarinda memang lebih rendah dibandingkan dari angka Provinsi Kalimantan Timur, namun dari seriesnya terlihat suatu fenomena yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Fenomena dari series kemiskinan tersebut adalah angka kemiskinan bersifat fluktuatif dan secara umum terjadi stagnansi angka kemiskinan, sehinggasaat angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun, angka kemiskinan Kota Samarinda justru masih tetap bahkan cenderung fluktuatif.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat melalui pengeluaran rumahtangga, dimana semakin tinggi total pengeluaran rumahtangga maka semakin meningkat daya beli kebutuhan hidupnya dan secara otomatis kesejahteraan masyarakatikut meningkat. Selain itu, persentase pengeluaran rumahtangga yang bersifat non-pangan semakin tinggi mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu halnya Kota Samarinda, pengeluaran rumahtangga yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun merupakan dampak positif dari peningkatan perekonomian wilayah. Ditambah lagi dengan melihat tingginya persentase pengeluaran non-pangan menjadikan masyarakat Kota Samarinda lebih berfokus pada kebutuhan sekunder dan tersier dimanasecara otomatis kebutuhan primer pasti sudah terpenuhi.

Dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Samarinda sebagai wilayah tujuan urbanisasi, pemerintah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan yang sangat besar agarmampu menyerap tenaga kerja yang kedepannya akan mengurangi tingkat pengangguran. Jika dilihat perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Timur, tingkat pengangguran Kota Samarinda lebih tinggi yaitu sebesar 8,57 persen, sedangkan angka provinsi mencapai 7,94 persen. Hal ini sebagai imbas dari posisi Kota Samarinda yang berstatus kota sekaligus ibukota provinsi sehingga



banyak migrasi penduduk untuk mencari kerja namun belum mendapatkannya (pengangguran).

Dalam pembangunan ekonomi masyarakat secara mikro, faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang dihasilkan serta berujung pada penurunan daya beli masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, laju inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu di suatu wilayah dengan memperhatikan pergerakan Indeks Harga Konsumen. Sebagai salah satu kota besar yang cukup tergantung dari komoditas luar daerah, Kota Samarinda memiliki pergerakan harga yang relatif cepat dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, laju inflasi tahunan Kota Samarinda cukup fluktuatif dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2014 laju inflasi mencapai 6,74 persen padahal tahun sebelumnya masih berada pada level 10,37 persen. Efek dari tingginya fluktuasi inflasi (harga) di Kota Samarinda akan berdampak pada spekulasi harga dan tentunya akan memengaruhi daya beli masyarakat terutama kalangan bawah atau yang sering disebut rumah tangga miskin.

Namun dalam perkembangannya, capaian pembangunan dan hasil-hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingginya kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah merupakan permasalahan yang tidak kunjung terpecahkan dalam beberapa periode pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dirasakan sebagai dampak rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan Kota Samarinda.

Dari permasalahan "**Belum terciptanya Kualitas Hidup dan Kesenjangan Sosial**", terdapat beberapa inti pokok dari akar permasalahan sebagai pemicu seperti teruraikan dalam tabel berikut.



Tabel 3.1

Permasalahan Belum terciptanya Kualitas Hidup dan Kestaraan Sosial

Permasalahan	Akar permasalahan
(1)	(2)
1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum memenuhi standar dalam persaingan nasional	1. Tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih hanya sebatas SD,SMP,SMA dan SMK 2. APK SD dan SMP masih dibawah standar Provinsi 3. Angka Partisipasi Sekolah usia sekolah 16-18 tahun (usia jenjang SMA) masih cukup rendah 4. Masih banyak tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan kualitasnya
2. Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi standar dan belum merata	1. Masih belum maksimalnya kualitas infrastruktur pendidikan 2. Terdapat beberapa wilayah yang masih sulit menjangkau fasilitas pendidikan 3. Pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal
4. Kualitas kesehatan masih belum memenuhi standar	1. Masih kurangnya dokter spesialis (mengingat Samarinda menjadi rujukan kesehatan kabupaten/kota lain) 2. Masih perlu peningkatan jumlah Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu untuk menjembatani pelayanan dasar kesehatan masyarakat 3. Masih perlu peningkatan jumlah Posyandu dalam rangka penjangkauan tumbuh kembang anak
5. Kemampuan ekonomi masyarakat Kota Samarinda masih belum optimal	1. Laju inflasi masih fluktuatif di setiap bulannya 2. Belum semua perusahaan menerapkan KHL sebagai standar pembayaran upah/gaji 3. Efek domino kemiskinan menurunkan kualitas tenaga kerja (minim skill)

2. Perekonomian yang belum kuat dan mapan

Sebagai barometer perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda harus dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan pergerakan roda perekonomian wilayah. Hal ini



mengingat, Kota Samarinda memiliki potensi dan letak yang strategis sehingga pemberdayaan setiap potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dapat dioptimalkan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda menunjukkan pergerakan yang positif meskipun dalam lima tahun terakhir ini terjadi fluktuasi sehingga menyebabkan perlambatan pada tahun tertentu. Fluktuasi tajam pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2011 dimana laju pertumbuhan ekonomi mencapai 15,26 persen padahal di tahun sebelumnya hanya 6,16 persen saja. Adanya peningkatan tajam pada sektor pertambangan di masa itu menjadi penyebab utama tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 meskipun pada tahun setelahnya yakni tahun 2012 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan hingga mencapai 3,47 persen. Stabilitas pertumbuhan ekonomi kembali terjadi pada tahun 2013 dimana angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,59 persen. Stabilitas ekonomi yang diiringi stabilitas harga inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda dengan catatan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup.

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kualitas dan kondisi jalan. Panjang jalan Kota Samarinda dalam kondisi baik dan sedang tahun 2014 adalah 72,8 persen sedangkan jalan kondisi rusak adalah 27,2 persen. Hal ini perlu ditingkatkan khususnya untuk kondisi jalan dengan kondisi sedang 44,24 persen untuk menjadi kondisi baik dan kondisi jalan rusak 27,2 persen meningkat menjadi kondisi jalan sedang bahkan baik.

Selain jalan, infrastruktur juga sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras seperti jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Panjang jaringan irigasi di Kota Samarinda masih belum memadai untuk mendukung penuh lahan pertanian yang tersedia. Dengan



luas areal daerah irigasi seluas 4.126,260 Ha, luasan ini belum dapat dimanfaatkan maksimal untuk menghasilkan beras dikarenakan belum baiknya jaringan irigasi. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi perlu diperhatikan dalam rangka mendukung Kota Samarinda mewujudkan ketahanan pangan terutama beras.

Permasalahan lain yang mendesak yang dimiliki Kota Samarinda dengan peningkatan jumlah penduduk yang paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai Ibukota Provinsi adalah masalah penanganan banjir. Pesatnya pembangunan di berbagai aspek untuk menunjang Kota Samarinda sebagai Kota Jasa, Industri, dan pemukiman memberikan dampak pada bertambahnya tingkat kedalaman banjir yang meningkat dibandingkan tahun 2004 yaitu 0,087 meter atau 8,7 cm dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dan luasan genangan air (banjir) di tahun 2014 adalah seluas 1.747 Hektar. Di masa datang, Kota Samarinda perlu merencanakan pembangunan kotanya yang dapat menyelesaikan masalah banjir dengan memperbaiki tata dan tingkatan drainase (primer, sekunder, tersier, lokal) dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dari permasalahan "**Perekonomian yang belum kuat dan mapan**", terdapat beberapa permasalahan pokok dan akar permasalahan yang memicu, seperti yang teruraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Perekonomian yang belum kuat dan mapan

Permasalahan	Akar permasalahan
(1)	(2)
1. Belum stabilnya pertumbuhan ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi daerah hanya tumbuh positif di beberapa sektor 2. Pergerakan investasi dalam roda perekonomian cenderung masih lambat 3. Belum adanya kebijakan yang mendukung investasi yang sehat
2. Penurunan kemiskinan tidak berjalan signifikan dan terkesan stagnan	1. Banyaknya migran yang tidak memiliki ketrampilan 2. Pengendalian administrasi kependudukan yang belum maksimal
3. Sistem penunjang peningkatan	1. Belum terintegrasinya manajemen transportasi publik maupun komoditas



perekonomian daerah belum terintegrasi dengan baik	(barang)
	2. Masih belum terpenuhinya standar sarana prasarana dasar pekerjaan umum sebagai penunjang perekonomian daerah
3. Kemacetan yang terjadi di beberapa titik vital	1. Lebar ruas jalan yang tidak seimbang dengan banyaknya volume kendaraan
	2. Tidak banyaknya lahan parkir sehingga banyak mobil yang parkir sembarangan di bahu jalan
4. Sistem pengelolaan dan pengolahan produk daerah belum berjalan maksimal	1. Kurangnya kualitas dan kuantitas promosi potensi daerah
	2. Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan sektor perdagangan
5. Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan yang belum mandiri	1. Kualitas keterampilan SDM kurang berdaya saing
	2. Rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha mandiri
	3. Masyarakat masih banyak tergantung pada bantuan-bantuan swasta maupun pemerintah
6. Konflik demografi dalam tatanan perekonomian Kota Samarinda	1. Banyaknya jumlah pendatang ke Kota Samarinda
	2. Kesetaraan gender masih kurang
	3. Masih banyak keluarga yang belum menerapkan KB

3. Pembangunan belum berbasis lingkungan

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan lingkungan yang sehat, kesehatan masyarakat dapat dijaga serta dapat menurunkan angka kesakitan hingga angka kematian. Rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kota Samarinda dipengaruhi oleh pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ada. Selain itu, kesadaran



masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda terhadap pengelolaan sampah di Kota Samarinda dirasakan masih belum maksimal.

Sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup. Eksplorasi tambang batubara secara terus-menerus menyebabkan kerusakan wilayah pinggiran Kota Samarinda hingga berdampak pada wilayah perkotaan. Sektor industri pengolahan akan menghasilkan efek negatif yakni limbah pabrik yang mana jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi penyebab degradasi kualitas lingkungan hidup baik air, udara, maupun tanah.

Salah satu tujuan dilaksanakannya penataan ruang perkotaan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data, dari tahun 2011 hingga tahun 2013, tingkat persentase volume sampah yang ditangani telah meningkat dari 55,19 persen menjadi 88,07 persen atau meningkat sebanyak 32,88 persen. Dengan tingkat persentase 88,07 persen mengindikasikan bahwa terdapat 11,93 persen sampah yang masih menumpuk atau tidak ditangani dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya armada pengangkutan sampah baik dari segi jumlah dan kelayakan kendaraan maupun kurangnya jumlah TPS yang memenuhi standar pelayanan dikarenakan kesulitan penyediaan lahan. Dengan beban Kota Samarinda yang sebagai Ibukota Provinsi, pusat perdagangan dan jasa, serta industri. Permasalahan ini diperparah lagi dengan peningkatan jumlah penduduk Kota Samarinda sehingga memerlukan perencanaan yang baik dalam hal penanganan masalah sampah yang akan terus meningkat setiap tahunnya.

Masalah lingkungan hidup telah menjadi sorotan terutama dalam kaitannya dengan pembangunan daerah berbasis peningkatan perekonomian. Mulai generasi sekarang hingga seterusnya, pembangunan setiap wilayah harus memikirkan kelanjutan dari kualitas lingkungan hidup agar pembangunan yang tercipta akan menuju masa depan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Untuk mengantisipasi terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup,



pemerintah Kota Samarinda harus mengetahui akar permasalahan dan merumuskan program kegiatan sebagai solusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari permasalahan “**Pembangunan belum berbasis lingkungan**”, terdapat beberapa permasalahan pokok dan akar permasalahan yang memicu, seperti yang teruraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pembangunan belum berbasis lingkungan

Permasalahan	Akar permasalahan
(1)	(2)
1. Tingginya tingkat rawan bencana alam kota Samarinda untuk Banjir dan Longsor	1. Belum maksimalnya sistem penanganan banjir terpadu 2. Penataan Kota Samarinda yang belum sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah
2. Pengelolaan sampah yang belum memenuhi standar	1. Kurangnya armada pengangkutan sampah baik dari segi jumlah maupun kelayakan kendaraan 2. Belum maksimalnya pelaksanaan 3R (<i>Reuse, Recycle, Reduce</i>)
3. Pengelolaan lingkungan yang belum sesuai aturan	1. Peningkatan aktivitas sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan yang tidak terkontrol efek negatifnya. 2. Kurangnya pengendalian pembuangan limbah pertambangan

4. Penggunaan Lahan dan Fungsi Sungai Belum Sesuai Tata Ruang

Kota Samarinda memiliki lahan yang cukup kondisinya cukup strategis untuk dikembangkan sesuai tata ruang kota. Pembangunan Kota Samarinda memiliki potensi yang strategis, mengingat letak geografis Kota sangat mendukung untuk dikembangkan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik penggunaan ruang antar kegiatan/sector. Pengembangan kawasan budidaya di Kota Samarinda diarahkan untuk mengakomodasi kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan lahan basah, pertanian tanaman pangan lahan kering,



perkebunan, perikanan, hutan produksi), permukiman pertambangan, industri, dan pariwisata.

Kota Samarinda dilalui oleh banyak sungai antara lain sungai mahakam, sungai karang mumus dan sungai karang asam. Status tingkat pencemaran di ketiga sungai tersebut adalah tercemar berat. Sungai-sungai di Samarinda bisa dimanfaatkan apabila pemerintah daerah dapat melihat potensi yang ada, seperti untuk pariwisata, transportasi dan kebutuhan air bagi masyarakat. Pengelolaan air permukaan (khususnya sungai) memerlukan koordinasi dari hulu hingga hilir.

Dari permasalahan “ **Penggunaan Lahan dan Fungsi Sungai Belum Sesuai Tata Ruang**”, terdapat beberapa permasalahan pokok dan akar permasalahan yang memicu, seperti yang teruraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Penggunaan Lahan dan Fungsi Sungai Belum Sesuai Tata Ruang

Permasalahan	Akar permasalahan
(1)	(2)
1. Belum maksimalnya pemisahan antara lahan kering dan lahan basah	1. Adanya tumpang tindih antara penggunaan lahan untuk tambang dengan kegiatan sektor lain
	2. Jumlah penggunaan lahan untuk sektor pertanian semakin berkurang
2. Belum optimalnya pemanfaatan sungai bagi pembangunan Kota Samarinda	1. Belum adanya prasarana pengelolaan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga maupun pengembangan ekonomi
	2. Belum adanya regulasi terkait pemanfaatan sungai secara tepat dan sehat
	3. Kurangnya SDM yang mengelola sungai

3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis akan memberikan panduan terhadap perumusan perencanaan pembangunan daerah karena dalam isu strategis akan termuat hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah mengingat pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, isu strategis akan menjadi dasar dalam



perumusan visi dan misi pembangunan Kota Samarinda selama 20 tahun kedepan termasuk dalam penjabarannya dari tujuan pembangunan hingga program dan kegiatan pembangunan.

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kota Samarinda, isu dunia internasional, serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional-regional dan Kabupaten/Kota lain disekitar Kota Samarinda.

3.2.1. Penelaahan Isu-isu Strategis Internasional

a. Sustainable Development Goals/SDGs

Isu strategi internasional memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembangunan nasional sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi wilayah administrasi regional terutama Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

Isu strategis internasional yang relevan pada sebagian besar perencanaan pembangunan daerah adalah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang setelah berakhir periode kegiatannya akan dilanjutkan pada laporan panel tingkat tinggi (*High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP*) dengan lima pergeseran transformatif seperti:

1. Mengakhiri kelaparan dan *extreme poverty*;
2. Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
3. Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan *growth* dengan pembangunan berkelanjutan;
4. Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
5. Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor – pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Selain SDGs dan HLPEP, isu internasional juga berkisar dalam hal penerapan *green economic* global (ekonomi ramah lingkungan), krisis ekonomi global yang



masih mengancam perekonomian, penerapan sumber energi alternatif, antisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

Penerapan isu internasional dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Samarinda sudah dilaksanakan sejak lama. Namun realisasi kebijakan pembangunan yang telah disusun masih memiliki beberapa kekurangan sehingga pencapaian target kinerja masih belum optimal. Penghapusan kemiskinan dan transformasi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan belum tercapai sepenuhnya sehingga perlu evaluasi dan pembenahan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Isu lain yang lebih spesifik lagi dalam manajemen perkotaan yang perlu diperhatikan juga adalah menyangkut peningkatan populasi, perubahan iklim secara ekstrem, krisis energi, kriminalitas, bencana alam, akibat buruk peperangan, dan infrastruktur yang menua.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia;
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua ;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua;
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;



8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara;
11. Membuat kota dan pemukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Brunei–Indonesia-Malaysia-Philippina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA)

Kerja sama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara *BIMP-EAGA*. Para pelaku usaha



diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama dimaksud sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator.

Wilayah Indonesia yang menjadi anggota *BIMP-EAGA* adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pertemuan tertinggi *BIMP-EAGA* adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas cluster dan task force, yaitu : (a) *Cluster on Natural Resources Development*, diketuai oleh Indonesia (b) *Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD)*, diketuai oleh Brunei Darussalam (c) *Cluster on Joint Tourism Development (JTD)*, diketuai Malaysia (d) *Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED)*, diketuai oleh Filipina. (e) *Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security*, diketuai oleh Filipina.

Salah satu isu yang menonjol dalam kerja sama ekonomi sub-regional termasuk *BIMP-EAGA* adalah *sub-regional connectivity*. Dalam hal ini, *sub-regional connectivity* diharapkan mendukung terwujudnya *regional connectivity* di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam *ASEAN Master Plan on Connectivity*.

BIMP-EAGA memandang penting konektivitas sebagai salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan visi *BIMP-EAGA* sebagai salah satu lumbung pangan dan pusat pariwisata alam di ASEAN dan wilayah lain di Asia. Terkait hal ini para pemimpin *BIMP-EAGA* dalam pertemuannya di Hua Hin, 28 Oktober 2011 telah menetapkan *BIMP-EAGA Infrastructure Project Pipeline (PIP)*.

Sejak tahun 2007, *BIMP-EAGA* telah menandatangani beberapa MOU dalam bidang perhubungan. Salah satunya adalah *MOU on Establishing and Promoting Efficient and Integrated Sea Linkages (EPEISL)*. Sebagai implementasi MOU yang ditandatangani pada tahun 2007 tersebut, sejak Desember 2009 telah beroperasi



Roll On/Roll Off (RO-RO) Passenger Ferry antara Muara, Brunei Darussalam dan Menumbok, Malaysia. Demikian pula, jasa pelayaran antara Bitung-Tahuna, Indonesia dan Glan, Filipina mulai dilaksanakan sejak Maret 2010. Di masa mendatang RO-RO diharapkan dapat segera melayani rute Muara, Brunei Darussalam–Labuan, Malaysia. Sementara itu, sebagai implementasi *MoU on Cross Border Movement of Commercial Busses and Coaches* sekitar 40, 000 orang dalam kurun waktu Januari-Desember 2009 telah menggunakan jasa bus lintas wilayah *BIMP-EGA* (Pontianak-Bandar Seri Begawan).

Selain konektivitas dan pariwisata alam, fokus bidang kerja sama BIMP-EAGA adalah ketahanan pangan. BIMP-EAGA saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai *Food Basket Strategic Plan of Action* sebagai upaya untuk mewujudkan visinya sebagai salah satu pusat lumbung pangan ASEAN dan wilayah lain di Asia.

Sedangkan pihak luar BIMP-EAGA yang selama ini membantu pengembangan kerja sama dimaksud adalah *Asian Development Bank (ADB)* sebagai *development partner dan regional adviser*; Jepang dan China sebagai *development partner*; *GTZ* sebagai *strategic partner*. Selain itu, *BIMP-EAGA* juga menjalin kerja sama dengan *Northern Territory, Australia*.

3.2.2. Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional

Pembangunan nasional merupakan fokus utama pemerintah daerah dalam merumuskan setiap perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi perhatian khusus karena dalam pencapaian tujuan nasional memerlukan sinkronisasi, integrasi, serta keselarasan pada setiap tahapan pembangunan harus satu jalan lurus. Pembangunan daerah sebagai pendukung utama tercapainya target pembangunan nasional harus memastikan dokumen perencanaannya bersinergi dengan pembangunan nasional agar cita-cita pemerintah daerah dalam membangun regionalnya juga meningkatkan realisasi kinerja pemerintah pusat dalam mencapai tujuan nasional.



Isu jangka panjang nasional yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan isu strategis diantaranya adalah dokumen RPJPD. Review terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan lima tahunan. Pemahaman terhadap arah dan sasaran pembangunan jangka panjang memandu RPJPD Kota Samarinda agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Adapun tahapan dan skala prioritas pada RPJPN 2005-2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJM I (2005-2009)	Menata kembali & membangun Indonesia di segala bidang <input type="checkbox"/> Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJM II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang <input type="checkbox"/> Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJM III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang <input type="checkbox"/> Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJM IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur <input type="checkbox"/> Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJPN 2005-2025

Dalam pengelolaan kota, lebih spesifik Bappenas (2015) menyebutkan bahwa saat ini penduduk perkotaan telah mencapai kurang lebih 50 persen dari total penduduk dan akan meningkat menjadi 65 persen dalam 10 tahun ke depan. Isu ledakan jumlah penduduk dan khususnya tingkat konsentrasinya di perkotaan sangat penting dicermati mengingat sebagian isu-isu pembangunan lainnya sangat dipengaruhi oleh isu dari dinamika kependudukan ini, bahkan termasuk kultur yang terbentuk.



Untuk memahami lebih lanjut arah kebijakan RPJMN III dalam kerangka integrasinya terhadap kebijakan pembangunan jangka panjang nasional secara keseluruhan, berikut beberapa hasil telaahan isu strategisnya, khususnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan di regional Kalimantan.

Komitmen untuk membangun wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, yaitu: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; prioritas ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; prioritas kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia; prioritas keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; prioritas ketujuh: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Perekonomian wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian terutama perkebunan, dan industri pengolahan; serta sektor perikanan dan kehutanan. Berdasarkan potensi keunggulan wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar pembangunan wilayah Kalimantan:

- Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
- Lumbung energi nasional dengan pengembangan hirilisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan *energy* baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA.
- Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon dan pasir kuarsa.
- Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan



dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hirilisasi komoditas batu bara, serta pengembangan insutri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zircon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun isu strategis nasional terkait **potensi pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sesuai** Lampiran-lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, potensi pengembangan Kota Samarinda yaitu:

1. Berdasarkan Lampiran IX tentang Kawasan Andalan, Kota Samarinda bersama dengan Tenggarong, Balikpapan, Penajam dan sekitarnya membentuk Kawasan Perkotaan yang disebut sebagai Bonsamtebajam, dengan uraian fungsi sebagai berikut:

- I/D/2 : Industri
- II/B/2 : Perkebunan
- I/C/2 : Pertambangan
- II/H/2 : Kehutanan
- II/F/2 : Perikanan
- III/E/2 : Pariwisata

Dengan uraian kode sebagai berikut:

- I-IV : Tahapan Pengembangan
- B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
- B/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan
- C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan



- C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan
- D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
- D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
- E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata
- E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata
- F : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan
- F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan
- H : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan
- H/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

2. Lampiran X tentang Pentapan Kawasan Strategis Nasional, Kota Samarinda bersama dengan Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan menjadi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET SASAMBA) kode (I/A/2).

- I-IV : Tahapan Pengembangan
- A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
- A/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

3.2.3 Penelaahan Isu-isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur

a. Penelaahan terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Timur

Isu strategis Provinsi Kalimantan Timur dapat ditelaah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur yaitu **“Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan yang Berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

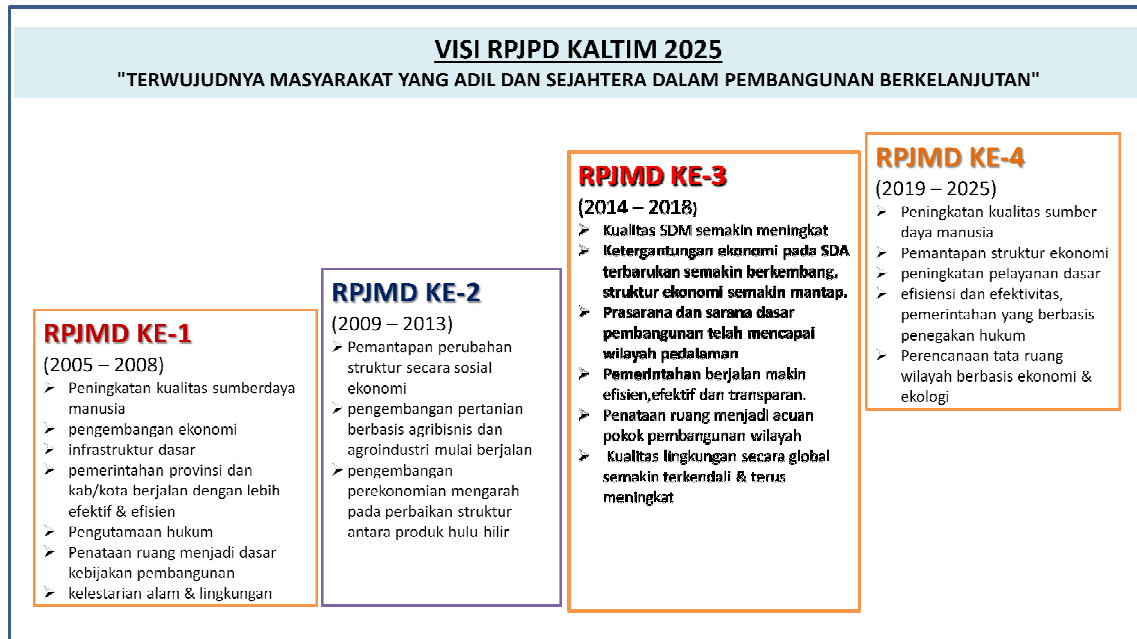
Merujuk kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dibedah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Terwujudnya struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.



Untuk mencapai sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025 maka perencanaan pembangunan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, yang tiap tahapannya dapat menjadi pedoman penyusunan tahapan arah kebijakan RPJPD Kota Samarinda.

Gambar 3.1
Tahapan Dan Skala Prioritas RPJPD Kalimantan Timur 2005-2025



Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018

Dari tahapan-tahapan pembangunan lima tahunan Provinsi Kalimantan Timur di atas khususnya yang berhubungan dengan peran strategis Kota Samarinda adalah menyangkut Kebangkitan Ekonomi yang dijadikan motivasi utama penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam dua periode terakhir. Pada periode RPJMD III sangat jelas ditekankan agar secara keseluruhan wilayah di Kalimantan Timur, tak terkecuali Kota Samarinda agar melakukan transformasi ekonominya yang secara serius dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam primer (tak dapat diperbaharui) dengan beralih pada penciptaan nilai tambah produk primer dan khususnya sumber ekonomi berbasis SDA terbarukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan paradigma ekonomi hijau yaitu ekonomi yang tidak lagi bertumpu pada sektor pertambangan.

b. Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRW Provinsi)

Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Timur adalah terwujudnya penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri



dan energi terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Adapun potensi pengembangan wilayah ruang Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

No	Arahan RTRW Provinsi	Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Andalan	Kawasan andalan Kawasan Bontang – Samarinda - Tenggarong, Balikpapan - Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dengan sektor unggulan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata.
2.	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, Balikpapan.
3.	Hirarki Pelayanan Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan provinsi, 2. Pusat pemerintahan kota, 3. Pusat perdagangan dan jasa regional, 4. Pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa regional, 5. Pusat pelayanan jasa pariwisata, 6. Pusat transportasi darat dan laut regional, 7. Pendidikan tinggi, 8. Pusat pelayanan kesehatan, 9. Pusat siaran dan telekomunikasi, 10. Pusat olah raga skala provinsi, 11. Pengendalian lingkungan kelautan, 12. Pusat pengolahan batubara, 13. Pusat transportasi laut regional dan internasional.
4.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Potensi pengembangan pertanian lahan kering cukup besar sesuai dengan luas lahan potensial yang tersedia di Provinsi Kalimantan Timur, terutama untuk komoditi jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, sayuran, dan buah-buahan. Pengembangan pertanian palawija, hortikultura, dan buah-buahan.
5.	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan kegiatan penangkapan dan budidaya perikanan air tawar.
6.	Kawasan Peruntukan Industri	Arahan pengelolaan kawasan industri pengolahan adalah mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah seperti



No	Arahan RTRW Provinsi	Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda
(1)	(2)	(3)
		pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan.
7.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Rencana pengembangan kegiatan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk menangkap peluang pasar wisata internasional dan domestik. Pariwisata di Samarinda adalah Desa Budaya Pampang dan Pusat taman batik dan tenun; kebun raya; dan pusat kerajinan Citra Niaga.
8.	Kawasan Peruntukan Permukiman	<p>a. Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Kalimantan menekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sistem pusat permukiman tersebut meliputi PKN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki.</p> <p>b. Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kalimantan Timur seluas 82.059 Ha atau 0,43 % dari luas Kalimantan Timur. Bentuk pengelolaan kawasan permukiman antara lain dengan melengkapi sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing, membentuk <i>cluster-cluster</i> permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, pengembangan permukiman perkotaan kecil melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan.</p> <p>c. Kawasan permukiman perkotaan merupakan kawasan permukiman yang mencakup wilayah administrasi kota dan wilayah pengembangan kota. Selain itu, beberapa wilayah yang memiliki indek kekotaan yang tinggi juga berpotensi untuk berkembang menjadi permukiman perkotaan. Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru.2. Pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan. <p>d. Permukiman kawasan khusus meliputi:</p>



No	Arahan RTRW Provinsi	Rencana Pengembangan Wilayah Kota Samarinda
(1)	(2)	(3)
		<ol style="list-style-type: none">1. Kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur;2. Kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi;3. Kawasan pertanian yang tidak layak lingkungan perumahannya, termasuk ketersediaan prasarana dan sarana tidak memadai;4. Kawasan rawan bencana yang mengalami kerawanan lingkungan secara geomorphologis dan geologis, serta adanya kehilangan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan akibat bencana;5. Kawasan industri, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan;6. Kawasan khusus lainnya yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja informal sektoral khusus lainnya, kekumuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang belum memadai.

Sumber: Draft Materi Teknis RTRW Provinsi Kalimantan Timur

3.2.4 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Wilayah Sekitar

Dalam merumuskan isu-isu strategis daerah perlu diperhatikan isu-isu strategis wilayah sekitar karena memiliki karakteristik dan relevansi dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Samarinda. Selain itu, penelaahan isu strategis daerah lain diperlukan karena alasan persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama (khususnya pada daerah-daerah yang letaknya di daerah perbatasan dua wilayah); serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.



Untuk pembangunan Kota Samarinda, penelaahan isu strategis wilayah sekitar adalah dengan melihat kebijakan pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025 yang terurai sebagai berikut:

Tabel 3.7
Identifikasi RPJPD Wilayah Sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara

Periode	Kebijakan Terkait
RPJMD I 2005-2010	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan perumahan.2. Menetapkan standar pelayanan minimum (SPM) untuk pelayanan publik.3. Melakukan revitalisasi pertanian.
RPJMD II 2010-2015	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,2. Pengembangan pertanian dan perkebunan dalam artian luas,3. Peningkatan kepariwisataan.
RPJMD III 2016-2020	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,2. Pengembangan pertanian dan perkebunan dalam artian luas,3. Peningkatan kepariwisataan
RPJMD IV 2021-2025	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,2. Menciptakan daerah pusat pertumbuhan baru,3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah,4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kabupaten.5. Meningkatkan pemanfaatan analisis dampak lingkungan untuk memulai proyek baru

Sumber: RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025

Selain penelaahan isu strategis wilayah sekitar adalah dengan melihat kebijakan pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025, juga dilakukan telaahan dari RTRW kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 9 tahun 2013. Perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah.



Penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, kebijakan penataan ruang adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat huwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun rencana pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang untuk kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Samarinda adalah:

Tabel 3.8
Rencana Pengembangan Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang Berbatasan Langsung dengan Kota Samarinda

NO	KECAM ATAN	RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
1.	MUARA BADAK	<ol style="list-style-type: none">1. PKL berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Kota Samarinda2. PPL yang berada di Desa Badak Baru3. Kawasan Minapolitan4. Pembangunan jalan baru5. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C6. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota dalam kecamatan Muara Badak7. Pengembangan jalur kereta api khusus pertambangan kawasan MuaraBadak (Samboja/ Marangkayu)8. Prasarana Pelabuhan Laut; Pelabuhan Pengumpan (pelabuhan Saliki)9. Pengoptimalan Bandar Udara Khusus di kecamatan10. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera11. Pengembangan Gardu Induk PLTG Sambera12. Pengembangan Satuan Sambungan Telepon (SST)13. Pemanfaatan air bersih untuk kegiatan industri14. Optimalisasi TPA15. Pembangunan TPA16. Kawasan sempadan pantai17. Kawasan sempadan sungai18. Kawasan pantai berhutan bakau19. Kawasan rawan bencana alam; rawan banjir20. Kawasan hutan produksi21. Pertanian lahan basah22. Lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)



NO	KECAMATAN	RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
		<ol style="list-style-type: none">23. Peruntukan kawasan perikanan tangkap24. Peruntukan kawasan perikanan budidaya25. Kawasan pengolahan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)26. Lokasi Industri27. Kawasan Peruntukan Pariwisata buatan (kawasan tambak)28. Penyusunan rencana Rinci Wilayah kabupaten meliputi RDTR Kecamatan Muara Badak
2.	ANGGANA	<ol style="list-style-type: none">1. PKL berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Kota Samarinda2. PPL yang berada di Desa Sungai Meriam3. Kawasan Miniapolitan4. Jalan Kolektor Primer 2 (KP 2) meliputi ruas jalan Samarinda-Anggana5. Rencana jalan dan jembatan menghubungkan Kecamatan Anggana - Kecamatan Sanga-sanga6. Pembangunan Jembatan yang menghubungkan kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga7. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C8. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota dalam kecamatan Anggana9. Prasarana pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan berupa pelabuhan penumpang dan barang meliputi optimalisasi Pelabuhan Meriam Anggana berada di Kecamatan Anggana10. Rencana Pembangunan Pelabuhan Sepatin di Kecamatan Anggana11. Pelabuhan Penyeberangan Anggana - Sanga-Sanga12. Prasarana Pelabuhan Laut; Pelabuhan Pengumpan (pelabuhan Tambora)13. Pemanfaatan air bersih untuk kegiatan industri14. Pembangunan TPA15. Kawasan sempadan pantai16. Kawasan sempadan sungai17. Kawasan pantai berhutan bakau18. Kawasan rawan bencana alam; rawan banjir19. Kawasan Peruntukan hutan produksi tetap20. Pertanian lahan basah21. Lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)22. Peruntukan kawasan perikanan budidaya23. Kawasan pengolahan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)24. Lokasi Industri25. Penyusunan rencana Rinci Wilayah kabupaten meliputi RDTR Kecamatan Anggana
3.	SANGA-SANGA	<ol style="list-style-type: none">1. Jalan Kolektor Primer 2 (KP 2) meliputi ruas jalan Samarinda-Sanga-Sanga2. Ruas Jalan Sanga-sanga- Dondang (Bentuas)3. Pembangunan jalanan baru rencana jalan dan jembatan



NO	KECAMATAN	RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
		<p>menghubungkan Kecamatan Anggana - Kecamatan Sanga-sanga</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pembangunan Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga5. Pelabuhan Penyeberangan Anggana - Sanga-Sanga6. Pemanfaatan air bersih untuk kegiatan industri7. Kawasan sempadan sungai8. Kawasan rawan bencana alam; rawan banjir9. Pertanian lahan basah10. Lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)11. Peruntukan kawasan perikanan tangkap12. Peruntukan kawasan perikanan budidaya13. Lokasi Industri14. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda - Loa Janan - Sanga-Sanga – Muara Jawa - Samboja - Balikpapan (SASAMBA)15. Penyusunan rencana Rinci Wilayah kabupaten meliputi RDTR Kecamatan Sanga-Sanga
4.	TENGGARONG SEBRANG	<ol style="list-style-type: none">1. PKL berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Kota Samarinda2. PKL Tenggarong Seberang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan Tenggarong Seberang dan sekitarnya meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pusat pelayanan perkotaan;b. Pusat transportasi regional dan lokal;c. Pusat pengembangan pertanian;d. Pusat pelayanan pariwisata; dane. Pusat pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas3. PPL Kecamatan Tenggarong Seberang berada di Desa Bangun Rejo4. Pembangunan jalan baru jalan Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Tenggarong Seberang dan/ atau Kecamatan Sebulu;5. pembangunan kembali Jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang6. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C7. Pembangunan Terminal Barang8. Prasarana pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan berupa pelabuhan penumpang dan barang meliputi optimalisasi pelabuhan Pelabuhan Aji Imbut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang9. pengembangan gardu induk Tanjung Batu atau Embalut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;10. Pengembangan Satuan Sambungan Telepon (SST)11. Pemanfaatan air bersih untuk kegiatan industri12. Pembangunan TPA13. Kawasan sempadan sungai14. Kawasan rawan bencana alam; rawan banjir15. Kawasan Hutan Produksi16. Pertanian lahan basah



NO	KECAMATAN	RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
		17. Lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 18. Kawasan peternakan Sapi Potong 19. Kawasan peternakan Unggas 20. Peruntukan kawasan perikanan budidaya 21. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang 22. Penyusunan rencana Rinci Wilayah kabupaten meliputi RTR Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang dan RDTR Kecamatan Tenggarong Sebrang
5.	LOA JANAN	1. PPL Kecamatan Loa Janan meliputi Desa Loa Janan Ulu dan Desa Loa Duri Ilir 2. Ruas jalan Loa Janan – Batas Kota Samarinda 3. Ruas jalan Loa Janan – Batas Kota Tenggarong 4. Peningkatan jalan Arteri primer Loa Janan – Tenggarong 5. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 6. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota meliputi wilayah Loa janan Ulu – Samboja 7. Pengembangan Satuan Sambungan Telepon (SST) 8. Pemanfaatan air bersih untuk kegiatan industri 9. Pembangunan TPA 10. Kawasan sempadan sungai 11. Kawasan taman hutan raya 12. Kawasan hutan produksi 13. Lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 14. Kawasan peternakan sapi potong 15. Kawasan peternakan kambing/ domba 16. Kawasan peternakan unggas 17. Kawasan perikanan budidaya 18. Kawasan wisata alam Taman Agrowisata Batuah 19. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan Ekonomi berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda - Loa Janan - Sanga-Sanga – Muara Jawa - Samboja - Balikpapan (SASAMBA) 20. Penyusunan rencana Rinci Wilayah kabupaten meliputi RDTR Kecamatan Loa Janan

3.2.5 Penelaahan Target Indikator Makro Pembangunan antara Kota Samarinda dengan Kota-kota Besar di Pulau Kalimantan (Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin dan Kota Pontianak)

Sebagai salah satu kota besar di Kalimantan. Kota Samarinda harus mampu bersaing diantara kota-kota besar di Kalimantan. Kota Samarinda memiliki potensi dan letak strategis wilayah sehingga pemberdayaan setiap potensi baik sumber daya



manusia maupun sumber daya alam dapat dioptimalkan. Potensi sumber daya alam Kota Samarinda yang tergolong tinggi dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika digunakan secara bijaksana dan berkelanjutan yang dapat menjadikan Kota Samarinda unggul terhadap kota-kota besar lain di wilayah Kalimantan. Keberhasilan Kota Samarinda unggul di banding kota-kota lain di Kalimantan dapat dilihat pada tingkat ketercapaian indikator utama seperti: IPM, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan index gini.

Tabel 3.9
Target Indikator Utama Pembangunan Kota-Kota Besar di Kalimantan
(menurut RPJPD)

NO	INDIKATOR	KALTIM		KALIMANTAN			
		BALIKPAPAN		BANJARMASIN		PONTIANAK	
		2013	2025	2013	2028	2013	2025
1	IPM	79.87	86.53	75.28	70-80	74.64	80
2	Pertumbuhan Ekonomi	10.12		7.17	> 9.90	5.88	>5
3	Tingkat Kemiskinan	2.48		4.51		5.64	max 5%
4	Tingkat Pengangguran	7.95		5.04		5.35	
5	Index Gini	0.3061		0.370			
6	Jumlah Penduduk	599,685		656,778		587,169	
7	Luas Wilayah	503,3 km ²		98,46 km ²		107,81 km ²	

Sumber: data yang diolah, 2015

Keterangan:

Label ungu: data tidak dicantumkan

Label hijau: no 2 di Kaltim, peringkat 20 besar di Indonesia (tidak mencantumkan angka)

Label biru: rata-rata dari 2005-2011

Label kuning: untuk thun 2012

Label merah: untuk tahun 2011

3.2.6 Penelaahan Isu-isu Strategis Kota Samarinda

Berdasarkan review dari isu strategis nasional (RPJPD dan RPJMN 2015-2019), Provinsi Kalimantan Timur (RPJPD Kalimantan Timur) dan daerah sekitarnya maka Isu Strategis Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2005- 2025, dibagi menjadi tiga isu utama yaitu Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial seperti yang tertera pada bagan dibawah ini:

Gambar 3.2
Pemetaan Isu Strategis Kota Samarinda



Uraian dari ke tiga isu strategis utama Kota Samarinda tersebut kemudian di jabarkan ke dalam isu strategis yang lebih spesifik, sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan

Isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kota Samarinda yang terkait lingkungan adalah terkait pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan dan penanggulangan banjir Kota Samarinda.

a. Pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat *concern* terhadap antisipasi *global warming* terutama untuk mengatasi degradasi lingkungan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Menindaklanjuti hal tersebut, Provinsi Kalimantan Timur merumuskan sebuah gerakan bernama *Kaltim Green* dimana setiap penentuan arah kebijakan harus berfokus pada kelanjutan lingkungan hidup. Berawal dari komitmen terhadap arus pemikiran agar



pembangunan harus menemukan titik tengah antara berbagai kekuatan dan kepentingan yang kerap saling bertolak belakang maka deklarasi *Kaltim Green* dapat dianggap sebagai salah satu cikal bakal transformasi (pergerakan) perekonomian berbasis lingkungan.

Kaltim Green didefinisikan sebagai kondisi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kaltim Hijau menandai dimulainya sebuah proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (*green development*) dengan basis tata guna pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan (*smart environment and smart development*).

Menindaklanjuti perihal tersebut, untuk mendukung terselenggaranya *Kaltim Green*, maka Kota Samarinda harus menjadi barometer wilayah se-Provinsi Kalimantan Timur dalam mendeklarasikan dan merealisasikan pembangunan berkelanjutan terutama dalam pembangunan perekonomian dan sosial. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan daerah yang *concern* terhadap lingkungan hidup beserta realisasi pembangunan berkelanjutan yang selalu dimonitoring dan dievaluasi oleh instansi terkait. Selain itu, perencanaan tata ruang wilayah Kota Samarinda harus berlandaskan asas berkelanjutan pula dengan implementasi peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Samarinda serta mengatasi degradasi kualitas lingkungan hidup yang memasuki status kritis.

b. Penanggulangan Banjir di Kota Samarinda

Penyebab terjadinya banjir di Samarinda ada dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dimaksud adalah topografi wilayah, curah hujan, pasang sungai, banjir kiriman, dll. Faktor alam ini tidak bisa dikendalikan, walaupun bisa memerlukan biaya yang cukup besar. Faktor manusia yang dimaksud adalah pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan peningkatan



kebutuhan infrastruktur seperti pemukiman dan kebutuhan lainnya. Selain itu, diikuti pula peningkatan penyediaan lahan untuk usaha seperti pertanian, perkebunan, maupun industri.

Peningkatan kebutuhan infrastruktur menyebabkan daerah yang semula menjadi daerah resapan air berubah fungsi menjadi pemukiman maupun daerah industri. Daerah resapan air yang berkurang mengakibatkan jika terjadi hujan air yang turun tidak dapat meresap ke dalam tanah melainkan menggenangi dan menyebabkan banjir. Drainase yang buruk juga dapat mengakibatkan banjir. Banjir yang terjadi menghambat aktivitas di Kota Samarinda.

Untuk upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Samarinda maka diperlukan untuk menambah daerah resapan air dan memperbaiki sistem drainase yang ada di Kota Samarinda terutama di daerah rawan banjir

2. Isu Ekonomi

Isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kota Samarinda yang terkait Ekonomi adalah terkait Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samarinda, transparansi tata kelola pemerintahan (*Good Governance* dan *Clean Government*) penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi, Persiapan Kota Samarinda Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan Perwujudan Kota Samarinda menjadi Smart City.

a. Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samarinda

Pertumbuhan penduduk yang terlalu pesat dan tersentralisasi di pusat kota secara simultan telah memberikan beban pengelolaan kota Samarinda. Besarnya tekanan yang dialami menyebabkan kebijakan pengelolaan perkotaan seringkali tidak efisien dan cenderung mengikuti mekanisme pasar yang lebih mengejar tujuan ekonomi jangka panjang dalam pemanfaatan tanah-tanah kota. Ketika pengelolaan kota menjadi beban, dan berdampak pada inefisiensi kinerja pemerintahan (dalam jangka menengah dan panjang) maka opsi pemindahan pusat pemerintahan menjadi opsi yang tidak terelakan.



Berikut merupakan beberapa alasan penting mengenai pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda.

- Gedung/bangunan yang digunakan untuk urusan pemerintahan kurang representatif, selain desain interior/ tata ruang yang belum mencerminkan suatu perkantoran modern, jumlah PNS dan jumlah urusan pemerintahan yang terus bertambah juga mengakibatkan ruangan kantor semakin semrawut karena daya tampung yang tidak mencukupi.
- Lingkungan di sekitar kompleks Balaikota Samarinda telah dikelilingi oleh pusat-pusat keramaian seperti mall, hotel, bank, GOR, dan lain sebagainya. Jarak tempuh yang diperlukan untuk menuju ke pusat keramaian tersebut terbilang cukup dekat. Hal ini mengakibatkan potensi pegawai untuk “mencuri waktu” semakin besar. Selain itu, lingkungan ideal untuk untuk suatu perkantoran apalagi pusat pemerintahan sekaligus sebagai ibukota provinsi adalah lingkungan yang memerlukan ketenangan, kenyamanan, jauh dari kebisingan dan keramaian. Dengan kata lain, idealnya pusat pemerintahan yang identik dengan ibukota sebaiknya dipisahkan dari *image* perdagangan, jasa, maupun industri

b. Transparansi tata kelola pemerintahan

Pemerintahan Kota Samarinda sebagai pelaksana inti perencanaan pembangunan daerah memiliki tugas sebagai agen perubahan menuju sebuah reformasi pemerintahan berupa reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, antisipasi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan pemerintahan, hingga peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur negara terutama pegawai pemerintahan Kota Samarinda. Oleh karena itulah, untuk mencapai *Good Governance* dan *Clean Government* perlu adanya transparansi tata kelola pemerintahan Kota Samarinda untuk menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Samarinda.



c. Penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi

Status sebagai ibukota provinsi menjadikan Kota Samarinda menjadi salah satu kawasan yang paling sering dikunjungi sehingga menjadikan infrastruktur perhubungan mendapat perhatian lebih dalam pengembangannya. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya karena kemudahan akses dari Kota Samarinda ke wilayah sekitar.

Selain itu, Kota Samarinda berada di wilayah strategis Provinsi Kalimantan Timur yakni berada pada salah satu pusat wilayah yang langsung dikelilingi oleh Kabupaten/Kota lain seperti Kota Balikpapan, Kota Bontang, maupun Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut menjadikan Kota Samarinda maupun akses menuju Kota Samarinda harus ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar selaras sesuai dengan pencapaian tujuan pembangunan provinsi. Terpecahkannya kebuntuan koordinasi pusat –provinsi dalam pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda menjadi isu positif bagi pengembangan Kota Samarinda di masa datang

d. Persiapan Kota Samarinda Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara akan menjadi sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat menguntungkan karena produk-produk unggulan Kota Samarinda dapat masuk ke semua negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan pendapatan Kota Samarinda.



Namun, selain keuntungan di atas adapun risiko yang dapat muncul akibat MEA. Risiko yang dapat muncul adalah munculnya *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat mengakibatkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam di Indonesia khususnya Kota Samarinda oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di Kota Samarinda, sedangkan di Indonesia belum ada regulasi yang kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung. Selain *exploitation risk*, risiko yang dapat muncul berikutnya adalah risiko ketenagakerjaan. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Oleh karena itu, dalam menghadapi MEA yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 maka perlu adanya regulasi yang jelas tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah adanya eksploitasi yang berujung kepada rusaknya alam dan adanya peningkatan dari sisi pendidikan dan produktivitas Kota Samarinda untuk menghadapi risiko ketenagakerjaan yang terjadi akibat persaingan yang timbul dari adanya MEA.

e. Perwujudan Kota Samarinda menjadi *Smart City*

Konsep manajemen kota cerdas dipercaya oleh banyak pihak, saat ini, sebagai jawaban oleh berbagai permasalahan kota-kota di Indonesia. Pelayanan masyarakat kota yang kian kompleks dalam manajemen kota cerdas dilakukan dengan mengintegrasikan semua sektor yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti ketersediaan listrik, air bersih, banjir, kemacetan, dan lain-lain. Inisiator *smart city* menegaskan bahwa semua masalah kependudukan dapat diselesaikan melalui integrasi di segala sektor khususnya bantuan infrastruktur teknologi informasi atau *Broadband IT*.

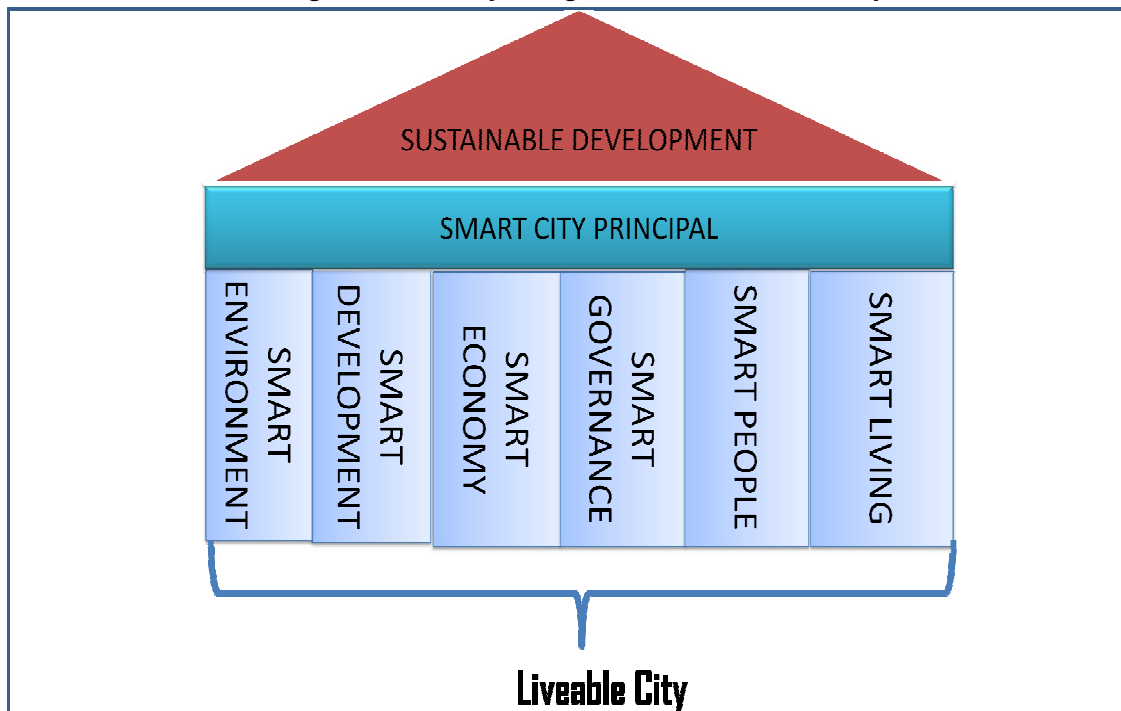
Dalam penanganan (manajemen) kota, Samarinda kini menghadapi kompleksitas antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam karena adanya migrasi, timbulnya pemukiman kumuh, krisis energi, banjir, penurunan kualitas



infrastruktur publik, hingga permasalahan sosial yang semakin kompleks seperti kriminalitas.

Sebagai ibukota provinsi yang mencerminkan “wajah” Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda harus mau dan mampu menapaki jalan menuju *Smart City* di masa datang. Tujuan dari realisasi *Smart City* adalah menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Huni terutama bagi generasi mendatang melalui optimalisasi berbagai hal seperti cerdas berkehidupan (*smart living*), cerdas masyarakat (*smart people*), cerdas tata kelola pemerintahan (*smart governance*), cerdas ekonomi (*smart economy*), cerdas pengembangan (*smart development*), dan cerdas lingkungan (*smart environment*).

Gambar 3.3
Hubungan *Smart City* dengan *Sustainable Development*



Untuk mencapai *smart city*, Kota Samarinda harus tetap memperhatikan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Jika dalam usaha mencapai *smart city* tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan maka lingkungan akan menjadi rusak sebagai akibat dari tidak adanya pembangunan yang berkelanjutan yang tidak memperhatikan lingkungan.

3. Isu Sosial

Isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kota Samarinda yang terkait sosial adalah terkait Pembangunan Kota Samarinda berbasis *gender*, Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah social masyarakat, dan Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.



a. Pembangunan Kota Samarinda berbasis gender

Dalam melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam hal mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan serta tindak lanjutnya dari laporan panel tingkat tinggi (*High-Level Panel of Eminent Person/HLPEP*) perihal pergeseran transformatif pada pelaksanaan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka Kota Samarinda dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah harus memerhatikan faktor kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan sebuah kesamaan kondisi yang didapatkan baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional. Kesetaraan gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Selain kesetaraan gender, terdapat juga keadilan gender yang merupakan sebuah proses menuju perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender ini akan membawa pada sebuah kondisi dimana tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan.

b. Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah sosial masyarakat

Permasalahan perkotaan pada umumnya adalah urbanisasi yang tidak terkontrol oleh pemerintah kotasehingga menimbulkan berbagai efek negatif. Begitu juga dengan Kota Samarinda, sebagai ibukota provinsi yang memiliki daya tarik berupa kelengkapan infrastruktur dasar, pergerakan ekonomi berbagai sektor terutama jasa (perdagangan, akomodasi, dan sebagainya), hingga peluang penciptaan lapangan usaha mikro yang luas, menjadikan Kota Samarinda



bagaikan “gula” bagi para “semut” yang berada di daerah sekitar Kalimantan Timur, bahkan dari luar Pulau Kalimantan.

Peningkatan penduduk yang signifikan karena adanya migrasi jika ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya akan menjadi potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Samarinda. Namun jika sebaliknya, akan menimbulkan permasalahan sosial seperti kriminalitas, munculnya wilayah kumuh, kemacetan, timbunan sampah, hingga penggunaan fasilitas publik tidak pada tempatnya, yang saat ini masih menjadi gambaran umum Kota Samarinda.

c. Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang menjadi sebuah potensi dasar bagi pelaksanaan pembangunan manusia terutama dalam pergerakan roda perekonomian. Oleh karena itu, penting halnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan dan pembenahan sarana prasarana dasar kehidupan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan.

Daya saing sumber daya manusia akan menjadi salah satu penentu utama pembangunan Kota Samarinda dengan tujuan membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Permasalahan dan isu strategis merupakan pijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang saling berkaitan. Untuk mengetahui hubungan permasalahan dan isu strategis perlu adanya kajian berdasarkan *Sustainable Development Aspect* yang terdiri atas tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.10
Hubungan antara Permasalahan dan Isu Strategis Kota Samarinda
menurut *Sustainable Development Aspects*

<i>Sustainable Development Aspects</i>	Permasalahan	Isu Strategis	
Lingkungan	Pembangunan belum berbasis lingkungan	1	Pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan
	Penggunaan Lahan dan Fungsi Sungai Belum Sesuai Tata Ruang	2	Penanggulangan Banjir di Kota Samarinda
Ekonomi	Perekonomian yang belum kuat dan mapan	1	Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samarinda
		2	Transparansi tata kelola pemerintahan (<i>Good Governance dan Clean Government</i>)
		3	Penguatan peran transportasi publik untuk menunjang fungsi Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi
		4	Persiapan Kota Samarinda Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
		5	Perwujudan Kota Samarinda menjadi <i>Smart City</i>
Sosial	Belum terciptanya Kualitas Hidup dan Kesenjangan Sosial	1	Pembangunan Kota Samarinda berbasis gender
		2	Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah sosial masyarakat
		3	Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peran strategis dengan potensi dalam berbagai aspek. Potensi yang menjadi modal dasar tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga wilayah Kota Samarinda yang strategis di pertengahan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada akan banyak permasalahan pembangunan yang dipecahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Kota Samarinda juga akan menjadi barometer bagi Kabupaten/Kota se-provinsi Kalimantan Timur, mengingat posisinya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan, Kota Samarinda dapat menjadi contoh bagaimana menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pernyataan visi dan misi Kota Samarinda dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah akan menjadi pondasi utama dalam penyusunan tahapan-tahapan perencanaan selanjutnya dengan realisasi-realisis arah kebijakan. Peran dari visi dan misi akan meningkatkan daya dorong pencapaian tujuan pembangunan daerah jika mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah, hingga swasta sebagai penggerak pembangunan Kota Samarinda.



4.1 Visi

Kota yang ingin maju harus memiliki visi yang besar demi menyatukan pemikiran dan langkah segenap pihak dalam mewujudkannya. Visi RPJP Kota Samarinda merupakan gambaran atau kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 20 tahun atau sampai dengan akhir tahun 2025. Visi RPJP Kota Samarinda merupakan aspirasi masyarakat Kota Samarinda dan dalam kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi, visi RPJP Kota Samarinda boleh jadi merupakan harapan seluruh komponen pembangunan se- Kalimantan Timur sebagai bagian dari solusi dan antisipasi berbagai isu strategis maupun permasalahan yang dihadapi Kota Samarinda di berbagai bidang. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan jangka panjang pada periode ini akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan pengembangan kota pada tahap pembangunan jangka panjang periode berikutnya.

Sebagai ibukota suatu provinsi yang kerap disebut “provinsi kaya”, merencanakan sekaligus mewujudkan “kota yang layak” adalah suatu keharusan. Menjalani peran strategis tersebut, Kota Samarinda mutlak harus dipandang sebagai perkotaan yang mampu berkembang dan berkelanjutan secara ekologis (*eco-city*) dan berkembang secara berkeadilan (*just-city*) dengan dukungan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (*growth city*) dan pengembangan identitas lokal yang kuat (*urbancultural identity*). Kelayakan kota pada tahapan pembangunan dijadikan sebagai dasar pengembangan, bukan hanya, menjadi kota yang cerdas tetapi menjadi kota yang “cemerlang” di masa datang, sebanding dengan kota-kota besar di dunia.

Namun demikian, mimpi besar tak berarti identitas kota harus tercabut dari akar sejarahnya. Secara ekologis, kehidupan sebagian masyarakat Kota Samarinda yang sangat tergantung pada Sungai Mahakam, tetap menjadi pijakan utama pengembangan “mimpi masa depan kota”. Oleh karena itu, Sungai Mahakam yang membelah kota, tetap menjadi ikon yang melekat pada Kota Samarinda, dan sesuai dengan judul lagu daerah, “Samarinda Kota Tepian Mahakam”.



Visi dan misi Kota Samarinda dirumuskan antara lain dalam kerangka mempersiapkan fondasi pembangunan menuju pengembangan Kota Cerdas (*smart city*) dalam kebijakan pembangunan jangka panjang tahap berikutnya. Dengan adanya persiapan pembangunan kota cerdas ini diharapkan akan menghasilkan perubahan manajemen perkotaan yang mampu memberikan efek positif dalam segala aspek dan bidang kehidupan masyarakat: ekonomi, sosial, budaya, dan keserasian dengan lingkungan hidup. Penyiapan berbagai prasyarat dasar agar Samarinda dapat lebih lanjut menerapkan manajemen kota berbasis *smart city*, salah satu dampak yang diharapkan Kota Samarinda adalah mampu memecahkan satu per satu permasalahan krusial pembangunan yang dihadapi selama ini dengan memaksimalkan segala sumber daya dan potensi dan mampu menggiring masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, visi Kota Samarinda dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan memerhatikan juga kondisi Kota Samarinda saat ini, tantangan pembangunan mendatang, dan modal dasar yang dimiliki. Selain itu, perumusan visi Kota Samarinda juga memerhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 termasuk demi mendukung visi pembangunan Provinsi dan Nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2005-2025 adalah:

**“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI
KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI
KALIMANTAN”**

Visi tersebut dibentuk melalui 3 (tiga) pokok visi yaitu:

1. Teduh dan rapi yang terdepan (aspek lingkungan);
2. Aman yang terdepan (aspek ekonomi); dan
3. Nyaman yang terdepan (aspek sosial).



Dengan menggabungkan antara kata demi kata dan huruf berikut: Te-duh, Rapi, Aman, dan Nyaman maka akan tergabung menjadi kata “TEPIAN” yang terdepan. Kota Tepian yang terdepan inilah merupakan cita-cita dan kota impian bagi masyarakat Kota Samarinda.

Dengan demikian, dengan memadukan pembangunan daerah pada 3 (aspek) yaitu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial diharapkan impian masyarakat terhadap Kota Samarinda ini dapat terwujud. Pengembangan kota dalam jangka panjang pada tiga pokok visi di atas diharapkan tidak saja menjadikan Kota Samarinda sebagai impian warganya, tetapi menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi bahkan di pentas nasional maupun internasional pada periode pembangunan jangka panjang berikutnya.

Makna terdepan juga berhubungan dengan keinginan kuat untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai kota terbaik di tingkat regional Kalimantan pada akhir periode RPJPD. Kota yang terbaik adalah kota yang mampu mewujudkan kehidupan demokratis di tingkat lokal, menciptakan SDM unggul yang menghasilkan masyarakat yang berbudaya unggul serta pemimpin yang berkualitas dan visioner sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih nyata.

Keterkaitan pokok-pokok visi dan visi terlihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar. 4.1

Rumusan Visi dan Pokok-pokok Visi Pembangunan Kota Samarinda



Lebih lanjut, penjelasan dari masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

1. Teduh dan Rapi yang terdepan di Kalimantan

Secara fisik **Teduh** mempunyai perspektif banyaknya pohon-pohon yang rindang sehingga kota menjadi teduh bagi masyarakat dalam melaksanakan kesehariannya. Selain itu, kata Teduh merujuk pada impian masyarakat agar Kota Samarinda mampu memberikan pengayoman kepada masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya baik jasmani maupun rohani secara adil dan merata. Kemudian kata **Rapi**, mengandung makna tertib, indah, dan bersih sebagai cerminan budaya unggul (*culture of excellence*) warga kota dan aparat pemerintahannya. Sehingga, jika kata teduh dan rapi digabungkan membentuk perspektif yang saling mengisi untuk menuju pembangunan lingkungan hidup dan sosial yang sehat dan serasi.



Dengan teduh, pemanfaatan lahan dan fungsi sungai akan sesuai dengan tata ruang di Kota Samarinda. Sehingga permasalahan seperti banjir yang terjadi akan mampu ditanggulangi secara optimal. Sedangkan dengan rapi, diharapkan pembangunan yang semula belum berbasis lingkungan akan berubah menjadi berbasis lingkungan. Pembangunan berbasis lingkungan tersebut akan memberi dampak positif diantaranya adalah pembangunan Kota Samarinda akan lebih memperhatikan faktor lingkungan sehingga lingkungan di Kota Samarinda tidak rusak. Jika teduh dan rapi tercapai diharapkan akan terwujud lingkungan yang sehat dan asri yang sesuai dengan arahan tata ruang.

2. **Aman yang terdepan di Kalimantan**

Kata **Aman** berarti terciptanya suatu situasi dan kondisi dimana setiap warga kota merasa bebas dari ancaman rasa takut dan aman lahir dan batin. Rasa aman akan memberikan efek psikologis yang positif bagi masyarakat dan memberikan kondusivitas bagi warga untuk beraktivitas di berbagai bidang. Dengan hal ini Kota Samarinda akan terkondisi pada situasional yang mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah perekonomian. Dengan terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan terdepan, akan mampu memicu pergerakan perekonomian yang berkembang dengan pesat. Hal ini akan terjadi dikarenakan kondisi dan situasi yang mendukung, sehingga investor tidak ragu untuk masuk dan menanamkan modal di Kota Samarinda. Dengan hal ini, Kota Samarinda akan lebih mantap dalam pembangunan perekonomian dan nantinya akan mempunyai perekonomian yang tangguh dan mampu menjadi fondasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

Tercapainya Kota Samarinda yang aman akan memberi dampak positif dimana semua kegiatan yang dilakukan menjadi lebih optimal dikarenakan dampak dari rasa aman yang ada. Selain itu, pola pikir masyarakat yang semula merasa kurang aman dengan kondisi yang ada akan berubah



menjadi lebih positif sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas akan menguatkan perekonomian yang kemudian menjadi lebih baik dan pro Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy Concept*).

3. Nyaman yang terdepan di Kalimantan

Kota Samarinda yang nyaman dan terdepan merupakan penciptaan efek kesejahteraan yang diharapkan mampu dirasakan seluruh masyarakat Kota Samarinda. Kota yang nyaman ini mengindikasikan masyarakat yang telah terpenuhi segala kebutuhannya dan hidup dengan sejahtera. Hidup dengan nyaman dan sejahtera dapat tercipta dengan adanya keharmonisan pada aspek lingkungan sosial. Dengan lingkungan sosial yang mendukung, akan mampu membuat ikatan persatuan yang kuat. Dengan persatuan yang kuat maka menciptakan Kota Samarinda yang nyaman dan pada akhirnya membuat masyarakat Kota Samarinda mencintai kotanya. Dengan demikian, secara otomatis akan berdampak pada pembangunan daerah yang aktif. Pembangunan daerah yang aktif ini akan menggiring gairah masyarakat untuk turut aktif dalam segala bentuk pelaksanaan pembangunan daerah secara maksimal.

Lingkungan sosial yang baik akan menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat Kota Samarinda. Diharapkan dengan adanya rasa nyaman ini akan tercipta kualitas hidup yang baik serta terciptanya kesetaraan sosial. Sehingga masalah sosial akan dapat ditekan dan sumber daya manusia Kota Samarinda memiliki daya saing yang tinggi.

Visi Kota Samarinda sebagai Kota Tepian yang terdepan memiliki arti bahwa Kota Samarinda harus mampu bersaing dan unggul diantara kota-kota besar lainnya di Pulau Kalimantan, yang dilihat dari pencapaian IPM, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan indeks gini.



Tabel 4.1.
Pencapaian Indikator Utama Pembangunan Kota-Kota Besar
Di Pulau Kalimantan

NO	INDIKATOR	KALTIM		KALIMANTAN	
		Samarinda	Balikpapan	Banjarmasin	Pontianak
1	IPM (2013)	78.79	79.87	75.28	74.64
2	Pertumbuhan Ekonomi (2013)	5,59		7.17	5.88 (2011)
3	Tingkat Kemiskinan (2013)	4.63	2.48	4.51(2012)	5.64 (2012)
4	Tingkat Pengangguran (2013)	8.57	7.95	5.04	5.35 (2012)
5	Index Gini (2013)	0.3115	0.3061	0.370	

Sumber: BPS Pusat Tahun 2014

* warna biru belum terisi

Visi Kota Samarinda “**Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan**” memiliki peran terhadap perwujudan Visi Jangka Panjang Nasional tahun 2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” serta visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yakni “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

4.2 MISI

Misi merupakan sebuah usaha atau upaya umum bagaimana mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga setiap tahapan arah kebijakan terarah menuju satu tujuan yang sama. Misi juga menjadi pondasi pokok sebuah wilayah administrasi didirikan mengingat setiap wilayah administrasi di Indonesia memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan konsistensi bersama oleh para pelaksana pembangunan baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta dalam menjaga stabilitas pelaksanaan misi pembangunan untuk memastikan visi dapat terealisasi sesuai periode yang telah ditentukan.



Perwujudan visi pembangunan Kota Samarinda ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi pembangunan ini merupakan komitmen penentu keberhasilan visi pembangunan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi Kota Samarinda “**Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan**” dibangun sebagai usaha bersama pemerintah kota dan masyarakatnya untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan, penilaian dan langkah pada pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dilandasi dengan semangat persatuan yang kokoh dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang terdepan di Kalimantan.

Pencapaian visi jangka panjang Kota Samarinda yang terwujudnya Kota Tepian dan Terdepan di Kalimantan membutuhkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara sinergis. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi jangka panjang Kota Samarinda dikenal dengan misi. Misi pembangunan Kota Samarinda, sebagai berikut:

Misi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda adalah:

- 1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum**
- 2. Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah**
- 3. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri**

Dimana penjabaran masing-masing misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Misi pertama, Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum**

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dan potensial dalam pembangunan suatu daerah karena sumber daya manusia merupakan



subyek sekaligus obyek pembangunan. Subyek pembangunan mengandung makna bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki andil dan partisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan menurut bidang keahliannya masing-masing. Pelaksana pembangunan oleh masyarakat dalam hal ini sebagian besar dikaitkan dengan pertumbuhan perekonomian wilayah yang menjadi mesin penggerak perwujudan capaian pembangunan daerah.

Sedangkan sumber daya manusia sebagai obyek pembangunan memiliki makna bahwa setiap masyarakat yang hidup di suatu wilayah harus menikmati dan merasakan hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Hasil dari pembangunan daerah harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan adil tanpa memandang status. Tidak boleh ada diskriminasi oleh pelaksana pembangunan dalam memberikan berbagai fasilitas, sarana, maupun prasarana sebagai bentuk keadilan pemerataan hasil pembangunan daerah.

Terkait dengan fungsi sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, maka kualitas dan daya saing setiap individu harus ditingkatkan dari berbagai bidang dari peningkatan derajat kesehatan baik individu, keluarga, maupun lingkungan; peningkatan kualitas pendidikan formal maupun keterampilan/*skill* yang menunjang pengembangan potensi diri; peningkatan perekonomian diri dan keluarga melalui pendapatan yang sesuai untuk mencapai hidup layak; hingga peningkatan modal sosial manusia sebagai bagian dari masyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti akhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter moral individu.

Pada prinsipnya, terdapat hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Tingkat pendidikan serta kondisi kesehatan yang baik memberikan manfaat tidak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan akan meningkatkan kesadaran akan kesehatan, dan kondisi kesehatan yang baik memberikan kontribusi bagi pencapaian pendidikan. Lebih lanjut, pendidikan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin.



Peningkatan pada kesehatan juga memberikan manfaat ekonomis secara signifikan.

Dalam implementasinya, perlu adanya penguatan perekonomian Kota Samarinda berbasis potensi daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan masyarakat dan mengedepankan pembangunan SDM berkualitas serta berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan IPTEK, pembangunan infrastruktur yang maju seperti pengembangan kawasan industri, jasa dan perdagangan serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan representatif.

Selain itu, dalam peningkatan modal sosial masyarakat perlu adanya penguatan jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya suku, dan memiliki kebanggaan sebagai warga Kota Samarinda dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan masyarakat. Dalam hal kepatuhan terhadap hukum, perlu adanya peran pemerintah untuk aktif dalam upaya penegakan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peran masyarakat Kota Samarinda juga diperlukan dalam upaya penegakan hukum karena masyarakat sendiri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum tersebut. Dengan terintegrasinya penegakan hukum yang baik antara pemerintah dan masyarakat Kota Samarinda akan dapat menciptakan penegakan hukum yang adil dan masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Sehingga dengan berjalannya penegakan hukum yang adil dan menjadikan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap hukum akan dapat mewujudkan SDM Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum.



2. Misi Kedua, Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah

Misi kedua ini dirumuskan berdasarkan fenomena terkait perkembangan perekonomian di Kota Samarinda yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang masih fluktuatif sehingga kestabilan perekonomian berdampak pada kestabilan harga barang dan jasa. Oleh karena itu diperlukan suatu misi khusus dalam pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang selain meningkatkan pertumbuhan perekonomian juga mengiringi pertumbuhan perekonomian tersebut dengan kualitas perekonomian yang lebih baik.

Pertumbuhan perekonomian berbasis nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan memberikan kesempatan bagi pemerintah Kota Samarinda dalam menentukan program dan kegiatannya melalui fokus peningkatan PDRB pada sektor-sektor unggulan yang membentuk struktur ekonominya. Sektor unggulan dapat dilihat dari dominasi distribusi pembentukan struktur perekonomian daerah maupun melalui pertumbuhan ekonomi sektoralnya. Perpaduan dua hal tersebut akan lebih optimal lagi dengan melihat karakteristik wilayah dan masyarakat Kota Samarinda agar dapat terjalin keselarasan antara pertumbuhan ekonomi wilayah, kenyamanan kehidupan masyarakat, dan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup. Keselarasan ini juga diikuti dengan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pelayanan dasar bagi masyarakat dan pelaku industri secara optimal akan meningkatkan struktur perekonomian Kota Samarinda.

Pelayanan dasar merupakan hak bagi masyarakat Kota Samarinda. Pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, dll. Pelayanan dasar bagi masyarakat yang merata dan proporsional akan meningkatkan perekonomian Kota Samarinda. merata dalam KBBI mengandung arti menjadikan rata atau menjadikan tersebar ke segenap penjuru, dalam hal pelayanan dasar yang merata berarti pelayananyang tujuannya agar semua masyarakat Kota Samarinda memperoleh pelayanan dasar tanpa terkecuali. Proporsional menurut KBBI mengandung arti



sesuai dengan proporsi atau sesuai dengan bagian, jika dikaitkan dalam pelayanan dasar yang proporsional adalah pelayanan yang sesuai dengan proporsi atau sesuai dengan bagian bagi masyarakat Kota Samarinda. Sehingga pelayanan dasar yang merata dan proporsional adalah pelayanan dasar yang bertujuan untuk menjadikan pelayanan dasar dimiliki oleh semua masyarakat Kota Samarinda tidak terkecuali dan sesuai dengan proporsinya atau bagiannya.

3. Misi Ketiga, Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri

Misi ketiga ini merupakan misi yang harus dilaksanakan sebagai penyempurnaan dua misi sebelumnya namun memiliki keutamaan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perwujudan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan perekonomian yang mantap harus sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Samarinda sehingga kesehatan, keasrian, dan kenyamanan kehidupan masyarakat tetap terjaga.

Dengan melestarikan lingkungan yang sehat, asri dan nyaman diperlukan komitmen menyeluruh oleh segenap elemen pembangunan Kota Samarinda sekaligus konsistensi dalam penerapan dan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan berbasis lingkungan hidup. Sehingga pembangunan dalam bidang ekonomi juga harus beriringan dengan pembangunan dalam bidang lingkungan. Dengan demikian, perlu adanya transformasi ekonomi berbasis sumber daya tidak terbarukan ke sumber daya terbarukan harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju *green economy*. Diharapkan transformasi pembangunan menuju *green economy* akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan ekologi wilayah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan



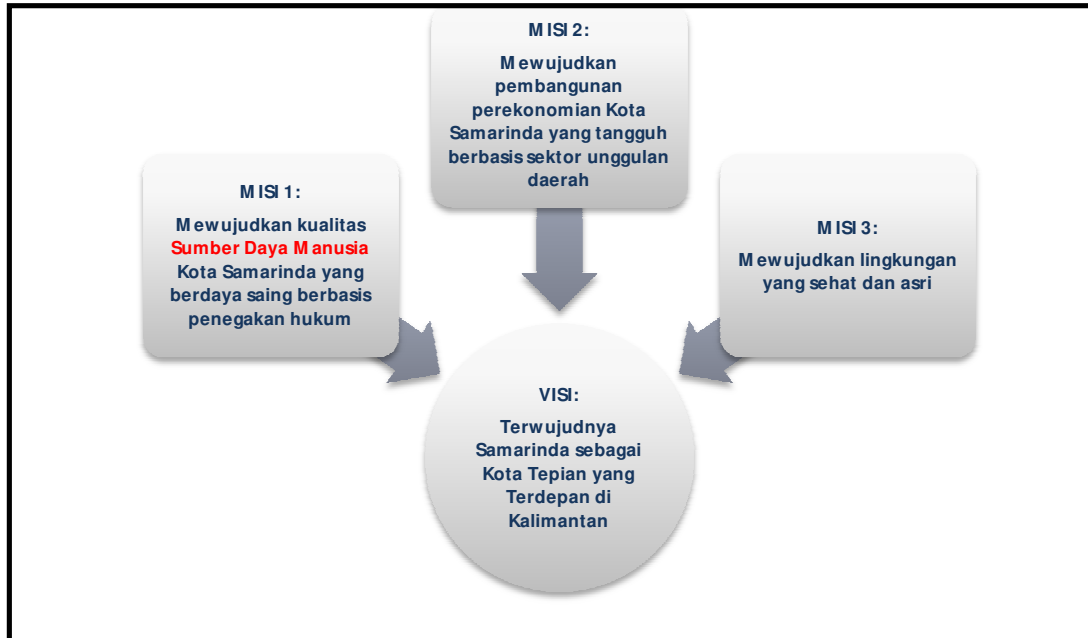
keberlanjutan keberadaan serta kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan cara:

1. Menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi serta upaya konservasi;
2. Pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;
3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan;
4. Pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan; dan
5. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam menangani konflik-konflik sosial, ekonomi, dan politik secara musyawarah, terkendali dan berperikemanusiaan.

Dengan demikian, keterhubungan visi terhadap misi sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diringkas seperti gambar 4.2.berikut ini:

Gambar. 4.2

Keterhubungan Visi Terhadap Misi Kota Samarinda



Dari gambar di atas tampak bahwa dengan fokus pada penyelenggaraan misi merupakan cara lain mewujudkan visi. Sehingga dalam hal ini, tersirat makna bahwa keberhasilan pencapaian visi hanya dapat dilakukan jika seluruh misi dapat berhasil dilaksanakan. Keberhasilan pembangunan **Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Lingkungan** menjadi “*Trigger*” bagi “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan”.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Jangka Panjang Kota Samarinda, ada beberapa dokumen yang harus sesuai atau konsisten dengan isi dokumen yang disusun. Dokumen RPJPD Kota Samarinda harus mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Nasional. Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Samarinda selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.



Tabel 4.2.

Konsistensi Terhadap RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Kota Samarinda

RPJP NASIONAL		RPJP PROVINSI KALTIM		RPJP KOTA SAMARINDA	
VISI	MISI	VISI	MISI	VISI	MISI
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR	1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia	TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN	1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdayasaing berbasis penegakan hukum
	2. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing		2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya		2. Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah
	3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum		3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional		3. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri
	4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu		4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum		
	5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan		5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan		



RPJP NASIONAL		RPJP PROVINSI KALTIM		RPJP KOTA SAMARINDA	
VISI	MISI	VISI	MISI	VISI	MISI
	6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari		pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi		
	7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				
	8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional				



BAB V

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang merupakan cita-cita seluruh pemangku kepentingan daerah yang harus diejawantahkan dalam sasaran dan arah kebijakan. Sasaran dan arah kebijakan akan menuntun pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pembangunan melalui penyelenggaraan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dengan tahapan-tahapan yang rasional dan sesuai isu strategis yang relevan. Sasaran pembangunan perencanaan jangka panjang pada dasarnya adalah dengan menguraikan sasaran pokok di setiap tahapannya. Target kinerja dalam kurun waktu 20 tahun yang dicapai melalui *milestone* 5 (lima) tahunan sesuai dengan arah kebijakan masing-masing tahapan. Sedangkan arah kebijakan pembangunan merupakan agenda yang menjadi fokus pembangunan lima tahunan.

Dasar penyusunan dokumen RPJPD Kota Samarinda, adalah aspek pembangunan berkelanjutan atau disebut *Sustainable Development Aspects*. Aspek-aspek ini meliputi ekonomi, sosial dan lingkungan. Aspek-aspek ini kemudian dijabarkan kedalam permasalahan dan isu-isu strategis. *Sustainable Development Aspects* ini juga menjadi dasar penyusunan misi yang dijabarkan menjadi pokok-pokok visi RPJPD Kota Samarinda. Hubungan *Sustainable Development Aspects* ke dalam penyusunan RPJPD Kota Samarinda, terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.1

Sustainable Development Aspects dalam RPJPD Kota Samarinda

Aspek	Permasalahan	Isu Strategis	Visi	Pokok Visi	Smart City Principles	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran
Lingkungan	Pembangunan belum berbasis lingkungan	1 Pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang berkelanjutan	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan	Rapi yang terdepan di Kalimantan	<i>Smart Environment</i>	Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Adipura
	Penggunaan Lahan dan Fungsi Sungai Belum Sesuai Tata Ruang	2 Penanggulangan Banjir di Kota Samarinda		Teduh yang terdepan di Kalimantan	<i>Smart Development (waterfont development, land use development, water resources development)</i>			
Ekonomi	Perekonomian yang belum kuat dan mapan	1 Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samarinda		Aman yang terdepan di Kalimantan	<i>Smart Government</i>	Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
		2 Transparansi tata kelola pemerintahan (<i>Good Governance dan Clean Government</i>)						
		3 Perwujudan Kota Samarinda menjadi <i>Smart City</i>						
		4 Persiapan Kota Samarinda Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)			<i>Smart Economy (Traffic Management Development)</i>			
		5 Penguatan peran transportasi publik						



Aspek	Permasalahan	Isu Strategis	Visi	Pokok Visi	Smart City Principles	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran
Sosial	Belum terciptanya Kualitas Hidup dan Kesenjangan Sosial							
		1	Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan masalah sosial masyarakat	Nyaman yang terdepan di Kalimantan	<i>smart living</i>	Mewujudkan kualitas SDM Kota Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2	Pembangunan Kota Samarinda berbasis gender					
3	Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing	<i>smart people</i>						



5.1 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Sasaran pembangunan jangka panjang adalah kuantifikasi visi dan misi RPJPD yang menjelaskan target indikator pembangunan jangka panjang pada akhir periode RPJPD. Sasaran akan menunjukkan capaian pokok pembangunan jangka panjang guna menjawab permasalahan pembangunan baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, sasaran dapat menunjukkan wujud nyata dari apa yang dicita-citakan masyarakat dalam pembangunan jangka panjang sesuai visi dan misi yang disepakati bersama.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan tujuan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai pada 20 tahun mendatang. Tujuan pokok dijabarkan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, dan sasaran pokok merupakan langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut. Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran, maka disusunlah indikator pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang.

Sasaran jangka panjang disusun pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya dalam mencapai misi dan visi pembangunan. Pada setiap sasaran RPJPD terdapat indikator sebagai tolok ukur, sehingga pada pencapaian visi, misi ini akan diraih dengan pencapaian pada tiap sasaran dan masing-masing indikator pada sasaran yang terkait. Penjabaran³ (tiga) sasaran dan indikator RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mampu menjamin kehidupan masyarakat dalam lingkungan untuk hidup dengan rasa nyaman, aman, dan tentram dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tercipta kondisi kehidupan yang berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara makro dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu pendidikan, ekonomi (termasuk tingkat pendapatan masyarakat),



dan kesehatan. Ketiga indikator ini akan diformulasikan menjadi sebuah indikator komposit sebagai indeks utama pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang secara umum disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”, diindikasikan pada capaian:

- **Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 76,68 (kondisi 2009) menjadi 81,88 (target 2025).**

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Penguatan perekonomian suatu wilayah merupakan induk dan dasar dari segala aspek pembangunan daerah karena dengan perekonomian yang kuat maka akan mendorong pencapaian segala program pembangunan daerah. Perekonomian daerah merupakan dampak dari aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Semakin kuat perekonomian maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan era globalisasi dan permasalahan yang muncul didalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menjadikan suatu wilayah tidak rentan terhadap aspek-aspek eksternal yang mengguncang perekonomian suatu wilayah. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat harus diarahkan kepada posisi penguatan sektor ekonomi agar perekonomian wilayah (khususnya Kota Samarinda) lebih berkualitas dan berdaya saing. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi”, diindikasikan pada capaian:

- **Pertumbuhan ekonomi dari 4,49 (kondisi 2009) menjadi 6±1 (target 2025)**

3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas hidup masyarakat sangat ditentukan dari tempat lingkungannya. Lingkungan hidup yang baik akan membawa masyarakat tumbuh dengan sehat dan berkualitas. Masyarakat dengan tingkat kesehatan yang tinggi akan dapat beraktivitas secara maksimal dengan gaya hidup yang sehat dan berkualitas. Salah satu indikasi hidup yang berkualitas dapat dilihat dari kualitas lingkungan hidupnya. Wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap kualitas lingkungan hidup adalah melalui penghargaan piala adipura. Adipura merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bagi kota yang berhasil dalam hal



kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kota Samarinda terakhir kali memperoleh penghargaan adipura pada tahun 1995. Pada tahun 2015 Kota Samarinda lolos pada tahap pertama penilaian adipura dengan nilai sebesar 72,3. Kota Samarinda juga masuk nominasi 5 besar untuk kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, beberapa sektor mendapat nilai yang rendah diantaranya sektor pemukiman, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolahan, rumah sakit, hutan kota, taman kota, terminal, pelabuhan, tempat pembuangan akhir sampah dan fasilitas pengelolaan sampah. Sesuai dengan adanya sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, maka pencapaian diindikasikan pada:

- **Nilai Adipuradari 70,90(kondisi 2013) menjadi 74,90 (target 2025)**

Keterkaitan antara indikator sasaran jangka panjang dengan visi dan misi yang ingin dicapai Kota Samarinda dalam 20 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.2
Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJPD

Visi : TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN					
Sasaran	Indikator sasaran	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Yang Berdaya Saing Berbasis Penegakan Hukum					
▪ Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,05	78,64	80,34	81,88
MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Kota Samarinda Yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah					
▪ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6,16	8,02	6±1	6±1



Visi : TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA TEPIAN YANG TERDEPAN DI KALIMANTAN					
Sasaran	Indikator sasaran	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
MISI3 : Melestariakan Lingkungan Yang sehat , Asri dan Nyaman					
▪ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Adipura	61,03	70,90	72,90	74,90

5.2 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Sasaran pembangunan 20 tahunan untuk mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah dirinci berdasarkan prioritas masing-masing sasaran pada setiap tahapan pembangunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian suatu indikator kinerja sasaran pokok.

Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, kurun waktu RPJP Daerah mengikuti atau sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan, perodesasi RPJMD tidak dapat mengikuti perodesasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden.

Pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan menurut perodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tahap RPJMD Kota Samarinda sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Samarinda Tahap I (2005-2010);
2. RPJMD Kota Samarinda Tahap II (2010-2015);



3. RPJMD Kota Samarinda Tahap III (2016-2021) dan
4. RPJMD Kota Samarinda Tahap IV (2021-2025).

Periodisasi di atas dalam pelaksanaannya, dapat menyesuaikan dengan jadwal pemilihan dan atau pelantikan walikota sehingga dimungkinkan adanya pergeseran waktu dengan memerhatikan waktu pelantikan walikota di satu sisi dan cakupan kebijakan RKPD yang menjadi tanggung jawab walikota selama menjabat di sisi lain.

Setiap tahap RPJPD Kota Samarinda memiliki prioritas dengan target tertentu setiap tahunnya. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan perencanaan daerah memiliki perbedaan, namun rangkaianannya memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

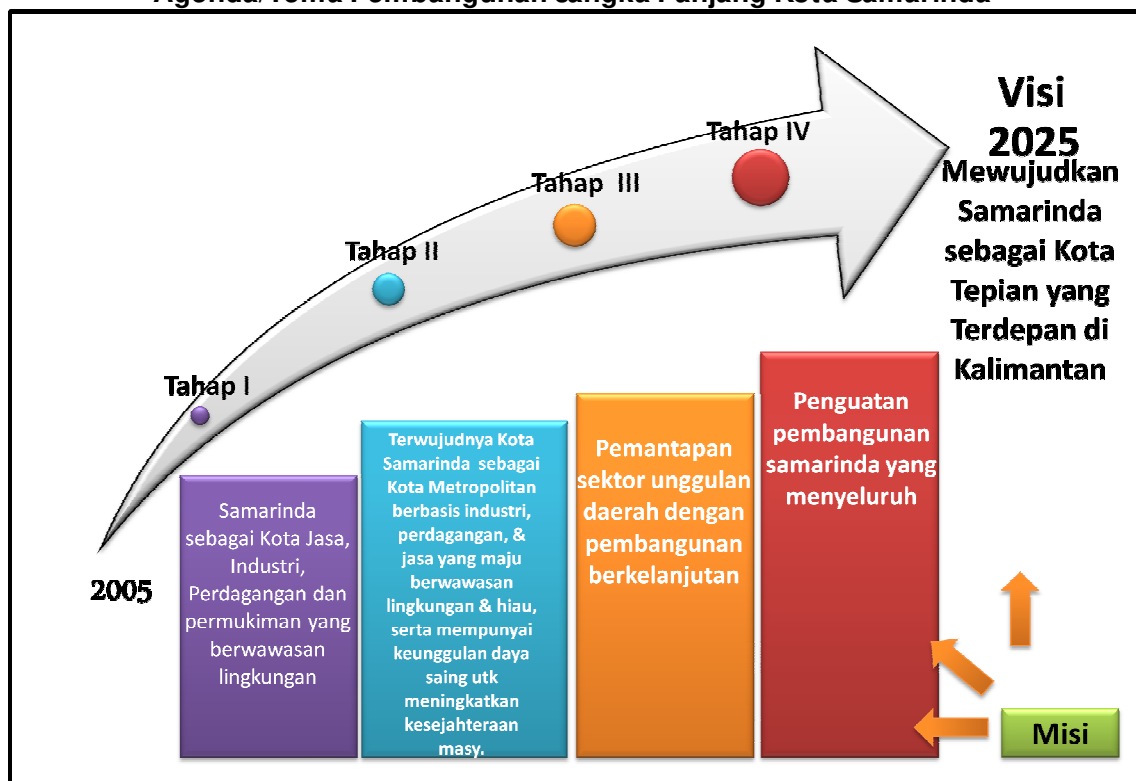
Prioritas perencanaan pembangunan tertuang dalam sasaran, sasaran pokok dan target pencapaian masa depan pada waktu tertentu yang mencerminkan urgensi permasalahan berdasarkan sumber daya dan batas waktu. Selanjutnya, dengan dasar sasaran pembangunan dan analisis strategis jangka panjang maka ditetapkan tema dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing tahap perencanaan pembangunan daerah.

Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun Kota Samarinda ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan. Tema pertama untuk mengawali pembangunan Kota Samarinda adalah “Samarinda sebagai kota jasa, industri, perdagangan dan permukiman yang berwawasan lingkungan” dengan tema ini pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan tahap-tahap selanjutnya.

Samarinda sebagai kota metropolitan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis sektor unggulan daerah yang berwawasan lingkungan merupakan tema pembangunan selanjutnya yang diikuti dengan tema “pemantapan sektor unggulan daerah dengan pembangunan berkelanjutan” pada tahap

selanjutnya. Untuk memenuhi hal tersebut perlu adanya upaya-upaya perbaikan kualitas infrastruktur keseluruhan wilayah Kota Samarinda sehingga prasyarat dasar SDM, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan dapat dicapai. Tahap terakhir pada rencana jangka panjang adalah penguatan pembangunan Samarinda yang menyeluruh. Pembangunan 5 (lima) tahunan Kota Samarinda diharapkan dapat menciptakan masyarakat Samarinda yang sejahtera dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain sehingga akan tercapai visi pembangunan jangka panjang yang “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan” .

Gambar 5.1
Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kota Samarinda



Arah kebijakan pembangunan di setiap tahapan beserta prioritasnya selama 20 (dua puluh) tahun pembangunan Kota Samarinda diuraikan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMD) Tahap I

Pembangunan tahap pertama merupakan pondasi awal pembangunan dalam perubahan penyelenggaraan sistem kinerja pemerintah. Arah kebijakan ini diharapkan mampu membangun pondasi yang kuat dengan sistem pemerintahan



yang profesional sehingga akan membantu proses pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan tahap pertama memiliki tema sebagai berikut:

**“SAMARINDA SEBAGAI KOTA JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN
PERMUKIMAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Salah satu titik pondasi awal pembangunan adalah mengupayakan dan mengembangkan segala bentuk potensi daerah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sehingga penyelenggaraan dan pusat kegiatan sebagian besar berada di Kota ini. Samarinda berkembang menjadi pusat jasa, industri dan perdagangan serta permukiman di Kalimantan Timur. Perkembangan ini disebabkan oleh kedudukan Kota Samarinda sebagai Ibu kota provinsi Kalimantan Timur, dan secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis terletak di antarakabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, secara paralel Samarinda menjadi daya tarik luar biasa terhadap migrasi penduduk dari berbagai penjuru daerah di Kalimantan Timur bahkan dari luar Kalimantan Timur, berbagai suku bangsa, bahkan dari berbagai negara.

Kota Samarinda dalam perkembangannya menunjukkan pergerakan cenderung positif walaupun masih belum stabil pada sektor jasa, industri, perdagangan dan permukiman. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahap pertama ini Kota Samarinda akan membangun pondasi yang kuat pada sektor tersebut. Dengan demikian, perekonomian akan tumbuh semakin kuat dan mampu menyokong untuk pembangunan sektor-sektor yang lain. Penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah Kota Samarinda pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I diarahkan kepada perwujudan Samarinda sebagai kota jasa, industri, perdagangan dan permukiman yang berwawasan lingkungan melalui arah kebijakan sebagai berikut:



1. Peningkatan kesadaran pendidikan bagi masyarakat

Untuk mencapai sasaran pokok meningkatnya angka melek huruf salah satunya dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran pendidikan bagi masyarakat dilakukan dengan cara memberi pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi mereka. Setelah masyarakat sadar betapa pentingnya pendidikan bagi mereka maka kesadaran masyarakat akan pendidikan akan meningkat sehingga sasaran pokok meningkatnya angka melek huruf dapat tercapai seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan.

2. Penyiapan SDM yang mampu menyerap pasar kerja

Untuk menghadapi persaingan global maka diperlukan SDM yang mampu untuk bersaing dalam persaingan tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi persaingan global salah satunya dengan penyiapan SDM yang mampu menyerap pasar kerja sehingga SDM tersebut dapat memasuki persaingan global tersebut. Dengan penyiapan SDM tersebut maka angka melek huruf pun akan bertambah karena pada umumnya orang yang mampu baca-tulis memiliki prospek meraih peluang kerja lebih baik.

3. Pengembangan usaha produktif yang mendorong perekonomian masyarakat

Dalam mendorong perekonomian masyarakat perlu dikembangkannya usaha yang produktif. Dengan dikembangkannya usaha yang produktif, maka perekonomian masyarakat akan meningkat. Peningkatan perekonomian akan menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat pula. Sehingga peningkatan tersebut akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

4. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur

Kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan aparaturnya kepada masyarakat. Namun, masih banyak ditemui keluhan-keluhan dari masyarakat dan belum ditanggapi secara keseluruhan atas keluhan tersebut. Maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah mempunyai kebijakan untuk menambah jumlah aparaturnya sehingga keluhan yang



jumlahnya banyak dari masyarakat dapat ditangani. Kemudian untuk menangani keluhan dengan baik maka ditingkatkan juga manajemen dari aparat pemerintah.

5. Peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi sektor Unggulan

Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat salah satunya disebabkan oleh masih fluktuatifnya tingkat inflasi di Samarinda. Inflasi secara umum disebabkan oleh kurang tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sedangkan permintaan untuk barang-barang pokok tersebut sangat tinggi sehingga menyebabkan inflasi. Untuk mengurangi tingkat inflasi yang terjadi maka diperlukan peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Dengan meningkatnya percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan maka kebutuhan akan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dapat sebagian besar terpenuhi sehingga harga dari kebutuhan pokok masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

6. Peningkatan aksesibilitas penunjang sektor unggulan dan pemukiman

Indeks gini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau menunjukkan sejauh mana tingkat pendapatan tidak merata. Indeks Gini yang dimiliki Samarinda termasuk relatif sedang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingkat pendapatan yang tidak merata dalam keadaan sedang. Untuk menurunkan kesenjangan tersebut maka perlu adanya peningkatan aksesibilitas penunjang sektor unggulan dan pemukiman. Dengan semakin terjangkaunya akses dari sektor unggulan dengan pemukiman masyarakat maka akan semakin cepat atau lancar jalur distribusi hasil dari sektor unggulan tersebut ke pemukiman masyarakat sehingga dengan akses yang meningkat maka hasilnya dapat dinikmati ke seluruh wilayah. Dengan demikian indeks Gini yang menunjukkan kesenjangan pendapatan tersebut dapat menurun akibat pendapatan yang semakin merata.



7. Peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran lingkungan

Sektor unggulan di kota Samarinda salah satunya adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan bagi kota Samarinda merupakan sektor penyumbang pendapatan daerah terbesar karena banyak lokasi pertambangan yang berada di sekitar kota Samarinda. Dengan berkembangnya sektor industri pengolahan ini maka pencemaran udara di kota Samarinda ikut meningkat. Oleh karena itu, perlunya untuk menurunkan pencemaran udara di kota Samarinda. Peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran lingkungan adalah cara untuk menurunkan pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, proses produksi yang lebih ramah lingkungan, dan menggunakan teknologi untuk mengurangi gas-gas yang menyebabkan pencemaran udara. Dengan mengefektifkan pengendalian pencemaran udara tersebut maka pencemaran udara akan turun.

b. Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMD) Tahap II

Pembangunan tahap kedua merupakan kelanjutan pembangunan tahap I. Sehingga pada tahap kedua ini arah kebijakan diharapkan mampu melanjutkan arah kebijakan pada tahap I. Sehingga nantinya akan tercipta pembangunan yang berkesinambungan dengan pondasi kuat yang telah terbangun pada tahap I. Dengan hal tersebut, pembangunan tahap kedua memiliki tema sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLIS BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN HIJAU SERTA MEMPUNYAI KEUNGGULAN DAYA SAING UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”



Pembangunan pada tahap pertama merupakan pembangunan pondasi dasar sebagai persiapan pembangunan tahap kedua. Pada tahap kedua ini pembangunan lebih menekankan pada penguatan konstruksi pengembangan kota yang berkualitas dan pembangunan sektor lain yang memperkuat pembangunan pada sektor unggulan daerah, tanpa mengurangi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan dilandaskan pada tiga fokus pokok pembangunan daerah yaitu pembangunan industri maju, perdagangan dan jasa.

Pembangunan dan pengelolaan 3 sektor pembangunan diatas semata-mata diarahkan pada penguatan daya saing Kota Samarinda dalam bidang tersebut. Daya saing tersebut hendaknya didukung dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan segala kompetensinya menjawab tantangan global. Jika sumber daya Kota Samarinda telah mampu bersaing dalam pergulatan perekonomian global, secara otomatis peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dengan mudah tercapai. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring dengan perkembangan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan. Penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah Kota Samarinda pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahap kedua diarahkan kepada perwujudan Kota Samarinda sebagai kota metropolis berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Membangun regulasi investasi dibidang industri yang menarik investor dan bersifat adil bagi kepentingan daerah

Industri di Kota Samarinda yang cukup dominan adalah industri pengolahan. Industri pengolahan selama bertahun-tahun adalah salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah terbesar di Kota Samarinda. Sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk sektor industri di Kota Samarinda yang nantinya dapat menarik investor agar dapat mengembangkan industri ini kedepannya. Tidak hanya menarik investor, regulasi ini diharapkan mampu untuk memberikan return yang adil tidak hanya untuk investor namun juga adil bagi



kepentingan daerah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda.

2. Pengembangan sistem pengelolaan tata ruang, pelestarian lingkungan (khususnya yang menyangkut rehabilitasi tambang) dan pengelolaan keindahan kota

Rehabilitasi adalah sebuah proses yang terintegrasi dan membutuhkan waktu. Pelestarian lingkungan khususnya yang menyangkut rehabilitasi tambang di Kota Samarinda merupakan proses yang terintegrasi dari pengembangan sistem pengelolaan tata ruang hingga pengelolaan keindahan kota yang memiliki tujuan dengan pengembangan sistem pengelolaan tata ruang pelestarian lingkungan dan pengelolaan keindahan kota akan meningkatkan keindahan Kota Samarinda. Misalnya dengan sungai yang tercemar akibat pembuangan limbah pertambangan, maka akan dikembangkan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang ada di sungai. Pengelolaan limbah tersebut merupakan salah satu cara pelestarian lingkungan. Dan dengan pengelolaan keindahan kota yang baik maka dengan proses mengembangkan pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan sungai serta pengelolaan keindahan akan meningkatkan keindahan Kota Samarinda.

3. Percepatan pengadaan sarana dan prasarana tata kelola kota yang mampu menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah percepatan pengadaan sarana dan prasarana tata kelola kota. Dengan sarana dan prasarana yang mampu disediakan secara cepat akan dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan Kota Samarinda sehingga PAD Kota Samarinda akan meningkat pula.



4. Percepatan penanggulangan banjir melalui tindakan preventif, rehabilitasi dan peningkatan kualitas perencanaan tata kota serta penanggulangan kebakaran melalui sistem terpadu

Percepatan penanggulangan banjir di Kota Samarinda dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan tindakan preventif, rehabilitasi dan peningkatan kualitas perencanaan tata kota serta penanggulangan kebakaran melalui sistem terpadu. Cara preventif dapat dilakukan dengan reboisasi lahan-lahan terdegradasi dan penghijauan, sedangkan rehabilitasi dan peningkatan kualitas perencanaan tata kota dapat dilakukan dengan membenahi drainase kota dan perbaikan atau pembersihan gorong-gorong dari sampah serta perencanaan daerah resapan air yang mulai berkurang. Untuk penanggulangan kebakaran dapat dilakukan dari tata kota yang baik misalnya perbaikan hydrant air untuk memudahkan jika terjadi kebakaran di Kota Samarinda.

5. APBD yang pro poor (melalui 4 kluster) dan pro job

APBD diarahkan pada 4 kluster yaitu (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi (pro growth); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (pro poor); (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). APBD pro poor dapat dipahami sebagai APBD yang memihak orang miskin. Dengan demikian APBD pro poor adalah kebijakan APBD yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Samarinda sehingga hak-hak dasarnya dapat terpenuhi melalui program-program yang dirancang dalam APBD. Sedangkan APBD yang pro job dimaksudkan untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Samarinda untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda.



6. Peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi tahunan

Dalam mendorong perekonomian masyarakat Kota Samarinda perlu ditingkatkannya kehidupan masyarakat yang lebih produktif. Dengan meningkatnya kehidupan masyarakat yang lebih produktif, maka perekonomian masyarakat akan meningkat. Peningkatan perekonomian akan menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat pula. Sehingga peningkatan tersebut akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

7. Pencapaian IPM yang tinggi dibandingkan daerah sekitar

IPM adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui apakah SDM di Kota Samarinda berkualitas atau tidak. Dengan pencapaian IPM yang tinggi dibandingkan daerah sekitar maka dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Samarinda lebih baik dari daerah sekitarnya. Dampak yang dimiliki dari kualitas SDM yang baik adalah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda lebih baik.

8. Percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur termasuk infrastruktur dasar listrik, air bersih, perumahan dan semenisasi gang, yang telah direncanakan dalam kebijakan tata ruang

Kebijakan tata ruang adalah kebijakan Kota Samarinda dalam mengelola tata ruang kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan tata ruang tersebut telah direncanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur termasuk infrastruktur dasar listrik, air bersih, perumahan dan semenisasi gang. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut hendaknya segera dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan dalam kebijakan tata ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda. Dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut maka kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar diharapkan mampu terpenuhi sehingga kemudian mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.



9. Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama investasi dan pemanfaatan pasar modal, dalam upaya menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari sektor swasta dan memanfaatkan sumber daya lainnya khususnya sumber daya migas dan sumur marginal

Kerjasama investasi dan pemanfaatan pasar modal saat ini adalah salah satu faktor yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Dengan memanfaatkan kerja sama investasi dengan pihak swasta dan memanfaatkan pasar modal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda. Selain itu Kota Samarinda dapat memanfaatkan sumber daya migas yang ada dan kembali menghidupkan sumur-sumur pengeboran minyak yang tua atau sumur marginal di Kota Samarinda untuk meningkatkan percepatan perekonomian di Kota Samarinda.

10. Peningkatan dan proporsionalitas antara sektor industri, pertanian dan UMKM melalui penyediaan modal, pelatihan dan peningkatan prasarana dan sarana pemasaran produk

Untuk meningkatkan PDRB selain peran pemerintah maka peran swasta pun sangat penting agar pemerintah dapat berkonsentrasi pada perbaikan sektor lain. Peran serta masyarakat dan swasta sangat penting untuk mendukung sektor jasa, industri, perdagangan, dll. Peningkatan peran serta swasta dalam mendukung sektor unggulan daerah akan meningkatkan kontribusi sub sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB.

11. Pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijaksanaan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan mereka. Kewajiban menjaga dan memelihara alam berlaku pada semua komponen yang ada dalam masyarakat. Di sinilah letak perbedaan antara lembaga formal dan masyarakat adat dengan kearifan



lokalnya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pengembangan kearifan lokal di Kota Samarinda di bidang perekonomian, politik, sosial maupun budaya sangat penting karena hal-hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Untuk mengakomodasi kearifan lokal dalam kebijakan pemerintah Kota Samarinda menyangkut pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi benturan kepentingan perlu adanya pembelajaran dan pencerahan tentang kebijakan tersebut kepada masyarakat adat yang ada di Kota Samarinda sehingga pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal dapat terlaksana dengan baik.

12. Pembangunan masyarakat yang berdaya dan berbudaya berbasis pembangunan masyarakat

Untuk membentuk SDM yang berdaya dan berbudaya diperlukan pendidikan memerlukan pendidikan yang bermutu dan memiliki daya saing yang baik dengan menjunjung kebudayaan. SDM yang profesional dibentuk melalui pendidikan bermutu dan SDM yang religius dibentuk melalui pengetahuan mengenai ilmu agama. Pengembangan SDM yang profesional dan religius membutuhkan pendidikan yang baik sehingga akan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.

13. Reformasi birokrasi termasuk didalamnya perencanaan kebutuhan aparatur sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi, yang menunjang penciptaan daya saing ekonomi dan pelayanan prima

Kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Samarinda dan aparaturnya kepada masyarakat. Namun, masih banyak ditemui keluhan-keluhan dari masyarakat dan belum ditanggapi secara keseluruhan atas keluhan tersebut. Maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah mempunyai kebijakan untuk memiliki target-target dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memiliki target tersebut maka akan dapat terlihat bagaimana kinerja aparatur dalam pencapaian target tersebut. Sehingga dengan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur.



14. Pengimplementasian ICT untuk Pelayanan Publik

Di era globalisasi ini sudah menjadi tuntutan agar pelayanan publik harus memenuhi beberapa unsur seperti transparan, cepat, tanggap, berkualitas, dan biaya yang terjangkau. Kemajuan teknologi saat ini mengubah pola-pola pelayanan tradisional menjadi modern khusus pada daerah maju, dimana setiap layanan sudah berbasis *Information Communication Technology* (ICT), untuk memenuhi kebutuhan layanan bagi masyarakat umum. Pengimplentasian sistem ICT bagi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara menyeluruh.

c. Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMD) Tahap III

Pembangunan tahap ketiga merupakan kelanjutan pembangunan tahap II. Sehingga pada tahap ketiga ini arah kebijakan diharapkan mampu melanjutkan arah kebijakan pada tahap II.

Pembangunan tahap ketiga ini mempunyai target pembangunan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- Sosial

Target untuk bidang sosial dapat dilihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui IPM. Untuk tahap ketiga ini IPM ditargetkan sebesar 80,34. IPM dipengaruhi oleh indikator lain diantaranya angka melek huruf yang ditargetkan 100% rata-rata lama sekolah 11,21 tahun dan angka harapan hidup 73,44 tahun.

- Lingkungan

Untuk target di bidang lingkungan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diketahui dari nilai adipura. Nilai adipura yang ditargetkan adalah 72,90. Nilai adipura dipengaruhi oleh beberapa indikator lain seperti persentase ruang terbuka hijau minimal $\geq 10\%$, persentase kesesuaian guna lahan yang sesuai dengan RTRW minimal $\geq 30\%$ dan jumlah lokasi banjir dari semula 50 titik menjadi 40 titik.



- Ekonomi

Target bidang ekonomi dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi minimal 6 ± 1 . Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh indikator lain diantaranya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB, untuk sektor perdagangan sebesar 46% sedangkan sektor jasa sebesar 12,72% angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 3,67 dan menurunnya tingkat inflasi menjadi 5%

Sehingga akan tercipta pembangunan yang berkesinambungan dan mampu mengatasi kekurangan pembangunan pada tahap II. Dengan hal tersebut, pembangunan tahap ketiga memiliki tema sebagai berikut:

“PEMANTAPAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”

Pembangunan pada tahap ketiga ini pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan sektor unggulan yang berkelanjutan. Pada tahap ini, diharapkan sektor-sektor unggulan daerah lebih menggeliat dan lebih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah dengan diiringi pembangunan yang berkelanjutan. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan dalam perekonomian di Kota Samarinda dimana kontribusi struktur perekonomian dalam pembentukan PDRB paling tinggi. Selain itu sektor lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda adalah sektor industri dan jasa. Dengan besarnya arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk Kota Samarinda, perdagangan dan pusat perbelanjaan dengan memfokuskan pada komoditi andalan lokal Kota Samarinda merupakan sumber ekonomi yang sangat besar. Selain itu, sektor industri mengacu pada asas pembangunan yang berkesinambungan dan menjaga kelestarian lingkungan.



Pada arah pembangunan ketiga ini, *smart city concept* mulai diterapkan di Kota Samarinda. *Smart city concept* digunakan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kota Samarinda. Tujuan *smart city* adalah untuk membentuk kota yang Sustainable atau berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan). Konsep *Smart City* yang akan dilaksanakan di Kota Samarinda mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan maupun dalam memberikan tanggapan terhadap program pembangunan yang sedang berjalan. Di tahun-tahun selanjutnya, diharapkan konsep *smart city* mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan maupun dalam memberikan tanggapan terhadap program pembangunan yang sedang berjalan. Selain *smart city concept*, Pemerintah Kota Samarinda juga mulai melakukan persiapan pemindahan pusat Pemerintahan Kota Samarinda ke Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman.

Penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah Kota Samarinda pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahap ketiga diarahkan kepada pemantapan sektor unggulan daerah dengan pembangunan berkelanjutan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas profesionalisme manajemen pendidikan

Rata-rata lama sekolah masyarakat kota Samarinda adalah 9 sampai 10 tahun. Ini menjadi indikator keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun di kota Samarinda. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas profesionalisme manajemen pendidikan. Kualitas guru sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan. dengan meningkatnya kualitas profesionalisme manajemen pendidikan maka angka rata-rata lama sekolah akan meningkat juga.

2. Peningkatan profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu pelayanan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan pelayanan yang baik maka kesehatan masyarakat akan lebih baik pula. Di kota Samarinda persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dari yang ditolong oleh



dukun bayi, famili, atau lainnya. Ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam manajemen pelayanan kesehatan diakui oleh masyarakat. Sehingga perlu ditingkatkan lagi profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan agar kebutuhan masyarakat akan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.

3. **Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah**

Maraknya kasus korupsi membuat masyarakat menjadi apatis terhadap kinerja aparat pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah yang dirasa kurang baik oleh masyarakat menjadikan pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin buruk. Maka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparat dibutuhkan peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas dari kinerja aparat. Dengan pengelolaan yang baik maka kinerja aparat tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau akuntabel.

4. **Pertumbuhan produk perdagangan daerah**

Dilihat dari kontribusi atau distribusinya, peranan terbesar dalam pembentukan nilai PDRB Kota Samarinda salah satunya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada sektor dominan PDRB yakni sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencapai 10,91 persen. Dengan meningkatnya pertumbuhan produk perdagangan daerah maka akan meningkatkan pula kontribusi sub sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB.

5. **Peningkatan manajemen perkotaan menuju *smart city***

Konsep *Smart City* yang diterapkan oleh Pemerintahan Samarinda terdiri dari *Smart Environment*, *Smart Development*, *Smart Economy*, *Smart Governance*, *Smart people*, dan *Smart Living*. Diharapkan konsep *Smart City* ini menjadi solusi permasalahan di Kota Samarinda. Dengan meningkatkan manajemen perkotaan menuju *Smart City* maka permasalahan perkotaan dapat diatasi.



6. **Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam kemandirian berusaha**

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan perlu adanya pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam kemandirian berusaha. Pemberdayaan tersebut dengan cara mengadakan pelatihan untuk UKM dan usaha kecil lainnya. Pemberian bantuan modal juga dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mandiri dalam hal modal.

7. **Peningkatan ekspor komoditi unggulan**

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan maka dibutuhkan untuk peningkatan pendapatan kota Samarinda. Untuk meningkatkan pendapatan salah satunya dengan peningkatan ekspor komoditi unggulan. Dengan meningkatkan ekspor tersebut maka pendapatan Kota Samarinda akan bertambah. Pendapatan yang bertambah mengakibatkan turunnya tingkat kemiskinan kota Samarinda.

8. **Perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu**

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Tingkat kemiskinan di Samarinda disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingginya inflasi, banyaknya migrasi dari daerah luar Kota Samarinda serta pertumbuhan penduduk. Untuk melindungi warga masyarakat Kota Samarinda yang berada dalam kategori garis kemiskinan maka pemerintah Kota Samarinda memberi perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Samarinda.

9. **Peningkatan kualitas dan akses tenaga kerja**

Besarnya tingkat pengangguran bisa disebabkan karena tenaga kerja kota Samarinda yang ada tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat bersaing dengan tenaga kerja daerah lain sehingga tingkat pengangguran bisa berkurang. Selain itu, diperlukan akses tenaga kerja yang baik untuk menurunkan tingkat pengangguran.



10. Pengarustamaan gender

Pengarustamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini pengarustamaan gender di Kota Samarinda adalah untuk menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sebuah pekerjaan atau perempuan boleh bekerja. Dengan pengarustamaan gender ini perempuan yang tadinya tidak bekerja dalam suatu bidang jadi bisa bekerja karena ada kebijakan atau strategi ini. Jadi dengan pengarustamaan gender yang ada di Kota Samarinda ini dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada.

11. Pembinaan Keluarga Berencana

Salah satu upaya untuk menekan jumlah penduduk adalah dengan keluarga berencana. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk memberikan jarak kelahiran anak dan membatasi jumlah anak dalam keluarga. Keluarga berencana merupakan suatu proses perubahan sikap hidup masyarakat, maka itu perlu adanya pembinaan keluarga untuk mendorong ke arah hidup berkeluarga kecil. Pembinaan dan pengenalan tentang Keluarga Berencana dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan keluarga berencana.

12. Optimalisasi Tata Kelola Jalan Raya

Kemacetan merupakan permasalahan yang menjadi fokus pemerintah Samarinda untuk segera dicari solusinya. Diperlukan upaya penataan jalan raya untuk mengatasi kemacetan. Pengelolaan jalan raya dimulai dari penataan rambu-rambu lalu lintas dan penataan lahan parkir yang menjadi akar masalah dari kemacetan di Samarinda. Selain itu juga perlu adanya regulasi yang mengatur tata kelola jalan raya di Samarinda.



13. Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman

Samarinda tumbuh menjadi pusat pemerintahan dimana pertumbuhan ekonomi, politik, bisnis, hiburan, perdagangan, dan pendidikan semakin berkembang. Hal ini membuat Samarinda menjadi sangat kompleks yang menyebabkan tata kelola Samarinda menjadi lebih ruwet dengan segala permasalahan sosial yang menghambat jalannya roda pemerintahan. Dari permasalahan tersebut didapati sebuah kesepakatan bahwa pemindahan pusat pemerintahan Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman. Sehingga penyiapan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman harus disiapkan seoptimal mungkin agar tata kelola pemerintahan dapat meningkat.

14. Efektivitas Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Aglomerasi Perkotaan

Peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran udara di daerah aglomerasi perkotaan adalah cara untuk menurunkan pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, proses produksi yang lebih ramah lingkungan, dan menggunakan teknologi untuk mengurangi gas-gas yang menyebabkan pencemaran udara. Dengan mengefektifkan pengendalian pencemaran udara tersebut maka pencemaran udara akan turun.

15. Peningkatan Kualitas Sistem Penanggulangan Bencana Alam

Kualitas sistem penanggulangan bencana alam harus ditingkatkan. Karena jika kualitas sistem penanggulangan bencana alam tidak ditingkatkan dapat mencemari air sungai. Sebaliknya, jika kualitas sistem penanggulangan bencana alam ditingkatkan maka akan menurunkan pencemaran air sungai.

16. Pemanfaatan Sumber Daya Air Kota Samarinda yang *Sustainable*

Jika pada DAS tidak dilakukan pengelolaan maka akan terjadi degradasi dan kerusakan. Salah satu indikasi bahwa DAS mengalami degradasi adalah terjadinya banjir. Karena itu konservasi DAS sangat penting salah satunya



dengan cara reboisasi. Dengan konservasi DAS yang baik maka akan menurunkan pencemaran air sungai. Melalui *Water Resource Management Development* dapat menjaga status mutu air sungai.

17. Penerapan Konsep *Water Front City* dengan Membangun Infrastruktur Sungai

Penerapan *waterfront city* merupakan bagian dari *Smart City Principles* pada *Smart Development* dengan aksi *Waterfront Development*. Konsep *waterfront city* Kota Samarinda menjadikan air sebagai *brand*. Dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada, pemerintah akan membangun sungai sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan transportasi. Sehingga dengan konsep yang mengedepankan air sebagai brand ini maka kualitas air sungai harus memenuhi baku mutu.

18. Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan

Pengembangan sistem drainase perkotaan merupakan bagian dari *Smart City Principles* pada *Smart Development*. Pengembangan sistem drainase perkotaan dapat dilakukan dengan cara normalisasi aliran sungai-sungai utama; perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong; kawasan permukiman baru yang dikelola baik secara pribadi maupun massal wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan; meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem drainase; peningkatan kapasitas dan kualitas sistem drainase. Dengan dikembangkannya sistem drainase akan terjaga pula mutu air sungai di Kota Samarinda.

19. Pemanfaatan Lahan-Lahan Terdegradasi Serta Pasca Eksploitasi Lahan

Penggunaan lahan diatas daya dukungnya (eksploitasi) tanpa diimbangi dengan upaya konservasi dan perbaikan kondisi lahan akan menyebabkan degradasi lahan. Lahan-lahan terdegradasi dapat dimanfaatkan lagi dengan cara dikonservasi, peternakan, pertanian organik, dll. Dengan pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi serta pasca eksploitasi lahan diharapkan mampu untuk meningkatkan luas tutupan lahan.



20. Penerapan Konsep dan Strategi Pembangunan Ekonomi (*Green Economy*) yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan adalah pembangunan ekonomi yang tidak merugikan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang namun tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan adalah merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan. Sehingga pembangunan ekonomi di Kota Samarinda dapat mengedepankan sektor lain selain sektor industri pengolahan yang masih cukup dominan agar pencemaran udara dapat berkurang. Walaupun mengedepankan sektor lain yang juga cukup dominan seperti perdagangan, hotel, dan restoran tidak akan mengurangi pendapatan Kota Samarinda secara signifikan. Untuk sektor industri pengolahan dapat digunakan teknologi untuk mengurangi gas hasil pengolahan.

21. Perbaikan Jalan Rusak

Salah satu infrastruktur dasar adalah jalan raya. Masalah ruas jalan yang rusak harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Samarinda. Jalan yang rusak dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Oleh sebab itu, perbaikan jalan rusak adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar.

22. Pemerataan Air Bersih untuk Rumah Tangga

Air bersih adalah hak untuk semua orang. Distribusi air ke seluruh wilayah sangat dibutuhkan warga karena masih ada beberapa wilayah di Kota Samarinda yang kesulitan untuk air bersih. Dengan pemerataan air bersih untuk rumah tangga maka kualitas infrastruktur dasar pun meningkat.

23. Efektivitas Manajemen Lalu Lintas untuk Meminimalisir Kemacetan

Pertumbuhan jumlah lalu-lintas diakibatkan penambahan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Dari tahun ke tahun angka kepemilikan kendaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga timbul kemacetan. Salah



satu upaya untuk mengatasi kemacetan oleh pemerintah adalah dengan melakukan manajemen lalu lintas perkotaan sehingga suatu ruas jalan tetap menjalankan fungsinya dengan baik.

24. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau bagi Aktifitas Masyarakat

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh rusaknya lingkungan maka penting bagi pemerintah Kota Samarinda untuk membuat ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Samarinda sudah membuat beberapa ruang terbuka hijau diantaranya adalah Taman Cerdas, Taman Teluk Lerong, dan taman-taman sepanjang tepian Sungai Mahakam. Peningkatan ruang terbuka hijau bagi aktifitas masyarakat tersebut dapat meningkatkan luas tutupan lahan Kota Samarinda.

d. Arah Kebijakan Pembangunan (RPJMD) Tahap IV

Pembangunan tahap keempat merupakan kelanjutan pembangunan tahap empat. Sehingga pada tahap keempat ini arah kebijakan diharapkan mampu melanjutkan arah kebijakan pada tahap ketiga. Sehingga akan tercipta pembangunan yang berkesinambungan dan mampu meningkatkan pembangunan agar maju dan berkembang dengan mantap dengan bekal pencapaian hasil pembangunan pada tahap ketiga.

Pembangunan tahap keempat ini mempunyai target pembangunan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- Sosial

Target untuk bidang sosial dapat dilihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui IPM. Untuk tahap ketiga ini IPM ditargetkan sebesar 81,88. IPM dipengaruhi oleh indikator lain diantaranya angka melek huruf yang ditargetkan 100%, rata-rata lama sekolah 12 tahun dan angka harapan hidup 74,56 tahun.



- Lingkungan

Untuk target di bidang lingkungan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diketahui dari nilai adipura. Nilai adipura yang ditargetkan adalah 74,90. Nilai adipura dipengaruhi oleh beberapa indikator lain seperti persentase ruang terbuka hijau minimal $\geq 15\%$, persentase kesesuaian guna lahan yang sesuai dengan RTRW minimal $\geq 50\%$ dan jumlah lokasi banjir dari semula 40 titik menjadi 30 titik.

- Ekonomi

Target bidang ekonomi dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi minimal 6 ± 1 . Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh indikator lain diantaranya kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB, untuk sektor perdagangan sebesar 50% sedangkan sektor jasa sebesar 15% angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 3,0 dan menurunnya tingkat inflasi menjadi 4%

Sehingga pembangunan mampu menciptakan sumber daya yang berdaya saing dan tangguh serta kuat Dengan hal tersebut, pembangunan tahap keempat memiliki tema sebagai berikut:

“PENGUATAN PEMBANGUNAN SAMARINDA YANG MENYELURUH”

Pembangunan pada tahap keempat ini pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan seluruh bidang sektor. Pada tahap ini, diharapkan tidak hanya sektor-sektor unggulan daerah lebih menggeliat tetapi tidak hanya pada sektor unggulan tetapi seluruh sektor. Pembangunan dan pengelolaan 3 sektor pembangunan yaitu pembangunan dari sektor industri, perdagangan dan jasa, diarahkan pada penguatan daya saing Kota Samarinda dalam bidang tersebut. Daya saing tersebut hendaknya didukung dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan segala kompetensinya menjawab tantangan global. Jika sumber daya Kota Samarinda telah mampu bersaing dalam pergulatan perekonomian global,



secara otomatis peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dengan mudah tercapai. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring dengan perkembangan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan.

Selain fokus pada pembangunan dan pengelolaan sektor industri, perdagangan dan jasa, Kota Samarinda juga berfokus terhadap rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda. Setelah dilakukan tahap persiapan pada Arah Kebijakan Tahap ketiga dalam rangka pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda ke Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman. Pada Arah Kebijakan tahun keempat ini, diharapkan mulai dilakukan pemindahan. Pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda ke tempat yang lebih lapang dan representative menjadi kebutuhan mendesak, melihat kondisi Samarinda yang selalu banjir dan macet. Penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah Kota Samarinda pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahap keempat diarahkan kepada penguatan pembangunan Samarinda yang menyeluruh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Sdm Lulusan Diploma

Ukuran untuk menentukan kualitas SDM adalah bisa menguasai ilmu dan teknologi dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, kualitas SDM berimplikasi terhadap pembangunan yang berorientasi ke masa depan. Diharapkan semakin tinggi tingkat pendidikan SDM, maka solusi permasalahan pembangunan dapat diatasi. Peningkatan kualitas SDM dengan latar belakang pendidikan hingga diploma diharapkan dapat berimplikasi langsung terhadap pembangunan di Samarinda.

2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Publik

Pelayanan yang baik adalah hak dari warga masyarakat di Kota Samarinda tidak terkecuali. Oleh karena itu, penerapan standar minimal pelayanan publik harus dibutuhkan sebagai sarana pengendalian sistem pelayanan publik. Jika sudah



ada standar minimal pelayanan publik diharapkan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Samarinda.

3. Peningkatan Manajemen Perkotaan Menuju *Smart City*

Pelayanan masyarakat kota yang kian kompleks dalam manajemen smart city dilakukan dengan mengintegrasikan semua sektor yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti ketersediaan listrik, air bersih, banjir, kemacetan, dan lain-lain. Dengan meningkatkan manajemen perkotaan menuju *smart city* maka permasalahan perkotaan seperti tersebut di atas dan juga masalah kemiskinan dapat diturunkan.

4. Efektivitas Manajemen Lalu Lintas untuk Meminimalisir Kemacetan

Pertumbuhan jumlah lalu-lintas diakibatkan penambahan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Dari tahun ke tahun angka kepemilikan kendaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga timbul kemacetan. Salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan oleh pemerintah adalah dengan melakukan manajemen lalu lintas perkotaan sehingga suatu ruas jalan tetap menjalankan fungsinya dengan baik.

5. Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Samarinda ke Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman

Samarinda tumbuh menjadi pusat pemerintahan dimana pertumbuhan ekonomi, politik, bisnis, hiburan, perdagangan, dan pendidikan semakin berkembang. Hal ini membuat Samarinda menjadi sangat kompleks yang menyebabkan tata kelola Samarinda menjadi lebih ruwet dengan segala permasalahan sosial yang menghambat jalannya roda pemerintahan. Dari permasalahan tersebut didapati sebuah kesepakatan bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman agar tata kelola pemerintahan dapat meningkat.



6. Penyiapan Infrastruktur Penunjang Pusat Pemerintahan di Samarinda Seberang

Pada lokasi Samarinda Seberang diharapkan pembangunan pusat pemerintahan Kota Samarinda dapat terintegrasi dalam satu wilayah. Namun, diperlukan penyiapan infrastruktur penunjang pusat pemerintahan di Samarinda Seberang diantaranya adalah pembuatan akses jalan, pembangunan infrastruktur seperti air, listrik, dan komunikasi, serta konstruksi fisik (fondasi, struktur, interior, dan eksterior). Penyiapan infrastruktur penunjang tersebut diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan.

7. Penerapan Konsep dan Strategi Pembangunan Ekonomi (*Green Economy*) yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan adalah pembangunan ekonomi yang tidak merugikan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang namun tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan adalah merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan. Sehingga pembangunan ekonomi di Kota Samarinda dapat mengedepankan sektor lain selain sektor industri pengolahan yang masih cukup dominan agar pencemaran udara dapat berkurang. Walaupun mengedepankan sektor lain yang juga cukup dominan seperti perdagangan, hotel, dan restoran tidak akan mengurangi pendapatan Kota Samarinda secara signifikan. Untuk sektor industri pengolahan dapat digunakan teknologi untuk mengurangi gas hasil pengolahan.

8. Penerapan Konsep *Water Front City* dengan Membangun Infrastruktur Sungai

Penerapan *waterfront city* merupakan bagian dari *Smart City Principles* pada *Smart Development* dengan aksi *Waterfront Development*. *Waterfront city* Kota Samarinda menjadikan air sebagai brand. Dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada pemerintah akan membangun sungai sebagai pusat bisnis, pariwisata,



dan transportasi. Untuk mendukung konsep ini pemerintah Samarinda akan membangun infrastruktur sungai.

9. Optimalisasi Pengelolaan Lahan untuk Menanggulangi Banjir

Optimalisasi pengelolaan lahan merupakan bagian dari *Smart City Principles* pada *Smart Development* dengan aksi *Land Use Development*. Pengelolaan lahan yang tidak baik akan membuat lahan yang diolah dapat menjadi rusak karena pengolahan lahan yang tidak optimal. Dengan lahan yang rusak akibat pengelolaan lahan yang tidak optimal misalnya lahan hijau, pertanian, atau lahan gambut di Samarinda maka dapat menyebabkan banjir. Dengan banjir yang terjadi biasanya air yang dihasilkan sangat kotor sehingga mutu air sungai menurun. Sebaliknya dengan optimalisasi pengelolaan lahan yang baik maka banjir di Kota Samarinda dapat ditanggulangi. Banjir yang dapat ditanggulangi menyebabkan mutu air sungai dapat terjaga dengan baik.

10. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Keindahan Kota

Pelestarian lingkungan dan pengelolaan keindahan Kota Samarinda dilakukan dengan salah satu cara yaitu memaksimalkan momen Jumat Bersih. Selain itu, pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan reboisasi pada lahan-lahan terdegradasi dan penghijauan. Sehingga pelestarian lingkungan dan pengelolaan keindahan kota Samarinda dapat meningkatkan luas tutupan lahan.

11. Pemanfaatan Sumber Daya Air Kota Samarinda yang Sustainable

Jika pada DAS tidak dilakukan pengelolaan maka akan terjadi degradasi dan kerusakan. Salah satu indikasi bahwa DAS mengalami degradasi adalah terjadinya banjir. Karena itu konservasi DAS sangat penting salah satunya dengan cara reboisasi. Dengan konservasi DAS yang baik maka akan menurunkan pencemaran air sungai. Melalui *Water Resource Management Development* dapat menjaga status mutu air sungai.



12. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau bagi Aktifitas Masyarakat

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh rusaknya lingkungan maka penting bagi pemerintah Kota Samarinda untuk membuat ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Samarinda sudah membuat beberapa ruang terbuka hijau diantaranya adalah Taman Cerdas, Taman Teluk Lerong, dan taman-taman sepanjang tepian Sungai Mahakam. Peningkatan ruang terbuka hijau bagi aktifitas masyarakat tersebut dapat meningkatkan luas tutupan lahan Kota Samarinda.

13. Perbaikan Jalan Rusak

Jalan rusak pasti menjadi kendala setiap tahunnya. Masalah ruas jalan yang rusak harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota Samarinda. Jalan yang rusak dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Oleh sebab itu, perbaikan jalan rusak adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar.

14. Pemerataan Air Bersih untuk Rumah Tangga

Kota Samarinda merupakan kota yang dilewati banyak sungai, sehingga permasalahan ketersediaan air tidak menjadi kendala. Namun, pengelolaan air bersih untuk rumah tangga belum dilakukan secara optimal. Distribusi air ke seluruh wilayah sangat dibutuhkan warga karena masih ada beberapa wilayah di Kota Samarinda yang kesulitan untuk air bersih. Dengan pemerataan air bersih untuk rumah tangga maka kualitas infrastruktur dasar pun meningkat.

Pencapaian pembangunan daerah diukur dengan indikator-indikator sasaran dan sasaran pokok yang ada di RPJPD Kota Samarinda. Dengan adanya target pencapaian pada tiap indikator maka kegagalan dan keberhasilan pembangunan dapat terlihat. Sehingga keterkaitan visi, misi, sasaran, sasaran pokok dan indikator sasaran beserta target capaian pembangunan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:



Tabel 5.3

Visi, Misi, Sasaran, Sasaran Pokok, Indikator dan Target RPJPD Kota Samarinda 2005-2025

Visi: Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan			Target				
			Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang Berdaya Saing Berbasis Penegakan Hukum							
Sasaran	Sasaran Pokok		Indikator				
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			IPM	77,05	78,64	80,34	81,88
	1	Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek huruf	98,01	99,4	100	100
	2	Meningkatnya Angka Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	9,8	10,56	11,21	12
	3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	71,21	72,33	73,44	74,56
	4	Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan	970.468	1.427.726	1.883.974	2.340.223
Misi II: Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Kota Samarinda yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah							
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi			Pertumbuhan Ekonomi	6.16	8.02	6±1	6±1
	5	Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persentase sektor perdagangan terhadap PDRB	29,35	42	46	50
			Persentase sektor jasa terhadap PDRB	11,92	10,44	12,72	15



Visi: Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan				Target			
				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
6	Terjangkaunya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat	Tingkat Inflasi	7	6,45	5	4	
7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,21	4,35	3,67	3,0	
8	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka Pengangguran	9,22	7,98	6,49	5,00	
9	Menurunnya Indeks Gini	Nilai Indeks Gini		0,30	0,29	0,28	
Misi III: Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat dan Asri							
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Nilai Adipura	61,03	70,90	72,90	74,90	
10	Menurunnya pencemaran udara	Indeks pencemaran udara	51-100	51-100	51-100	0-50	
11	Menurunnya pencemaran air sungai	Indeks pencemaran air sungai	>31, cemar berat	>31, cemar berat	11-30, cemar sedang	1-10, cemar ringan	
12	Mengurangi titik lokasi banjir	Jumlah Lokasi Banjir	60	50	40	30	
13	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau		7,45	≥10	≥15	
14	Menurunnya Penyimpangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW	Persentase kesesuaian guna lahan yang sesuai dengan RTRW			≥30	≥50	



Tabel 5.4

Fokus dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Samarinda 2005-2025

Visi: Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan					
Fokus	Arah Kebijakan	RPJM D I	RPJM D II	RPJM D III	RPJM D IV
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang berdaya berbasis penegakan hukum					
SDM Masyarakat	Peningkatan kesadaran pendidikan bagi masyarakat				
	Penyiapan sdm yang mampu menyerap pasar kerja				
	Pencapaian ipm yang tinggi dibandingkan daerah sekitar				
	Peningkatan kualitas profesionalisme manajemen pendidikan				
	Peningkatan kualitas SDM lulusan diploma				
	Pembangunan masyarakat yang berdaya dan berbudaya berbasis pembangunan masyarakat				
	Peningkatan profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan				
	Pengembangan usaha produktif yang mendorong perekonomian masyarakat				
SDM Aparatur	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah				
	Reformasi birokrasi termasuk didalamnya perencanaan kebutuhan aparatur sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi, yang menunjang penciptaan daya saing ekonomi dan pelayanan prima				
	Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik				
	Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur				
	Pengimplementasian ICT untuk Pelayanan Publik				





Visi: Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan					
Fokus	Arah Kebijakan	RPJM D I	RPJM D II	RPJM D III	RPJM D IV
Misi II: Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Kota Samarinda yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah					
Perekonomian	Pertumbuhan produk perdagangan daerah				
	Membangun regulasi investasi dibidang industri yang menarik investor dan bersifat adil bagi kepentingan daerah				
	Peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi tahunan				
	Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama investasi dan pemanfaatan pasar modal, dalam upaya menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari sektor swasta dan memanfaatkan sumber daya lainnya khususnya sumber daya migas dan sumur marginal				
Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan pengadaan sarana dan prasarana tata kelola kota yang mampu menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan PAD				
	Peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi sektor Unggulan				
	Peningkatan manajemen perkotaan menuju <i>Smart Qty</i>				
	Pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal				
	Peningkatan dan proporsionalitas antara sektor industri, pertanian dan UMKM melalui penyediaan modal, pelatihan dan peningkatan prasarana dan sarana pemasaran produk				
	Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam kemandirian berusaha				
	Peningkatan ekspor komoditi unggulan				
	Perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu				
	Peningkatan kualitas dan akses tenaga kerja				
	Pengarustamaan gender				





Visi: Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan					
Fokus	Arah Kebijakan	RPJM D I	RPJM D II	RPJM D III	RPJM D IV
	Pembinaan Keluarga Berencana				
	Peningkatan aksesibilitas penunjang sektor unggulan dan pemukiman				
	APBD yang pro poor (melalui 4 kluster) dan pro job				
	Optimalisasi tata kelola jalan raya				
	Efektivitas manajemen lalu lintas untuk meminimalisir kemacetan				
Tata Kelola Pemerintahan	Penyiapan Pembangunan infrastruktur pemerintahan di Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman				
	Pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda ke Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman				
	Penyiapan infrastruktur penunjang pusat pemerintahan di Samarinda Seberang				
Misi III: Mewujudkan Lingkungan yang Sehat dan Asri					
Lingkungan	Peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran lingkungan				
	Efektivitas pengendalian pencemaran udara di daerah aglomerasi perkotaan				
	Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (<i>green economy</i>) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan				
	Pelestarian lingkungan dan pengelolaan keindahan kota				
	Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi serta pasca eksploitasi lahan				
	Peningkatan Ruang terbuka hijau bagi aktifitas masyarakat				
	Pengembangan sistem pengelolaan tata ruang, pelestarian				





Visi: Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan					
Fokus	Arah Kebijakan	RPJM D I	RPJM D II	RPJM D III	RPJM D IV
	lingkungan (khususnya yang menyangkut rehabilitasi tambang) dan pengelolaan keindahan kota				
	Pemanfaatan Sumber Daya Air Kota Samarinda yang Sustainable				
	Peningkatan kualitas sistem penanggulangan bencana alam				
	Penerapan konsep water front city dengan membangun infrastruktur sungai				
	Pengembangan sistem drainase perkotaan				
	Optimalisasi pengelolaan lahan untuk menanggulangi banjir				
	Percepatan penanggulangan banjir melalui tindakan preventif, rehabilitasi dan peningkatan kualitas perencanaan tata kota serta penanggulangan kebakaran melalui sistem terpadu				
Infrastruktur Dasar	Perbaiki jalan rusak				
	Pemerataan air bersih untuk rumah tangga				
	Percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur termasuk infrastruktur dasar listrik, air bersih, perumahan dan semenisasi gang, yang telah direncanakan dalam kebijakan tata ruang				





5.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 1.057.671 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2017 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023 (tabel 5.5), membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km². Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Tabel 5.5

Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2023

No	Kecamatan	Jumlah 2013	Rencana Distribusi Penduduk	
			2017	2023
1	Palaran	54.353	71.352	93.668
2	Samarinda ilir	73.383	96.334	126.463
3	Sambutan	48.342	63.461	83.309
4	Samarinda Kota	36.604	48.052	63.081
5	Samarinda Seberang	63.715	83.642	109.802
6	Loa Janan Ilir	62.740	82.362	108.122
7	Sungai Kunjang	126.302	165.804	217.660
8	Samarinda Ulu	134.659	176.775	232.062
9	Sungai Pinang	105.695	138.752	182.148
10	Samarinda Utara	99.894	131.137	172.150
	Jumlah	805.687	1.057.671	1.388.466

Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2013-2033



Arah pembangunan kawasan perkotaan yang tertuang dalam RPJPD pada dasarnya merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan, pemenuhan standar pelayanan perkotaan, dan keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan wilayah terpadu dalam jangka panjang. Pembangunan Wilayah Terpadu adalah pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda juga harus mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rencana jaringan prasarana berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

➤ **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

Sistem Jaringan Prasarana Utama diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

• **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Sistem jaringan transportasi darat meliputi: 1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 2) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terbagi menjadi: 1) Jaringan Jalan; dan 2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Jaringan jalan meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1); 3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2); 4) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3); dan 5) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan bebas hambatan. Sedangkan Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan terminal



penumpang tipe A; dan 2) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B.

Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan, meliputi: 1) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau; 2) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyebrangan; dan 3) Pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

- **Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian meliputi 1) Jaringan dan layanan kereta api; 2) Stasiun kereta api; dan 3) Sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.

Jaringan dan Layanan Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi; 2) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan; 3) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antar-kota yang menghubungkan dengan potensi batubara, dan 4) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis.

Stasiun Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedang; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas kecil.

- **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: 1) Tatanan kepelabuhanan; dan 2) Alur pelayaran.

Tatanan Kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum. Pelabuhan umum terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama; 2) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan.



Alur Pelayaran meliputi: 1) Pemeliharaan alur pelayanan kapal barang; dan 2) Pemeliharaan alur pelayaran kapal penumpang.

- **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kebandarudaraan. Tatanan kebandarudaraan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder; 3) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; 4) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan.

- **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- **Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energy listrik dan pemenuhan energi lainnya. Sistem jaringan energi terdiri dari: 1) Pembangkit tenaga listrik; 2) Gardu Induk; 3) Jaringan transmisi tenaga listrik; dan 4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Pembangkit Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik; 2) Pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; dan 3) pengembangan listrik pedesaan.

Gardu Induk terdiri atas: 1) Pemeliharaan; dan 2) Pengembangan listrik pedesaan.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda-Balikpapan; dan 2) Pengembangan jaringan Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT) 150kV.

Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional; dan 2) Pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang menghubungkan sumur-sumur migas ke unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.



- **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem ini adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas: 1) Jaringan terrestrial; 2) Jaringan nirkabel; dan 3) Jaringan satelit.

Diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses yang diharapkan menjangkau wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

- **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air meliputi: 1) Pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai; 2) Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang di prioritaskan; 3) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak nasional yang diprioritaskan; 4) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak provinsi yang diprioritaskan; dan 5) Pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

Untuk mencapai Tujuan Penataan Ruang 20 tahun mendatang, terdapat kebijakan penataan ruang dan rencana sistem pusat pelayanan kota. 7 (Tujuh) Kebijakan penataan ruang yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;



2. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai Kota Tepian;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
4. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata;
5. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
6. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kebijakan penataan ruang, di dukung oleh adanya program yang mendukung kebijakan itu terlaksana. Berikut ini adalah tabel indikasi program RTRW Kota Samarinda disertai besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan waktu pelaksanaan program.

Tabel 5.6
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
1. Sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis; 2. Sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.	1. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loajan Ilir; 2. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan,	1. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara; 2. Pusat Lingkungan IIdi Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang; 3. Pusat Lingkungan III di



Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
	<p>elayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.</p>	<p>Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;</p> <p>4. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;</p> <p>5. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;</p> <p>6. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;</p> <p>7. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;</p> <p>8. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;</p> <p>9. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan</p>



Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
		Samarinda Seberang; 10. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.
Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional	Sub Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yaitu sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribdatan dan sarana pelayanan umum.	Pusat lingkungan kota dilengkapi sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Pengembangan sistem kota-kota secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukungnya. Untuk mengembangkan kota-kota di Kota Samarinda baik hierarki maupun fungsinya, maka diperlukan kebijaksanaan pengembangan menurut potensi per kecamatan seperti di tabel dibawah ini:



Tabel 5.7

Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
1.	Samarinda Ulu	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan III Berada di Kelurahan Sidodadi, Gunung Kelua, Air Hitam, Air Putih, Telok Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sistem jaringan perkereta apian.</p> <p>b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau Publik, Ruang Terbuka Hijau Privat, Kawasan Rawan Banjir dan Kawasan Longsor.</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjir dan longsor), kawasan pengolahan ikan, Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>
2.	Samarinda Ilir	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan V Berada di Kel. Pelita, Sungai Dama, dan sebagian Kel. Selili</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), kawasan rawan bencana alam (longsor)</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri (kecil dan makro, sedang dan menengah, dan industri besar), kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjir dan longsor), Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda)</p>
3.	Samarinda Kota	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis.</p> <p>b) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>c) Pusat Lingkungan IV Berada di Kelurahan Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, dan Sungai Pinang Luar.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat)</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda dan kawasan perdagangan Citra Niaga.</p>
4.	Samarinda Seberang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan IX Berada di Kelurahan Masjid, Sungai Keledang, Baqa.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa berskala kawasan, kawasan perkantoran (pemerintah dan swasta), pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (sedang dan menengah, dan industri besar), Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan Kota Lama di Kec. Samarinda Seberang).</p>



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
5.	Samarinda Utara	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Sempaja Utara, dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian, sistem jaringan transportasi udara. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan pada kawasan di bawahnya (kawasan resapan air), Kawasan perlindungan setempat (embung), Kawasan Cagar Alam (KRUSUnmul), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata (alam, sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro), RTNH, Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (KRUS dan kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan pariwisata Budaya Desa Pampang).
6.	Sungai Kunjang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Telok Lerong Ilir, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa berskala (kawasan dan pusat-pusat lingkungan), perkantoran pemerintah, pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro; sedang –menengah, besar), RTNH, Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>
7.	Sungai Pinang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	<p>a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.</p> <p>b) Pusat Lingkungan II Berada di Kelurahan Temindung Permai, Bandara, dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam.</p>
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	<p>a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan).</p> <p>b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).</p>
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).</p> <p>b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata buatan, RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana, Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).</p>
8.	Sambutan	a. Rencana Sistem	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		Pusat Pelayanan Kota	Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan VI Berada di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		d. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata buatan, (industri sedang-menengah dan besar), RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan perdagangan dan jasa berskala kota di Kec. Sambutan).
9.	Palaran	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rawa Makmur. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan X Berada di Kelurahan Rawa Makmur, Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Jaringan Transportasi Laut. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya



No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata alam dan buatan, (industri kecil - mikro dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan industri di Kec. Palaran).
10.	Loa Janan Ilir	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Smpang Tiga. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan VIII Berada di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Smpang Tiga.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Perkereta-apian. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat) dan Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan, pariwisata buatan, (sedang-menengah dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).



Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu untuk perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, industri, ruang bagi sektor informal, pertambangan, pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis kota seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8
Potensi Pengembangan Kota Samarinda

No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Peruntukan Perumahan	<p>a. Kawasan peruntukan perumahan meliputi: a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kapling 200 M² per unit; b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kapling 300 M² per unit; dan c. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M² per unit.</p> <p>b. Kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sambutan, dengan luas 4.000 Ha.</p> <p>c. Kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha.</p> <p>d. Kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas 2.000 Ha.</p>
2.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	<p>a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu.</p> <p>b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa.</p> <p>c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung</p>



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.
3.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	<p>a. Kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang;</p> <p>b. Kawasan perkantoran swasta terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang.</p>
4.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	<p>a. Kawasan pariwisata alam meliputi: a. Lembah Hijau (Camping Ground Area) di Kecamatan Samarinda Utara; b. Kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara; c. Air Terjun Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; d. Telaga Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara; e. Wisata Geologi di Kecamatan Palaran; f. Air Terjun Lubang Muda Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; dan g. Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara.</p> <p>b. Kawasan pariwisata sejarah budaya meliputi: a. Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; b. Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Puo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang; d. Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan e. Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>c. Kawasan pariwisata buatan meliputi: a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang; b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus; d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan; e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara; f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara; h. Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang; i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara; j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan</p>



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		Sambutan.
5.	Kawasan Peruntukan Industri	<p>a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>b. Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir.</p> <p>c. Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.</p>
6.	Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal	Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal meliputi: Kawasan Citra Niaga di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.
7.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	<p>a. Kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi: 1. batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; 2. tanah urug yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan 3. pasir sungai yang terletak di Kecamatan Loajanan Ilir dan Sambutan.</p> <p>b. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: 1. batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan</p>



No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		Kecamatan Samarinda Ilir; dan 2. batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
8.	Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan	<p>a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang.</p> <p>b. Kompleks Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Samarinda Kota seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Samarinda Seberang dan tempat latihan militer seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Samarinda Utara.</p> <p>c. Kawasan pertahanan : 1. Korem 091/Aji Surya Natakusuma di Kecamatan Samarinda Kota; Kodim 0901/ Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Denpom-1, Denbekang VI-44-01, Denzibang-1, Denpal 06-12-03, Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pekas Gabrah 54 Na.2.08.05 di Kecamatan Samarinda Kota; 5. Koramil 01 di Kecamatan Samarinda Ulu; 6. Koramil 02 di Kecamatan Samarinda Utara; 7. Koramil 03 di Kecamatan Samarinda Seberang; 8. Koramil 04 di Kecamatan Palaran; 9. Kipan A, Kipan C Yonif 611/AWL di Kecamatan Loa Janan Ilir.</p>
9.	Kawasan Strategis Kota	<p>a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1. Kawasan industri di Kecamatan Palaran. 2. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan.</p> <p>b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang.</p> <p>c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi: 1. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.</p> <p>d. Kawasan Strategis dari sudut aksesibilitas tinggi meliputi: 1. Kawasan Industri Palaran; 2. Kotabaru berbasis industri Palaran; 3. Kota Baru Bekas Bandara Termindung; 4. Kawasan CBD di Pusat Kota; 5. Pusat Pemerintahan di Makroman; 6. Kawasan Wisata</p>

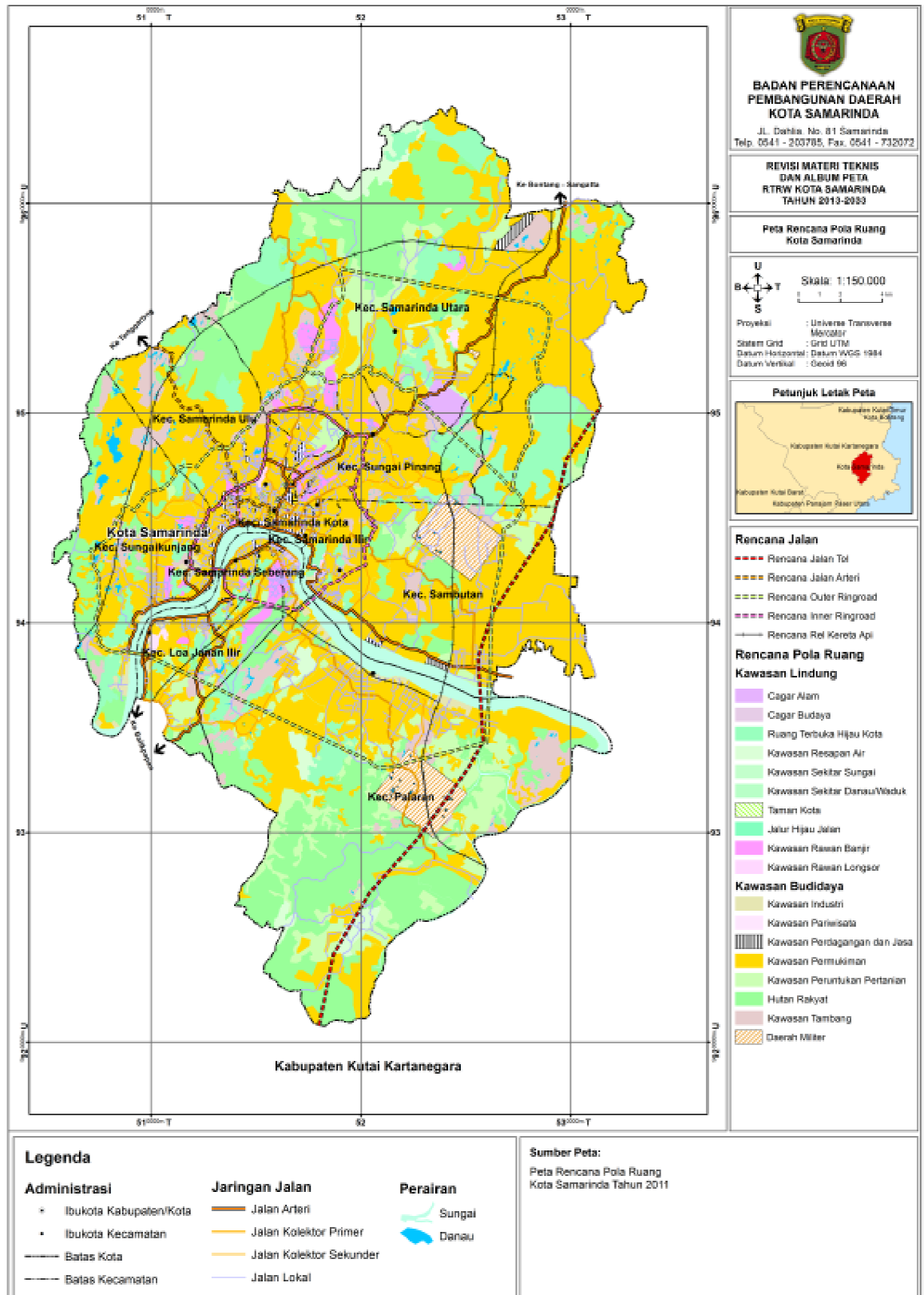


No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
		Lempake; 7. Kawasan Tepian Mahakam; 8. Kawasan Bandar Udara Sei Siring; 9. Pusat Pengembangan Samarinda Seberang.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034



Gambar 5.2
Peta Pola Ruang Kota Samarinda





Tabel 5.9
Indikasi Program RTRW Kota Samarinda Tahun 2015-2025

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Perwujudan Struktur Ruang										
1	Perwujudan Pusat Kegiatan										
1.1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kec. Samarinda Kota									
1.1.1	Penyusunan RDTR Kota Samarinda.	Wilayah Fungsional Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1.1.2	Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai hirarki sehingga Pusat Kegiatan Permukiman (PKL, PPK, PPL) mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya,			APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1)	Penyusunan Masterplan Terminal	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan						
2)	Penyusunan Manajemen Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (Management Site Plan)	Kecamatan Samarinda Ulu	800,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
3)	Perluasan Pembebasan Lahan Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang		APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan dan Bagian Pemerintahan Umum						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Penyusunan DED Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Koperindag, Dishub, dan Distarkim						
5)	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah		750,000,000								
	DLL										
	1.2. Perwujudan Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan										
	1.2.1. Penyusunan Masterplan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
	1.2.2. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	2,500,000,000	APBD Kab. Tasikmalaya	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						
	1.2.3. Penyediaan prasarana dan sarana Desa Pusat Pertumbuhan sehingga Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	4,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah										
	2.1 Transportasi										
	a Peningkatan fungsi jalan	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	100,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan						
	b Peningkatan/ Perbaikan jaringan Jalan Lokal	Kota Samarinda	70,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan						
	c Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Binamarga dan Pengairan						
	d Program Pengembangan Pelayanan Air Minum	Kota Samarinda		APBD Kota Samarinda	PDAM						
	1) Pengembangan dan Pengelolaan air minum Pendukung PAMSIMAS	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM						
	2) Pembangunan Prasarana DAN Sarana Air Bersih Perkotaan	Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM						
	2.2. Pembangunan Jaringan Telepon, Listrik	Kota Samarinda	7,000,000,000	APBD Kota Samarinda	PT. Telekomunikasi, PLN, Dinas Pertambangan						
	2.3. Penyusunan Mast erpaln Telematika Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama	Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Perwujudan Pola Ruang										
1	Perwujudan Kawasan Lindung										
	1.1. Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
	1.2. Pemetaan Kondisi Kawasan Lindung, Lahan Kritis secara rinci/detail	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
	Penataan Kawasan Cagar Budaya	Kec. Samarinda Seberang	850,000,000								
	1.3. Penanaman tanaman tahunan pada lahan kritis	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
	1.4. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kawasan lindung	Kota Samarinda	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, BKPRD						
	1.5. Pengembangan Pertanian lahan lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian						
2	Perwujudan Kawasan Budidaya			APBD Kota Samarinda							
	2.1. Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	150,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
	Pengembangan tanaman pangan dan palawija		2,200,000,000								
	Pengembangan tanaman hortikultur		2,650,000,000								
	Pengembangan peternakan	Kota Samarinda	1,550,000,000								



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan perikanan		1,750,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata alam		1,500,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata tirta		1,250,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata agro		1,650,000,000								
	Pengembangan kawasan wisata budaya,		850,000,000								
	Pengembangan kawasan Wisata Adventure Dan Arus Air		750,000,000								
	Pengembangan Kawasan agropolitan/agribisnis		2,500,000,000								
	2.2. Pengembangan pertanian lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim						
	2.3. Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan pengembangan kawasan industry	Kota Samarinda	1,000,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Samarinda	Dinas Pertambangan						
B	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten										
	1.1. Penyusunan RDTR Kawasan Strategis	Kota Samarinda	2,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, Pariwisata						



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2. Penataan Kawasan Strategis Kota (KSK) dan Penyediaan Frasarana dan sarana pendukung	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Distarkim, Pariwisata, Koperindag						



BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda 2005-2025 merupakan bagian dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025. RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah Kota Samarinda dalam menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. RPJMD yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program-program pembangunan lima tahun, dan menerjemahkan arah kebijakan pembangunan setiap periode/tahapan dalam RPJP Kota Samarinda.

6.1. Prinsip Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 merupakan pedoman pembangunan yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bawahnya seperti RPJMD Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dan kesinergisan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon-calon Walikota di setiap tahapan harus memerhatikan RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RPJMD Kota Samarinda bagi calon walikota terpilih.
2. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kota Samarinda dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Samarinda dan masyarakat termasuk dunia



usaha, memiliki kewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJP Kota Samarinda 2005-2025.

3. Pemerintah Kota Samarinda melalui Bappeda perlu menyebarluaskan dokumen RPJPD kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon Walikota dan calon wakil Walikota melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai-partai politik di wilayah Samarinda sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dilaksanakan dan selaras dengan tiap tahapan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
4. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan program kerjanya pada pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 dengan mengerahkan secara optimal semua potensi dan sumber daya sesuai sasaran pokok periode terkait.
5. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian sasaran pokok RPJPD Kota Samarinda melalui sinergitasnya pada sasaran RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda.
6. Dalam rangka implementasi RPJPD Kota Samarinda 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan penjabaran RPJP 2005-2025 ke dalam RPJMD Kota Samarinda.

6.2. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;



- b) Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c) Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d) Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 meliputi pengendalian dan evaluasi kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta evaluasi hasil RPJPD. Mekanisme ini mengacu pada aturan teknis tentang Tahapan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

- **Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang**

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Samarinda mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaannya, RPJPD harus mengacu pada RPJPD Provinsi dan berpedoman pada RTRW Kota Samarinda serta memperhatikan RPJPD Kota Samarinda dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya agar terjadi keselarasan pembangunan daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam menyusun RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Pada akhirnya, Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Kepala Daerah.



- **Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang**

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Walikota.

- **Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang**

Evaluasi terhadap hasil RPJPD Kota Samarinda mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD Kota Samarinda. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Samarinda dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Samarinda.

Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD dan melaporkan evaluasi hasil RPJPD kepada Walikota. Selanjutnya, Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur.



6.3. Perubahan Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Kota Samarinda ini dapat berubah berdasarkan asumsi-asumsi yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Asumsi-asumsi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Perubahan yang mendasar, mencakup antara lain: bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional, dan
- d. Merugikan kepentingan nasional, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.



BAB VII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan selama 20 (duapuluh) tahun kedepan. Pada satu sisi, RPJPD Kota Samarinda merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Pada sisi lain, RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 juga di selaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Samarinda bagi seluruh *stakeholder*.

Dokumen RPJPD Kota Samarinda merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Samarinda selama 20 (duapuluh) tahun mendatang di mana dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Samarinda dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas. Dengan berpedoman pada RPJPD, maka arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD dapat selaras dengan RPJP Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Keberhasilan pembangunan Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi RPJPD Kota Samarinda yaitu **“Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan”**, perlu didukung dengan adanya:

1. Komitmen dan integritas pemimpin yang kuat dan demokratis;
2. Ketersediaan pendanaan yang mendukung implementasi kebijakan;
3. Konsistensi kebijakan pemerintah;
4. Keberpihakan kepada rakyat; dan
5. Peran serta partisipasi masyarakat, *stakeholder* dan dunia usaha secara aktif.



Pencapaian keberhasilan RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi, dan partisipasi dari penyelenggara pemerintahan Kota Samarinda. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan daerah jangka panjang tetap dalam koridor sebagaimana telah ditentukan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan lima tahunan (RPJMD).

Dengan segala optimisme dalam membangun Kota Samarinda untuk masa depan yang lebih baik, setelah berupaya seoptimal mungkin maka kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ridho dan karunia-Nya menyertai upaya-upaya kita semua dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Samarinda.



BAPPEDA KOTA SAMARINDA

Jl. Dahlia No. 81 Samarinda

TELP: (0541) 203785, FAX: (0541) 732072

<http://bappeda.samarindakota.go.id/>